KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2018

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

Provinsi Sulawesi Barat

TIM PENYUSUN

KAJIAN FISKAL REGIONAL
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

Penanggung Jawab:
Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
Endah Martiningrum

Ketua:
Kepala Bidang PPA II
Doddy Handaryadi

Editor:
Budy Prastowo

Kontributor:
Budy Prastowo
Christmas Kurnianto
Arvis Ali Baso
Mardiyana
Hepy Yudha Hariyanto
Ronald Rannu
Avry Zainuddin

Endah Martiningrum

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Kajian Fiskal Regional Tahun 2018 (Annual Regional Fiscal Report 2018) Provinsi Sulawesi Barat dapat diselesaikan. Penyusunan kajian ini, selain sebagai output atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dibidang Pengelolaan Fiskal, juga sebagai bentuk pelaporan managerial kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan masukan dalam penyusunan kajian fiskal secara nasional dan komprehensif, sekaligus memberikan informasi yang bernilai strategis kepada mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat baik Satuan Kerja maupun Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, para Bupati, para Sekretaris Daerah dan seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten se-Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama lingkup Sulawesi Barat dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu atas kontribusi berupa penyediaan data dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini, sehingga dapat diselesaikan secara baik dan tepat waktu.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun kajian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun sangat menghargai saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan kajian ini di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap kajian ini memberi manfaat untuk para pembaca dan pelaku pembangunan di Sulawesi Barat.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Plt. Kepala Kantor,

Endah Martiningrum

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GRAFIK ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
EXECUTIVE SUMMARY ..... **xiii**
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL **1**
1.1 INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL **1**
1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1
1.1.2 Suku Bunga 7
1.1.3 Inflasi 8
1.1.4 Nilai Tukar 9
1.2 INDIKATOR KESEJAHTERAAN **10**
1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 10
1.2.2 Tingkat Kemiskinan 12
1.2.3 Ketimpangan (Gini Ratio) 15
1.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan 16
1.3 EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL **18**
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL **20**
2.1 APBN TINGKAT PROVINSI **20**
2.2 PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI **21**
2.2.1 Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi 21
2.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi 21
2.3 BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI **23**
2.3.1 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Organisasi (Bagian Anggaran/Kementerian/Lembaga) 23
2.3.2 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi 24

2.3.3 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja.. 25
2.3.4 Analisis Belanja Pemerintah Pusat..... 26
2.4 ANALISIS *CASH FLOW* PEMERINTAH PUSAT..... 31
2.5 TRANSFER KE DAERAH 31
2.6 PENGELOLAAN BLU PUSAT 32
2.7 PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT 33
2.7.1 Penerusan Pinjaman..... 33
2.7.2 Kredit Program..... 33
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD..... 36
3.1 APBD TINGKAT PROVINSI 36
3.2 JENIS PENDAPATAN DALAM APBD 38
3.3 JENIS BELANJA DALAM APBD 41
3.3.1 Rincian Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan 41
3.3.2 Rincian Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja (Sifat Ekonomi) . 42
3.4 PENGELOLAAN BLU DAERAH 44
3.4.1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah 44
3.4.2 Perkembangan Pengelolaan Aset, PNBP, dan RM BLU Daerah. 45
3.4.3 Analisis Legal..... 46
3.5 PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH..... 47
3.5.1 Bentuk Investasi Daerah..... 47
3.5.2 Profil dan Jenis Badan Usaha Milik Daerah 48
3.6 SILPA DAN PEMBIAYAAN..... 48
3.6.1 Perkembangan Surplus/Defisit APBD 49
3.6.2 Pembiayaan Daerah 50
3.7 ANALISIS LAINNYA 51
3.7.1 Analisis Realisasi APBD per Kabupaten di Sulbar 51
3.7.2 Analisis Kontribusi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD di Sulbar 51
3.7.3 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah..... 53
3.7.4 Analisis Kesehatan Pengelolaan Keuangan Daerah di Sulbar 53
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)..... 58
4.1 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN..... 58
4.2 PENDAPATAN KONSOLIDASIAN 58
4.2.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan 58

4.2.2 Rasio Pajak (*Tax Ratio*) 60
4.2.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian 62
4.3 BELANJA KONSOLIDASIAN 63
4.3.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan 63
4.3.2 Analisis Perubahan 63
4.3.3 Analisis Rasio Belanja Konsolidasian 64
4.3.4 Analisis Belanja Sektor Unggulan 66
4.3.5 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Ekonomi Regional 66
4.4 SURPLUS/DEFISIT 69
4.5 ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 69
BAB V KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL 71
5.1 SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL DI SULAWESI BARAT BERDASARKAN ANALISIS LQ, MRP, *SHIFT-SHARE EM*, *OVERLAY*, DAN TIPOLOGI *KLASSEN* 71
5.2 SEKTOR DAN SUBSEKTOR POTENSIAL DI SULBAR 73
5.2.1 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 73
5.2.2 Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 74
5.2.3 Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 75
5.2.4 Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian 76
5.2.5 Sub Sektor Perikanan 78
5.2.6 Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman 79
5.3 TANTANGAN FISKAL REGIONAL 80
5.3.1 Urgensi Pemerataan Pola Penyerapan Anggaran 80
5.3.2 Optimalisasi Potensi Pajak dari Sektor Ekonomi Unggulan 82
5.3.3 Urgensi Pembangunan Infrastruktur di Sulbar 84
BAB VI ANALISIS TEMATIK 86
Kontribusi dan Tantangan Dana Desa Dalam Upaya Untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan di Sulbar 86

6.1 Kontribusi Dana Desa terhadap Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Desa di Wilayah Sulbar 86
6.2 Tantangan Dana Desa Dalam Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan di Sulbar 89
6.2.1 Optimalisasi Waktu Penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa 89
6.2.2 Urgensi Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Dana Desa 91
6.2.3 Optimalisasi BUMDES di Sulbar 92
BAB VII PENUTUP 94
7.1 KESIMPULAN 94
7.2 REKOMENDASI 97
REFERENSI 99
LAMPIRAN 100
LAMPIRAN I Hasil Analisis Regresi Sederhana mengenai Pengaruh Belanja Pemerintah Konsolidasian Sulbar terhadap PDRB Sulbar 100
LAMPIRAN II Hasil Analisis Overlay Sektor Unggulan di Sulbar Tahun 2018 101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian IPM per Komponen Provinsi Sulbar Tahun 2017 11
Tabel 1.2 Kondisi Ketenagakerjaan Sulawesi Barat Tahun 2015 - 2018 16
Tabel 1.3 Matriks Target-Capaian Indikator Pembangunan Sulawesi Barat Tahun 2017 18
Tabel 2.1 Perkembangan APBN Provinsi Sulawesi Barat (dalam Rp miliar) 20
Tabel 2.2 Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi di Sulbar 21
Tabel 2.3 Pendapatan PNBP Pemerintah Pusat per Jenis PNBP di Sulbar 22
Tabel 2.4 Pendapatan Empat PNBP Fungsional Terbesar Pemerintah Pusat 23
Tabel 2.5 Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Bagian Anggaran 23
Tabel 2.6 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi di Sulbar 24
Tabel 2.7 Rasio Belanja Modal Infrastruktur Prov. Sulawesi Barat Tahun 2017-2018 29
Tabel 2.8 Rasio Belanja Fungsi Pendidikan Prov. Sulawesi Barat Tahun 2017-2018 29
Tabel 2.9 Rasio Belanja Fungsi Kesehatan Prov. Sulawesi Barat 30
Tabel 2.10 Defisit Cash Flow APBN Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 (Rp miliar) 31
Tabel 2.11 Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer 31
Tabel 2.12 Perkembangan Pengelolaan Aset Satker PNBP 32
Tabel 2.13 Perkembangan Pagu PNBP dan Pagu RM Satker PNBP 33
Tabel 2.14 Penyaluran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi di Prov. Sulawesi Barat TA 2018 33
Tabel 2.15 Penyaluran KUR berdasarkan Wilayah di Prov. Sulawesi Barat TA 2018 34
Tabel 2.16 Penyaluran KUR per Skema di Prov. Sulawesi Barat TA.2018 34
Tabel 3.1 Profil APBD Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 36
Tabel 3.2 Jenis Pendapatan APBD di Provinsi Sulawesi Barat (dalam Rp juta) 38
Tabel 3.3 Profil APBD Berdasarkan Klasifikasi Urusan di Provinsi Sulawesi Barat 41
Tabel 3.4 Profil APBD Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat 42
Tabel 3.5 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah 2018* 44
Tabel 3.6 Perkembangan Pengelolaan Aset BLU Daerah (dalam rupiah) 45
Tabel 3.7 Perkembangan Pagu PNBP dan Pagu RM Satker BLU Daerah (dalam rupiah) ... 45
Tabel 3.8 Analisi Legal Aspek Pengelolaan BLU Daerah di Provinsi Sulawesi Barat 47
Tabel 3.9 Perkembangan Investasi Daerah di Provinsi Sulawesi Barat 48
Tabel 3.10 Perkembangan Aset BUMD di Provinsi Sulawesi Barat 48
Tabel 3.11 Realisasi APBD TA 2018 per Pemda di Provinsi Sulawesi Barat 51
Tabel 3.12 Analisis Vertikal Realisasi Pendapatan APBD 2018 di Provinsi Sulawesi Barat ... 52

Tabel 3.13 Analisis Vertikal Realisasi Belanja APBD 2018 di Provinsi Sulawesi Barat 52
Tabel 3.14 Bobot Skor Penilaian Indikator Kesehatan Keuangan Daerah per Pemda 57
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah di Sulbar 58
Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian di Prov. Sulawesi Barat 62
Tabel 4.3 Relevansi Pertumbuhan Belanja Pemerintah Terhadap Indikator Ekonomi 69
Tabel 4.4 Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap PDRB Sulawesi Barat 69
Tabel 5.1 Hasil Analisis Potensi Sektor/Subsektor Ekonomi Provinsi Sulbar 72
Tabel 5.2 Strategi Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan di Sulbar 77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Sulawesi Barat 1
Grafik 1.2 Pertumbuhan PDRB pada Komponen PKRT 2
Grafik 1.3 Perkembangan Investasi Pemerintah dan Swasta di Wilayah Sulbar 3
Grafik 1.4 Pertumbuhan PDRB pada Komponen PKP 4
Grafik 1.5 Lima Besar Komoditas Ekspor Sulbar Tahun 2018 4
Grafik 1.6 Struktur PDRB Sulbar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 5
Grafik 1.7 Perkembangan Pendapatan per Kapita (Rp juta) 6
Grafik 1.8 Perkembangan BI-7DRR, Fed Fund Rate, dan Defisit Transaksi Berjalan 7
Grafik 1.9 Perkembangan Suku Bunga Kredit Sulawesi Barat Tahun 2018 7
Grafik 1.10 Perbandingan Inflasi Year on Year (yoy) antara Sulbar dan Nasional 8
Grafik 1.11 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Mitra Ekspor Utama 9
Grafik 1.12 Perkembangan Nilai Ekspor dan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD 10
Grafik 1.13 Perkembangan Capaian IPM Tahun 2010 – 2017 11
Grafik 1.14 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Sulbar Tahun 2015 - 2018 13
Grafik 1.15 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Sulbar tahun 2015-2018 15
Grafik 1.16 Perkembangan Gini Ratio tahun 2015-2018 16
Grafik 1.17 Perkembangan CPO dan Pertumbuhan Ekonomi Sulbar Tahun 2016-2018 18
Grafik 2.1 Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN di Sulbar Tahun 2016-2018* 20
Grafik 2.2 Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Fungsi 24
Grafik 2.3 Realisasi Belanja per Sub Fungsi pada Fungsi Ekonomi Provinsi Sulbar 25
Grafik 2.5 Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2018 (dalam Rp miliar) 25
Grafik 2.4 Perkembangan Persentase Realisasi Belanja Per Jenis Belanja APBN 26
Grafik 2.6 Rasio Belanja Modal dan Rasio Belanja Pegawai di Sulbar 26
Grafik 2.7 Perbandingan Pagu Belanja Sektor Produktif dan Konsumtif 27
Grafik 2.8 Tren Rasio Belanja APBN terhadap Populasi di Sulbar 27
Grafik 2.9 Belanja Pemerintah Pusat dan PDRB di Sulbar 28
Grafik 2.10 Belanja Wajib dan Belanja Tidak Wajib di Sulbar Tahun 2018 30
Grafik 2.11 Penyaluran KUR Menurut Skema di Sulbar 35
Grafik 3.1 Proporsi Target Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan 37
Grafik 3.2 Tren Kenaikan Alokasi Belanja Operasi 37
Grafik 3.3 Rasio PAD terhadap PDRB Sulbar 38
Grafik 3.4 Rasio Kemandirian Daerah Sulbar 39

Grafik 3.5 Rasio Kemandirian Daerah Sulbar per Kabupaten 39
Grafik 3.6 Realisasi Jenis PAD per Pemda Tahun 2018 40
Grafik 3.7 Proporsi Realisasi Belanja Modal 43
Grafik 3.8 Proporsi Pengunaan Dana Perimbangan (Miliar Rupiah) 43
Grafik 3.9 Tren Jumlah Kunjungan Pasien RSUD Polewali Mandar (per hari) 45
Grafik 3.10 Rasio Surplus/Defisit Terhadap Pendapatan 49
Grafik 3.11 Rasio Surplus/Defisit Terhadap Dana Transfer Smt I 49
Grafik 3.12 Rasio SiLPA Terhadap Alokasi Belanja 50
Grafik 3.13 Rasio Keseimbangan Primer 2018 50
Grafik 3.14 Porsi Pendapatan dan Belanja Daerah di Sulbar Tahun 2018 51
Grafik 3.15 Rasio PAD per Pemda di Sulbar Tahun 2018 53
Grafik 3.16 Rasio Efektivitas PAD per Pemda 2018 54
Grafik 3.17 Rasio Pertumbuhan PAD per Pemda Tahun 2018 54
Grafik 3.18 Rasio Belanja Modal per Pemda 2018 54
Grafik 3.19 Rasio Pegawai Modal per Pemda 2018 55
Grafik 3.20 Penyerapan Anggaran per Pemda 2018 55
Grafik 3.21 Rasio Ruang Fiskal per Pemda 2018 55
Grafik 3.22 Rasio Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan per Pemda 2018 56
Grafik 3.23 Rasio SiLPA per Pemda 2018 56
Grafik 4.1 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian di Sulbar 59
Grafik 4.2 Perbandingan Komponen Pendapatan Konsolidasian Sulbar 59
Grafik 4.3 Komposisi Pendapatan Pajak dan Bukan Pajak Konsolidasian Sulbar 59
Grafik 4.4 Perbandingan Komposisi Penerimaan Perpajakan dan PDRB di Sulbar 60
Grafik 4.5 Tax Ratio Konsolidasian per Kabupaten di Prov. Sulawesi Barat Tahun 2018 61
Grafik 4.6 Rasio Pajak per Kapita setiap Kabupaten Lingkup Sulbar Tahun 2018 62
Grafik 4.7 Perbandingan Proporsi Belanja Konsolidasian di Sulbar 63
Grafik 4.8 Perbandingan Belanja Konsolidasian per Jenis Belanja di Sulbar 63
Grafik 4.9 Perbandingan Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja Konsolidasian 64
Grafik 4.10 Rasio Belanja Konsolidasian Provinsi Sulawesi Barat 64
Grafik 4.11 Rasio Belanja Konsolidasian Sulbar per Kapita Tahun 2017-2018 65
Grafik 4.12 Rasio Belanja Pendidikan per Kapita Lingkup Sulbar Tahun 2018 65
Grafik 5.1 Scatter Plot Tipologi Klassen Sektor Potensial Sulbar Tahun 2013 - 2018 72
Grafik 5.2 Perkembangan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan .. 73
Grafik 5.3 Perkembangan Jumlah PNS dan Kontribusi PDRB Adm. Pemerintahan 74
Grafik 5.4 Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan di Sulbar 2016-2018 75

Grafik 5.5 Prevalensi Stunting di Sulbar Tahun 2017 76
Grafik 5.6 Perbandingan Produktivitas Komoditas Pertanian Sulbar dan Nasional 77
Grafik 5.7 Perbandingan Kontribusi dan Laju PDRB Sektor Perikanan Sulbar dan Nasional 78
Grafik 5.8 Kontribusi CPO terhadap Ekspor Sulbar Tahun 2018 79
Grafik 5.9 Perkembangan Persentase Penyerapan Belanja APBN dan APBD di Sulbar 80
Grafik 5.10 Perkembangan Penyerapan Belanja APBN di Sulbar per Bulan Tahun 2018..... 81
Grafik 5.11 Proporsi Revisi Perubahan Pagu Belanja APBN di Sulbar Tahun 2018..... 82
Grafik 5.12 Perbandingan Kontribusi PDRB dan Pajak Sektoral di Sulbar Tahun 2018..... 83
Grafik 5.13 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur di Sulbar..... 85
Grafik 6.1 Relevansi Perkembangan Realisasi Dana Desa dan Gini Ratio Desa di Sulbar .. 87
Grafik 6.2 Relevansi Perkembangan Realisasi Dana Desa dan Kemiskinan Warga Desa ... 87
Grafik 6.3 Relevansi Perkembangan Realisasi Dana Desa dan Gini Ratio Perdesaan 87
Grafik 6.4 Perkembangan Jumlah Desa Berdasarkan Kategori IPD di Sulbar 88
Grafik 6.5 Persentase Waktu Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD di Sulbar 90
Grafik 6.6 Perbandingan Rasio Pendamping Desa di Sulbar dan Nasional Tahun 2018..... 91
Grafik 6.7 Persentase Jumlah BUMDES per Kabupaten di Sulbar Tahun 2018..... 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Alur Analisis Sektor/Sub Sektor Ekonomi Unggulan di Sulbar 71
Gambar 5.2 Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Sektoral di Sulbar Tahun 2018 73
Gambar 5.3 Luas Panen Tanaman Pangan di Sulbar Tahun 2017 76
Gambar 5.4 Sebaran Profesi Subsektor Perikanan di Sulbar Tahun 2018 78
Gambar 5.5 Persentase Perubahan Realisasi Belanja Infrastruktur dan Pegawai 84
Gambar 6.1 Capaian Output Penggunaan Dana Desa di Sulbar Tahun 2017-2018 88

EXECUTIVE SUMMARY

Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Sulbar

Struktur APBN Sulbar 2018

Sektor Unggulan dan Tantangan Fiskal Sulbar 2018

STRUKTUR KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SULBAR

HASIL ANALISIS LQ, MRP, DAN SS-EM (METODE OVERLAY)

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Pertanian, Peternakan Perburuan dan Jasa Pertanian
- Industri Makanan dan Minuman

TANTANGAN FISKAL REGIONAL

URGENSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI SULBAR

Struktur APBD Sulbar 2018

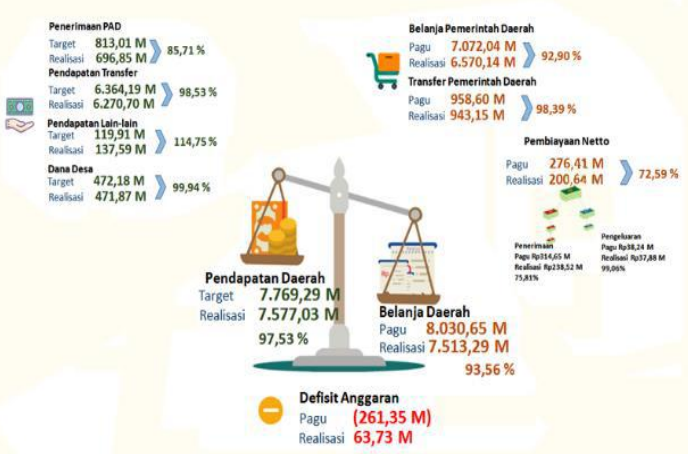

Analisis Tematik (Dana Desa Sulbar 2018)

Pembangunan Desa : Rp397,60 M / 84,26%

Pemberdayaan Masy. Desa : Rp46,99 M / 9,96%

Pembinaan Kemasy. Desa : Rp21,14 M / 4,48%

Pemerintahan Desa : Rp6,13 M / 1,30%

Konsolidasian Keuangan Sulbar 2018

Uraian	2018		
	Pusat	Daerah	Konsolidasi
Pendapatan Negara	**680,87**	**7.405,34**	**1.519,45**
Pendapatan Perpajakan	618,68	347,31	965,99
Pendapatan Bukan Pajak	62,19	393,25	455,44
Hibah	-	93,88	93,88
Transfer*	-	6.570,90	4,14
Belanja Negara	**10.034,36**	**7.341,62**	**10.809,22**
Belanja Pemerintah	3.467,60	6.570,63	10.038,23
Transfer*	6.566,76	770,99	770,99
Surplus/(Defisit)	**(9.353,49)**	**63,72**	**(9.289,77)**
Pembiayaan	**-**	**200,65**	**200,65**
Penerimaan Pembiayaan	-	238,53	238,53
Peng. Pembiayaan	-	37,88	37,88
SiLPA	**(9.353,49)**	**264,37**	**(9.089,12)**

EXECUTIVE SUMMARY

Perekonomian Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 6,23% (*yoy*), melambat 44 basis poin dibandingkan tahun 2017. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,17 persen (*yoy*). Melambatnya pertumbuhan ekonomi Sulbar tersebut dipengaruhi antara lain oleh pelemahan harga *Crude Palm Oil (CPO)*, komoditas ekspor sektor unggulan di Sulbar. Dari sisi permintaan, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (50,89 persen) menjadi penopang utama laju perekonomian Sulbar.

Sementara dari sisi penawaran, perekonomian Sulbar masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 42 persen. Pendapatan per kapita Sulbar tahun 2018 mencapai Rp32,12 juta, meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun tren peningkatan ini masih dibawah tren peningkatan pendapatan perkapita nasional dalam empat tahun terakhir sehingga mengakibatkan *gab* yang makin lebar dan hal ini menjadi tantangan pemda Sulbar. Selanjutnya, inflasi Sulbar tahun 2018 tercatat 1,80 persen, terendah sejak tahun 2007. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulbar dalam mengendalikan volatilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

IPM Sulbar terus mengalami peningkatan. Di tahun 2017 IPM Sulbar tercatat sebesar 64,30 (target RPJMD 64,80). Terdapat *gap* cukup besar dengan IPM nasional yang tercatat sebesar 70,81. Capaian IPM Sulbar tahun 2018 diprediksi meningkat seiring ekspansi belanja pemerintah pada fungsi Pendidikan. Sementara itu, tingkat Kemiskinan Sulbar periode September 2018 tercatat 11,22 persen, meningkat 4 basis poin dibandingkan tahun 2017 (target RPMJD 10,19 persen). Secara absolut, jumlah penduduk miskin Sulbar bertambah sebanyak 3,36 ribu jiwa (*yoy*) di periode September 2018. Kabupaten Polewali Mandar memiliki tingkat kemiskinan tertinggi (16,05 persen), selaras dengan capaian IPM yang paling rendah di Sulbar.

Tantangan perekonomian Sulbar semakin besar dengan peningkatan *Gini Ratio* sebesar 7,9 persen (*yoy*) di tahun 2018. Tren peningkatan angka kemiskinan di Sulbar tidak diikuti oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tercatat mengalami penurunan sebesar 5 basis poin menjadi 3,16 persen di tahun 2018 (target RPJMD 2,96 persen). Pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah mendominasi sebesar 53 persen terhadap total angkatan kerja di Sulbar. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa penurunan TPT tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Sulbar.

Pendapatan Pemerintah Pusat di Sulbar tahun 2018 dari sektor Perpajakan dan PNBP tumbuh masing-masing sebesar 5,86 persen (*yoy)* dan 14,17 persen (*yoy*). Dari total penerimaan perpajakan sebesar Rp618,68 miliar, kontribusi terbesar bersumber dari PPN (48,93 persen) dan PPh (46,65 persen). *Tax ratio* di Sulbar mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir yakni dari 1,87 persen di tahun 2016 menjadi 1,42 persen di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulbar belum optimal dalam mendorong realisasi penerimaan pajak. Sementara itu, realisasi penerimaan PNBP mencapai Rp62,19 miliar rupiah atau 209,12 persen dari target yang telah ditetapkan. Kinerja postitif tersebut menunjukkan urgensi rasionalisasi target penerimaan PNBP di Sulbar pada tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, total realisasi belanja negara di Sulbar tahun 2018 mencapai Rp10,03 triliun dengan serapan pagu sebesar 97,91 persen. Hampir seluruh jenis belanja pemerintah pusat di Sulbar mengalami peningkatan kinerja penyerapan, kecuali Belanja Modal yang mengalami penurunan kinerja sebesar 2,66 persen (*yoy*). Hal tersebut berkaitan dengan adanya sisa tender belanja modal jaringan dan hambatan pembebasan lahan pembangunan bendungan.

Secara umum, kenaikan pendapatan negara sebesar 6,57 persen (*yoy*) belum mampu mengimbangi kenaikan belanja negara sebesar 3,74 persen (*yoy*) sehingga defisit anggaran pemerintah pusat di Sulbar tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,54 persen (*yoy*). Sementara itu, Realisasi Penyaluran Kredit Program di Sulbar pada tahun 2018, mencapai Rp823,57 miliar. Penyaluran KUR dan UMi berkontribusi masing-masing sebesar Rp819,10 miliar dan Rp4,47 miliar. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran KUR dengan kontribusi sebesar 46,67 persen.

Dari sisi pelaksanaan APBD, target pendapatan daerah di Sulbar tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,78 persen (*yoy*) sehubungan dengan berkurangnya alokasi transfer DAK Fisik sebesar Rp129,4 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp19,2 miliar. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan 0,67 persen (*yoy*) sehubungan dengan berkurangnya realisasi PAD dan Dana Perimbangan masing-masing 13,49 persen dan 16,37 persen. Proporsi realisasi PAD (9,20 persen) menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah di Sulbar kepada penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Jika dikaitkan dengan komponen penyumbang, pajak daerah menjadi kontributor terbesar PAD di Sulbar dengan sumbangan sebesar 49,84 persen.

Di sisi lain, realisasi Belanja Daerah di Sulbar pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,69 persen (*yoy*) yang berkaitan dengan penurunan realisasi belanja modal daerah sebesar 16,08 persen (*yoy*). Defisit pagu APBD Sulbar di tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp261,35 miliar, namun ternyata sampai dengan akhir tahun 2018, APBD Sulbar justru surplus sebesar Rp63,73 miliar. Hal ini didorong oleh turunnya kinerja penyerapan belanja daerah.

Berdasarkan analisis proporsi dan perbandingan, Pendapatan Konsolidasian Sulbar di tahun 2018 menyusut 5,67 persen (*yoy*) sejalan dengan kondisi perekonomian Sulbar yang sedang mengalami perlambatan. *Tax Ratio* Konsolidasian Sulbar pada tahun 2018 sebesar 3,10% atau berkurang 7 basis poin dari tahun sebelumnya. Tren tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan aktivitas perekonomian Sulbar belum belum dapat mengungkit penerimaan Pendapatan Perpajakan.

Di sisi lain, Belanja Konsolidasian Sulbar tumbuh sebesar 2,24 persen (*yoy*) yang didominasi oleh Belanja Pemerintah Daerah. Dominasi realisasi Belanja Operasional di Sulbar semakin melebar (68,02 persen). Hal tersebut memperkecil rasio Belanja Produktif yang tercermin pada penurunan rasio Belanja Modal dari 29,59 persen di tahun 2017 menjadi 24,81 persen di tahun 2018.

Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah memberikan dampak kepada perbaikan indikator ekonomi di Sulbar. Realisasi Belanja Konsolidasian Sulbar pada Fungsi Kesehatan tumbuh 3,25 persen mendorong pertumbuhan pada fasilitas dan tenaga kesehatan. Selain itu, realiasi penerimaan Dana Desa sebesar Rp1,48 triliun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berhasil mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Desa di Sulbar. Secara agregat, Belanja Pemerintah berpengaruh 43,2% terhadap PDRB Sulbar. Setiap penambahan Rp1 miliar Belanja Pemerintah akan menambah PBRB Sulbar sebesar Rp0,336 miliar.

Hasil analisis *Overlay* (gabungan dari analisis LQ, MRP, dan *Shift-Share* EM), Sulbar menunjukkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sulbar masih menjadi sektor paling unggul di Sulbar. Sektor tersebut menyumbang 42,12 persen terhadap total PDRB di Sulbar pada tahun 2018 dan mampu menyerap 47,2 persen dari total 647 ribu tenaga kerja di Sulbar. Ketergantungan perekonomian Sulbar terhadap sektor tersebut perlu dikurangi mengingat sektor Pertanian sangat rentan terhadap volatilitas harga di pasaran. Pemerintah daerah di Sulbar perlu mengembangkan industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi sektor pertanian terhadap perekonomian Sulbar.

Di tahun 2018, terdapat beberapa tantangan fiskal di Sulbar yang perlu diantisipasi. Pola penyerapan anggaran pemerintah di Sulbar cenderung menumpuk di akhir tahun. Pada triwulan IV tahun 2018, belanja APBN dan APBD di Sulbar masing-masing terealisasi sebesar 41 persen dan 39 persen. Hal ini berimbas kepada kurang optimalnya manfaat dan efek stimulus belanja pemerintah terhadap perekonomian di Sulbar.

Optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi unggulan. Realisasi penerimaan pajak sebesar 3,78 persen dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbanding terbalik dengan kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB ahun 2018 sebesar 38,95 persen. Pemerintah dapat mengambil peran dengan mendorong pertumbuhan industri pengolahan produk sektor pertanian yang dapat meningkatkan penerimaan PPN dan PPh. Selanjutnya efisiensi belanja pegawai dan belanja barang perlu dilakukan dalam rangka memperluas ruang fiskal guna meningkatkan realisasi belanja infrastruktur yang tumbuh negatif sebesar 14,66 persen di tahun 2018.

Sejak digulirkan pertama kali pada tahun 2015, Dana Desa telah berkontribusi dalam memperbaiki kondisi perekonomian di Sulbar khususnya di perdesaan. Tren peningkatan realisasi Dana Desa diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan di Sulbar dari 130,7 ribu orang di tahun 2015 menjadi 121,3 ribu orang di tahun 2018. Selain itu, indeks ketimpangan (*Gini Ratio*) perdesaan juga mengalami penurunan dari 0,339 pada September 2015 menjadi 0,311 pada September 2018. Hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilakukan oleh BPS Sulbar menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Desa (IPD) mengalami peningkatan khususnya Kondisi Infrastruktur. Hal tersebut selaras dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk Program Pembangunan Fisik Desa sebesar 70 persen.

Dibalik capaian tersebut, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Dana Desa di Sulbar. Pada tahun 2018, secara umum penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa di Sulbar melampaui batasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Keterlambatan penerimaan dana desa tersebut dapat mengurangi efektivitas Dana Desa dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Sulbar. Keterlambatan berkaitan dengan keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam menatausahakan Dana Desa. Optimalisasi peran BUMDES perlu ditingkatkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan sumber pendapatan asli desa. Dengan demikian, desa dapat menjadi lebih mandiri dan maju serta menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Provinsi Sulbar.

BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

PERTUMBUHAN EKONOMI

Target RPJMD Prov.Sulbar 2018	7,1%-7,4%
Capaian Sulbar 2018	6.23%
Capaian Sulbar 2017	6.62%
Capaian Nasional 2018	5.17%

INFLASI

Target RPJMD Prov.Sulbar 2018	3.23%
Capaian Sulbar 2018	1.80%
Capaian Sulbar 2017	3.79%
Capaian Nasional 2018	3.13%

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Target RPJMD Prov.Sulbar 2018	66.62
Capaian Sulbar 2018	N/A*
Capaian Sulbar 2017	64.30
Capaian Nasional 2017	70.81

TINGKAT KEMISKINAN

Target RPJMD Prov.Sulbar 2018	10.19%
Capaian Sulbar 2018	11.22%
Capaian Sulbar 2017	11.18%
Capaian Nasional 2018	9.66%

GINI RATIO

Target RPJMD Prov.Sulbar 2018	0.350
Capaian Sulbar 2018	0.366
Capaian Sulbar 2017	0.339
Capaian Nasional 2018	0.384

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Target RPJMD Prov.Sulbar 2018	2.96%
Capaian Sulbar 2018	3.16%
Capaian Sulbar 2017	3.21%
Capaian Nasional 2018	5.34%

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI SULBAR 2018

BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

PDRB Sulbar tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 6,23%, melambat dibandingkan tahun 2017

Pada tahun 2018, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sulawesi Barat (Sulbar) mencapai Rp43,55 triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp31,18 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 6,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,17 persen. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan target pemerintah Sulbar dalam RPJMD 2017-2022 Sulbar yang diharapkan tumbuh pada rentang 7,1-7,4 persen, maka target kinerja perekonomian Sulbar tersebut belum terpenuhi.

Melesetnya laju pertumbuhan PDRB Sulbar dari target antara lain berkorelasi dengan harga *Crude Palm Oil (CPO)* yang lebih rendah dibandingkan harga asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Provinsi Sulbar. Untuk diketahui, CPO merupakan hasil perkebunan yang diunggulkan di wilayah Sulbar dan menjadi komoditas utama ekspor. Walaupun ekspor CPO Sulbar tumbuh 12 persen (yoy), namun rendahnya harga CPO di tingkat dunia menyebabkan nilai nominal rupiah hasil ekspor yang diterima juga menjadi lebih rendah dibandingkan dengan nilai jika menggunakan asumsi harga normal.

Selain itu, dampak dari masih belum membaiknya harga CPO adalah perusahaan pengolah CPO lebih memilih untuk mengolah kelapa sawit hasil perkebunannya sendiri dan cenderung menahan untuk membeli kelapa sawit dari para petani setempat. Akibatnya, pertumbuhan sektor industri pengolahan juga turut melambat dari 9,59 persen di tahun 2017 menjadi 7,41 persen pada tahun 2018.

Grafik 1.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Sulawesi Barat (c to c) Tahun 2015-2018

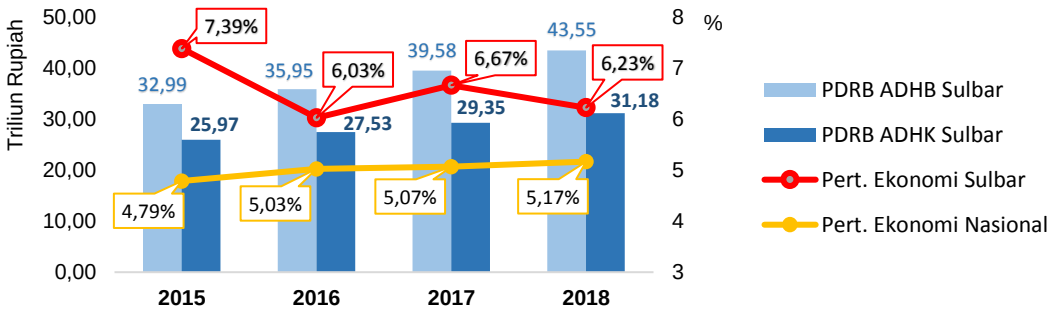

Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2019 (diolah)

Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018, pertumbuhan PDRB Sulbar selalu berada di atas pertumbuhan PDB Nasional. Hal tersebut terkait dengan skala ekonomi Sulbar yang lebih kecil. Tren pertumbuhan Sulbar cenderung fluktuatif, berbeda dengan tren pertumbuhan nasional yang secara konsisten mengalami peningkatan. Sementara itu, pada skala regional di kawasan Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), pertumbuhan ekonomi Sulbar tahun 2018 menempati posisi ke delapan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Maluku Utara yang melaju 7,92 persen.

Dalam 4 tahun terakhir, pertumbuhan PDRB Sulbar selalu berada di atas pertumbuhan PDB Nasional.

Grafik 1.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan per Triwulan PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Barat dan Laju Pertumbuhan PDB Nasional Tahun 2017-2018 (*yoy*)

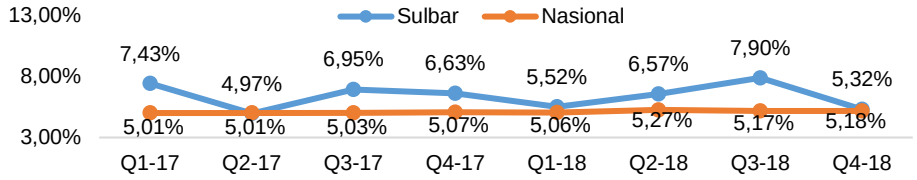

Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2019

1.1.1.2 Nominal PDRB

1.1.1.2.1 PDRB Sisi Permintaan

Berdasarkan perhitungan ADHB, PDRB Sulbar tahun 2018 sebesar Rp43,54 triliun. Jika diukur dari PDRB tersebut, maka perekonomian Sulbar hanya menyumbang 0,29 persen terhadap perekonomian (PDB) Nasional yang sebesar Rp14.837,4 triliun.

PDRB ADHB Sulbar Tahun 2018 sebesar Rp43,54 triliun

Tabel 1.1 Nilai PDRB ADHB Sulawesi Barat per Komponen Pengeluaran Tahun 2018

No.	Komponen PDRB (Sisi Permintaan)	PDRB Th 2018 (Rp miliar)					Kontribusi thdp PDRB
		Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	
1	Konsumsi RT	5.266	5.476	5.461	5.957	22.160	50,89%
2	Konsumsi LNPRT	74	78	81	84	317	0,73%
3	Konsumsi Pemerintah	972	1.754	2.572	3.139	8.437	19,38%
4	PMTB	3.037	3.266	3.457	3.318	13.078	30,03%
5	Perubahan Inventori	32	40	(40)	(111)	(79)	-0,18%
6	Ekspor Barang dan Jasa	5.212	5.646	5.672	3.538	20.068	46,09%
7	Impor Barang dan Jasa	4.613	5.567	5.824	4.432	20.436	46,93%
	Total PDRB ADHB	**9.980**	**10.693**	**11.379**	**11.493**	**43.545**	**100,00%**

Sumber: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

a. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga merupakan kontributor terbesar (51%) terhadap PDRB Sulbar

Grafik 1.2 Pertumbuhan PDRB pada Komponen PKRT

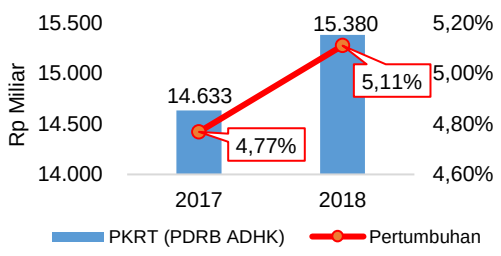

Sumber: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Dari sisi permintaan, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) menjadi penopang utama PDRB Sulbar. Artinya, aktivitas perekonomian Sulbar masih didorong oleh permintaan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, komponen ini

tumbuh 34 basis poin menjadi 5,11 persen (yoy). Dalam perkembangannya selama tahun 2018, komponen PKRT mengalami ekspansi pada kuartal kedua dan puncaknya pada kuartal keempat.

Hal tersebut berhubungan dengan tingginya konsumsi RT menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Juni, yang juga didukung oleh pencairan Tunjangan Hari Raya di bulan April-Juni. Kemudian pada kuartal keempat juga terjadi perayaan Hari Maulid Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* yang jatuh pada November serta Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang juga bersamaan dengan periode libur sekolah. Pada kesempatan tersebut, PKRT meningkat dan banyak digunakan untuk keperluan makanan, belanja pakaian dan akomodasi transportasi.

b. Investasi

Komponen PMTB berkontribusi sebesar 30% terhadap PDRB Sulbar, lebih didorong oleh investasi dari sektor swasta.

Komponen Investasi menjadi kontributor terbesar ketiga setelah PKRT dan Ekspor, menyumbang 30 persen dari PDRB Sulbar. Dalam pengklasifikasian komponen pengeluaran menurut BPS, investasi disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menghitung investasi sebagai penjumlahan antara investasi swasta dan investasi pemerintah yang berupa Belanja Modal dan Infrastruktur.

Grafik 1.3 Perkembangan Investasi Pemerintah dan Swasta di Wilayah Sulbar Tahun 2017-2018

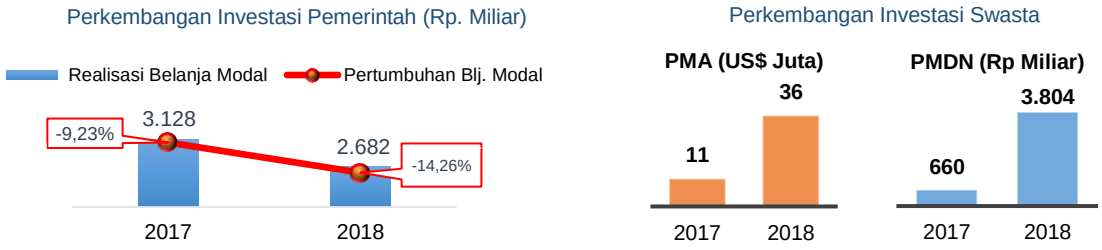

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; http://nswi.bkpm.go.id, *diakses tanggal 12 Februari 2019 (diolah)*

Dari sisi investasi pemerintah, belanja modal paling tinggi terealisasi pada kuartal keempat, namun data dari website Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan aktivitas investasi swasta pada kuartal terakhir mengalami kontraksi. Hal tersebut menyebabkan kontribusi PMTB secara keseluruhan juga menurun setelah mencapai puncaknya pada kuartal ketiga. Memperhatikan data perkembangan investasi, maka pertumbuhan komponen PMTB sebesar 6,34 persen (yoy) lebih didorong oleh pertumbuhan investasi dari sektor swasta.

porsi kontribusi PMTB terhadap PDRB Sulbar pada tahun 2018 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 30,80 persen.

Walaupun secara keseluruhan komponen PMTB pada tahun 2018 tumbuh, namun porsi kontribusi PMTB terhadap PDRB Sulbar pada tahun 2018 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 30,80 persen. Hal tersebut berkorelasi dengan alokasi Belanja Modal pemerintah yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain nilai alokasi anggaran, dari sisi kinerja penyerapan anggarannya pun turut menurun.

Tingkat realisasi anggaran belanja modal pemerintah pusat yang hanya terserap 94,04 persen, sementara tahun sebelumnya mencapai 96,61 persen. Bahkan anggaran belanja modal pemda hanya terserap 88,69 persen yang sebelumnya dapat terealisasi hingga 91,07 persen. Artinya, terdapat potensi capaian PDRB yang lebih besar seandainya anggaran belanja modal pemerintah terserap secara optimal.

c. Pengeluaran Pemerintah

Grafik 1.4 Pertumbuhan PDRB pada Komponen PKP

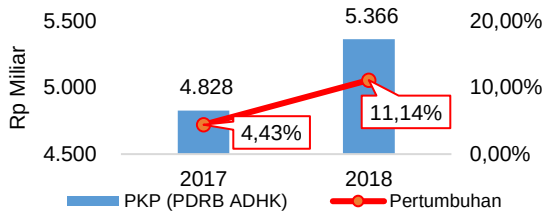

Sumber: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) berupa belanja operasional (di luar belanja modal yang telah diperhitungkan pada komponen PMTB/Investasi) berkontribusi sebesar 19,38 persen, meningkat dibandingkan kontribusi tahun sebelumnya sebesar 18,69 persen.

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah meningkat dari tahun sebelumnya, seiring dengan Ekspansi Belanja Operasional

Ekspansi yang terjadi pada komponen PKP ini pada saat yang sama telah mengurangi besarnya kontribusi pada semua komponen pengeluaran lainnya dalam struktur PDRB Sulbar. Sejalan dengan tren pada komponen PKRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga mencapai puncaknya pada kuartal keempat. Meskipun terjadi penurunan tingkat penyerapan anggaran pada kelompok belanja modal, namun kelompok Belanja Operasional pemerintah meningkat sebesar 10,48 persen dari Rp6,65 triliun di tahun 2017 menjadi Rp7,35 triliun pada tahun 2018.

d. Ekspor dan Impor

Grafik 1.5 Lima Besar Komoditas Ekspor Sulbar Tahun 2018

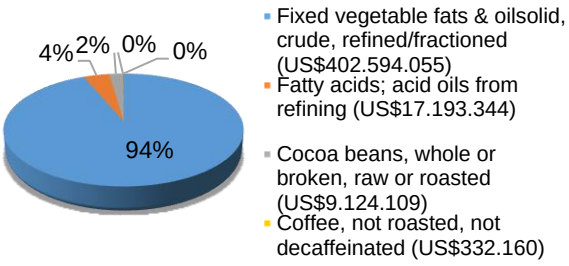

Sumber: BI, 2019 (diolah)

Nilai ekspor barang dan jasa Sulbar selama tahun 2018 menyumbang 46,09 persen terhadap PDRB. Kontribusi komponen ini berkurang dibandingkan tahun 2017 (51,55 persen) seiring dengan melemahnya harga CPO di tingkat dunia.

Potensi kontribusi Ekspor tertahan oleh penurunan harga *CPO* dan oleh tingginya kebutuhan Impor, sehingga net ekspor mengalami defisit

Pemerintah perlu mendorong peningkatan komoditas lain sebagai alternatif ekspor untuk mengantisipasi fluktuasi harga global pada satu jenis komoditas. Misalnya, hasil perkebunan kakao yang juga pernah menjadi komoditas andalan di Sulbar, dan saat ini menjadi komoditas dengan nilai ekspor terbesar ketiga. Selain bantuan selama proses tanam hingga panen (misalnya bantuan bibit dan pupuk), para petani kakao juga perlu didukung pemerintah dengan penyediaan mesin pengolahan kakao, agar dapat

memberi nilai tambah yang lebih tinggi, bukan diekspor dalam bentuk komoditas bahan mentah.

Program yang serupa dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan maupun PNPM Mandiri Agribisnis perlu kembali digalakkan untuk memantik aktivitas perekonomian, terutama untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Sementara itu, di sisi lain permintaan Impor di wilayah Sulbar sebesar 46,93 persen. Walaupun sama halnya dengan Ekspor yang mengalami kontraksi dibanding tahun sebelumnya, tetapi nilai Impor masih tetap lebih tinggi dibandingkan nilai Ekspor. Akibatnya, Net Ekspor Sulbar masih bernilai minus/defisit dan berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi.

1.1.1.2.2 PDRB sisi penawaran

Dari sisi produksi, PDRB Sulbar paling banyak disumbang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yakni sebesar 42%

Dari sisi produksi/penawaran, semua sektor/lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Perekonomian Sulbar masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pada tahun 2018, sektor ini menyumbang hingga Rp18 triliun dari total Rp43,5 triliun PDRB ADHB Sulbar. Mengingat besarnya kontribusi sektor ini, maka potensi peningkatan PDRB Sulbar paling besar juga berasal dari sektor Pertanian. Intervensi pemerintah masih sangat diperlukan menyusul kebijakan-kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan melalui berbagai program bantuan. Agar daya ungkit sektor pertanian terhadap PDRB menjadi lebih besar, maka intervensi pemerintah perlu diarahkan pada proses pengolahan hasil pertanian/perkebunan untuk memberi nilai tambah yang lebih besar. Dukungan dimaksud meliputi pengadaan mesin/peralatan pengolahan dan kegiatan pendampingan.

Grafik 1.6 Struktur PDRB Sulbar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

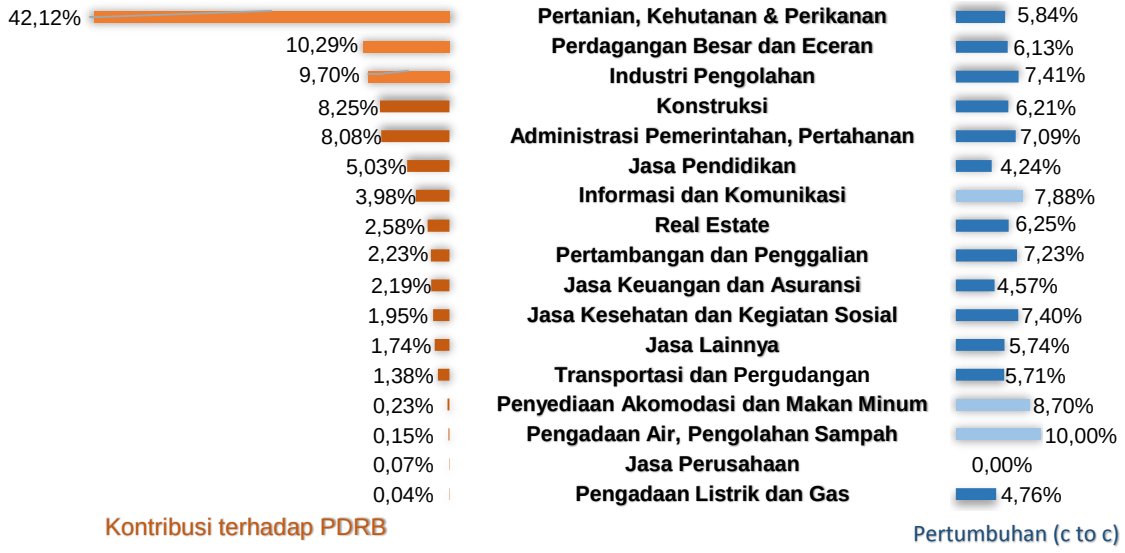

Sumber: BPS Sulbar, 2019

Selain kelapa sawit, pemerintah Sulbar juga perlu memberi perhatian lebih terhadap produksi beras untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Fenomena banyaknya distribusi gabah keluar Sulbar dan kembali masuk dalam bentuk beras perlu diintervensi untuk menjaga stabilitas harga. Pada masa panen, produksi gabah tidak mampu ditampung oleh kemampuan/kapasitas penggilingan padi yang ada di Sulbar. Akibatnya, kondisi dimaksud menjadi peluang bagi pengusaha dari luar Sulbar untuk membeli gabah dengan harga yang relatif rendah. Oleh karena itu, bentuk penyertaan modal pemerintah daerah melalui BUMD untuk menyediakan mesin penggilingan padi dan mesin *dryer* akan meningkatkan kapasitas produksi penggilingan gabah menjadi beras.

Dari sisi petani akan terbantu dengan terjaganya harga gabah, sementara dari sisi masyarakat akan terbantu dengan harga beras yang tentu akan relatif lebih murah karena biaya produksinya tidak lagi menanggung biaya transportasi seperti saat gabah dimaksud digiling di luar daerah Sulbar. Dengan upaya tersebut, diharapkan pula Garis Kemiskinan lebih terjaga mengingat Beras merupakan kontributor utama terhadap Garis Kemiskinan Makanan yang ada di Sulbar.

Pada sisi lain, jika dibandingkan dengan tahun 2017 (c to c), sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah tumbuh paling tinggi, yakni 10 persen. Walaupun demikian, jika dilihat *share*-nya terhadap PDRB Sulbar maka sektor ini hanya menyumbang 0,15 persen. Oleh karena itu, pertumbuhan yang cukup besar tersebut kurang berdampak terhadap peningkatan PDRB Sulbar secara keseluruhan.

1.1.1.3 PDRB per Kapita

PDRB per kapita Sulbar tahun 2018 adalah Rp32,12 juta

Pada tahun 2018, rata-rata pendapatan setiap orang di wilayah Sulbar selama satu tahun sebesar Rp32,12 juta. Dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018), pendapatan per kapita Sulbar menunjukkan tren menanjak, akan tetapi pada saat yang sama juga memperlihatkan gap yang semakin besar dari progres pendapatan per kapita nasional yang pada tahun 2018 mencapai Rp56 juta.

Grafik 1.7 Perkembangan Pendapatan per Kapita (Rp juta)

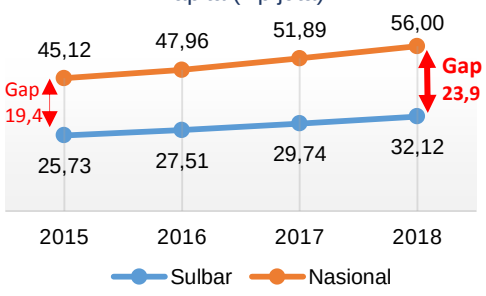

Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2019 (diolah)

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertambahan jumlah penduduk Sulbar yang terus mengalami peningkatan belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari nilai yang dihasilkan sekarang. Pertambahan PDRB turut diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Hal tersebut menandakan bahwa distribusi pendapatan di wilayah Sulbar masih belum merata.

1.1.2 Suku Bunga

Kebijakan menaikkan suku bunga acua BI 7-DRR menjadi 6% (Desember 2018) direspons dengan hati-hati oleh perbankan di lingkup Sulbar

Kebijakan penguatan operasi moneter Bank Indonesia (BI) melalui instrumen BI 7-*Day (Reverse) Repo Rate* (BI 7-DRR) menunjukkan tren yang berbeda di tahun 2018. Pada tahun sebelumnya, BI melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan memangkas BI 7-DRR sebanyak 50 basis poin dari 4,75 per Januari 2017 menjadi 4,25 persen per Desember 2017. Hal tersebut bertujuan untuk terus mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik di tengah stabilitas makroekonomi domestik yang semakin baik (Bank Indonesia, 2018).

Grafik 1.8 Perkembangan BI-7DRR, *Fed Fund Rate*, dan Defisit Transaksi Berjalan

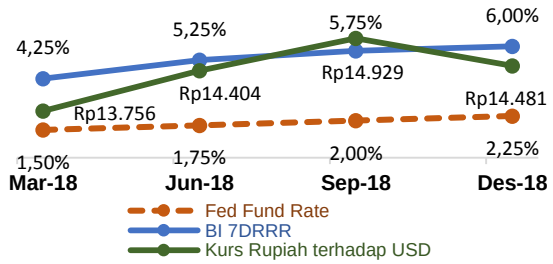

Sumber: BI, 2019 (diolah)

Kontras, di tahun 2018 BI menaikkan BI 7-DRR sebanyak 175 basis poin dari 4,25 persen per Januari 2018 menjadi 6 persen per Desember 2018. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global dan kenaikan suku bunga AS.

Kenaikan BI 7-DRR membuat pasar keuangan domestik terlihat menarik dan mendorong investor asing untuk menanamkan modal. Aliran modal asing tersebut pada gilirannya akan mendorong penguatan nilai tukar Rupiah. Penguatan nilai tukar tersebut perlu diupayakan guna menstabilkan neraca perdagangan di tengah tingginya arus impor khususnya komoditas nonmigas. Kebijakan moneter tersebut terbukti efektif untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan tahun 2018 pada level USD31,1 miliar atau 2,98 persen dari PDB. Nilai tersebut masih berada di bawah batas aman defisit neraca berjalan yakni 3 persen dari PDB.

Grafik 1.9 Perkembangan Suku Bunga Kredit Sulawesi Barat Tahun 2018

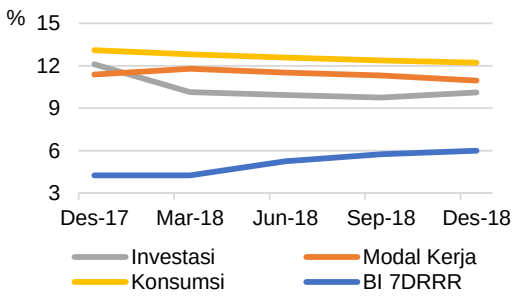

Sumber: BI, 2019 (diolah)

Sementara itu, kenaikan suku bunga acuan BI tersebut belum direspon cepat oleh sektor perbankan di lingkup regional Sulbar. Perkembangan suku bunga kredit cenderung stagnan sepanjang tahun 2018. Hanya suku bunga Kredit Investasi yang naik sebesar 58 basis poin pada Desember 2018, linear dengan kenaikan BI 7-DRR.

Kebijakan perbankan untuk tidak secara spontan mengikuti kenaikan BI-7DRR menjadi hal positif bagi industri perbankan dan sektor riil. Suku bunga kredit yang

dipertahankan stabil pada level aman mengindikasikan sikap kehati-hatian pihak perbankan dalam mengantisipasi terjadinya potensi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang menjadi ancaman terbesar bagi industri perbankan.

Selain itu, kenaikan suku bunga kredit perbankan berpeluang menghambat aliran modal ke sektor riil yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika perbankan turut menaikkan bunga simpanan, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat konsumsi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

1.1.3 Inflasi

Inflasi Sulbar tahun 2018 tercatat 1,80%, inflasi terendah sejak tahun 2007

Tekanan inflasi Sulbar yang direpresentasikan oleh Inflasi Mamuju pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,80 persen (*yoy*), jauh lebih terkendali dibandingkan tahun 2017. Inflasi tahun 2018 ini adalah inflasi terendah yang pernah dicapai Mamuju sejak pertama kali dilaksanakannya perhitungan inflasi pada tahun 2007. Rendahnya inflasi Sulbar tersebut menunjukkan kinerja yang baik dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menekan dan mengendalikan volatilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Tingkat inflasi Sulbar tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 3,13 persen. Dengan demikian, pemerintah Sulbar berhasil mengendalikan inflasi sesuai dengan target RPJMD sebesar 3,23 persen (*yoy*).

Grafik 1.10 Perbandingan Inflasi *Year on Year (yoy)* antara Sulbar dan Nasional

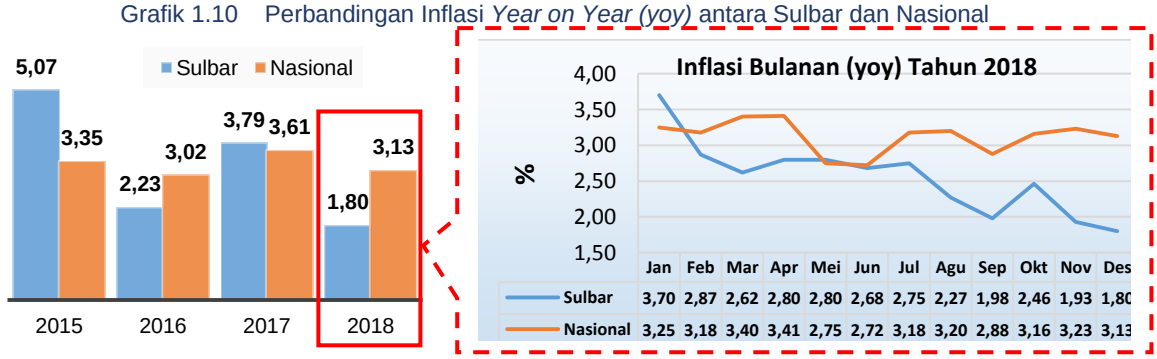

Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2019 (diolah)

Selama tahun 2018, semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok pengeluaran yang paling besar memberi andil terhadap inflasi Sulbar berasal dari kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, Bahan Bakar dengan andil sebesar 0,48 persen. Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan dan kelompok Bahan Makanan turut memberi andil besar terhadap inflasi, yakni masing-masing sebesar 0,45 persen dan 0,27 persen. Adapun komoditas yang dominan dalam andil inflasi selama tahun 2018 adalah beras (0,36 persen), Akademi/Perguruan Tinggi (0,23 persen), Tarif Pulsa Ponsel (0,23 persen), Rokok Kretek Filter (0,18 persen), Angkutan Udara (0,12 persen), Besi Beton (0,10 persen), serta Ayam Hidup (0,09 persen).

1.1.4 Nilai Tukar

Tren nilai tukar Rupiah terhadap USD cenderung terdepresiasi dari Januari hingga Oktober.Selanjutnya Rupiah mulai menguat kembali hingga ke level Rp14.400/USD1 di akhir tahun.

Nilai tukar merupakan salah satu instrumen penting bagi para pelaku perdagangan internasional, baik pemerintah maupun swasta. Di lingkup regional Sulbar, nilai tukar turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai PDRB. Hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang menjadi kontributor dominan terhadap nilai PDRB Sulbar dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2018, transaksi ekspor lingkup Sulbar didominasi oleh empat mitra dagang utama yaitu Korea Selatan, Filipina, India, dan Pakistan dengan porsi gabungan sebesar 76,41 persen dari total nilai ekspor non migas Sulbar. Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara-negara tersebut cenderung stabil pada tahun 2018 sebagaimana tergambar pada grafik perkembangan nilai tukar berikut.

Grafik 1.11 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Mitra Ekspor Utama dan Mata Uang USD Tahun 2018

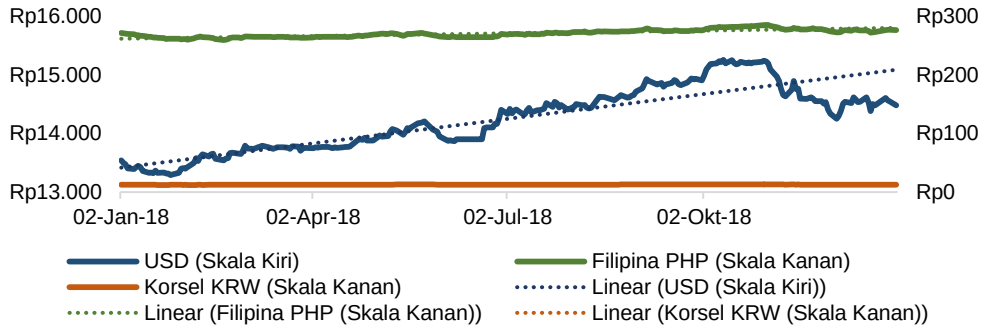

Sumber: BI (diolah), 2019

Sementara itu, meskipun Amerika Serikat (AS) bukan mitra dagang terbesar Sulbar, tetapi USD menjadi mata uang yang umum digunakan dalam perdagangan CPO di pasar global. Nilai tukar Rupiah terhadap USD memperlihatkan tren pelemahan sejak awal tahun, bahkan menembus level Rp15.000/USD pada Oktober 2018. Depresiasi Rupiah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 4 kali di tahun 2018 memicu kenaikan *yield* US *Treasury Bond* yang memicu pembalikan modal dari negara berkembang termasuk Indonesia. Selain itu, kenaikan harga minyak mentah dunia yang menembus harga USD80 per barel pada bulan Oktober turut menjadi faktor eksternal yang membuat Rupiah terdepresiasi.

Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD tersebut secara konseptual akan berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor CPO Sulbar. Pelemahan nilai Rupiah terhadap USD akan mendorong keuntungan eksportir mengingat transaksi ekspor menggunakan USD sebagai mata uang transaksi. Kondisi tersebut terkonfirmasi oleh nilai ekspor CPO Sulbar tahun 2018 yang tumbuh sebesar 12 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar USD402,59 ribu.

Namun demikian, nilai ekspor CPO Sulbar tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah terhadap USD. Meskipun nilai tukar Rupiah menunjukkan tren melemah, nilai ekspor CPO Sulbar justru mengalami penurunan pada bulan Maret, Mei, Juli, dan September 2018. Bahkan pada bulan Desember saat Rupiah terapreasiasi ke level Rp14.400/USD, nilai ekspor tumbuh positif menuju level USD42,64 juta. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi nilai ekspor CPO Sulbar. Jumlah produksi dan volume ekspor menjadi komponen yang dominan terhadap fluktuasi nilai ekspor CPO Sulbar.

Grafik 1.12 Perkembangan Nilai Ekspor Utama dan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Tahun 2018

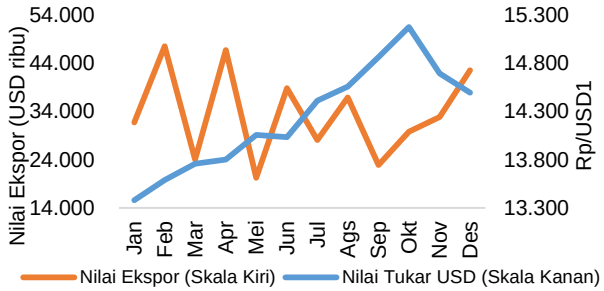

Sumber: BI (diolah), 2019

Pada saat terjadi kenaikan volume ekspor CPO, secara linear nilai ekspor CPO Sulbar turut mengalami peningkatan. Turunnya harga CPO di pasar dunia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ekspor komoditas unggulan Sulbar tersebut. Terbukti, kinerja ekspor CPO Sulbar di tahun 2018 tumbuh 12 persen (*yoy*).

Selain itu, sentimen negatif di beberapa pasar CPO juga tidak mengurangi kinerja ekspor CPO Sulbar. Sebagai contoh, kenaikan bea masuk CPO dari 15 persen menjadi 44 persen yang diterapkan oleh pemerintah India pada November 2017 (Kontan, 2018) tidak menghentikan kenaikan nilai ekspor CPO Sulbar ke negara tersebut. Bahkan nilai ekspor CPO Sulbar ke India meningkat 6 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadikan India sebagai negara tujuan ekspor terbesar ketiga setelah Korea Selatan dan Filipina.

1.2 INDIKATOR KESEJAHTERAAN

1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Sulbar terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 ditandai dengan capaian sebesar 64,30.

Pembangunan manusia di Sulbar terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 yang ditandai dengan capaian IPM Sulbar sebesar 64,30. Berdasarkan klasifikasi BPS, angka tersebut termasuk ke dalam kategori Sedang (60≤IPM≤70). Jika dibandingkan dengan target pemerintah Sulbar dalam RPJMD 2017-2022, capaian dimaksud masih berada di bawah target tahun 2017 sebesar 64,80. Dalam enam tahun terakhir, perkembangan capaian IPM Sulbar relatif stabil mengikuti tren perkembangan IPM Nasional dengan gap yang cukup lebar, yakni tertinggal enam hingga tujuh angka. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Sulbar masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi lainnya di Indonesia.

Terhitung sejak tahun 2014 hingga 2017, laju pertumbuhan IPM Sulbar berada di atas pertumbuhan nasional. Akan tetapi, laju tersebut belum cukup kuat untuk menyamai rata-rata kualitas pembangunan manusia di provinsi lain. Untuk mempersempit gap ketertinggalan Sulbar dengan capaian IPM daerah lain yang lebih maju, maka diperlukan *concern* pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bidang kesehatan dan pendidikan, diikuti dengan pengawalan yang ketat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya berdasarkan data rata-rata perkembangan IPM Sulbar selama tahun 2010-2017 yang tumbuh sebesar 1,06 persen dan memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat serta perkembangan belanja pemerintah pada bidang kesehatan yang tidak mengalami kenaikan signifikan, maka diproyeksikan pada tahun 2018 capaian IPM Sulbar berada pada kisaran angka 64,80-64,99. Angka tersebut masih cukup jauh dari target pemerintah Sulbar sesuai RPJMD Sulbar Tahun 2017-2022 yang diharapkan menyentuh angka 66,62 di tahun 2018.

Grafik 1.13 Perkembangan Capaian IPM Tahun 2010 – 2017

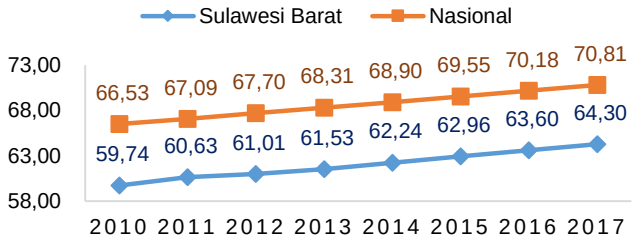

Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2019 (diolah)

Tabel 1.1 Capaian IPM per Komponen Provinsi Sulbar Tahun 2017

Daerah/ Kabupaten	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
Majene	60,79	13,57	8,14	9.559	65,40
Polman	61,76	13,01	7,09	7.947	62,35
Mamasa	70,48	11,41	7,10	7.353	63,92
Mamuju	66,65	13,13	7,26	9.019	66,32
Matra	65,33	11,37	7,48	10.577	65,67
Mateng	67,52	11,57	7,13	7.931	63,64
Sulbar	**64,34**	**12,48**	**7,31**	**8.736**	**64,30**
Nasional	71,06	12,85	8,10	10.664	70,81

Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2019 (diolah)

Jika dilihat perbandingan antar wilayah, Kabupaten Mamuju menunjukkan capaian pembangunan manusia yang paling tinggi, yakni sebesar 66,32. Sementara capaian terendah sebesar 62,35 terjadi pada Kabupaten Polewali Mandar. Selain karena jumlah penduduk Polewali Mandar yang lebih banyak, rendahnya capaian IPM pada kabupaten tersebut diduga berkorelasi pula dengan belanja pemerintah pada fungsi pendidikan yang relatif paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya.

Capaian IPM Sulbar tahun 2018 diprediksi meningkat seiring dengan ekspansi pemerintah pada Belanja fungsi Pendidikan.

Pada tahun 2017, porsi realisasi Belanja fungsi Pendidikan hanya 9,8 persen dari total belanja konsolidasian Polman. Dengan angka tersebut, rasio belanja per kapitanya hanya sebesar Rp457 ribu, rasio paling rendah di lingkup provinsi Sulbar. Namun demikian, pada tahun 2018 diprediksi capaian IPM Polman terdongkrak hingga dua persen dan mampu mengejar capaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah, atau bahkan mampu melepaskan predikat capaian IPM terendah. Hal tersebut karena pada tahun 2018 Polman menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan IPM melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakatnya, dengan mengeluarkan belanja pendidikan sebesar 29 persen dari total belanja konsolidasiannya. Kebijakan tersebut membuat rasio belanja pendidikan per kapitanya melonjak menjadi Rp1,2 juta.

Kemudian dari sisi perbandingan wilayah pada aspek pendidikan, Kabupaten Majene menunjukkan capaian tertinggi. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Sulbar yang menempatkan Majene sebagai pusat pendidikan di wilayah Sulbar. Capaian Majene tersebut diharapkan terus meningkat seiring dengan ekspansi Belanja Gedung/Bangunan pada Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di sepanjang tahun 2018. Ekspansi belanja dimaksud semakin memperbesar kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Dengan demikian, angka Harapan Lama Sekolah sebagai salah satu komponen IPM diharapkan juga turut meningkat.

1.2.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan Sulbar periode September 2018 tercatat 11,22% meningkat 4 basis poin dari tahun 2017.

Pada periode September 2018, tingkat kemiskinan Sulbar kembali menanjak ke level 11,22 persen setelah mencapai titik terendah 11,18 persen pada September 2017. Kondisi tersebut kontras dengan perkembangan tingkat kemiskinan nasional yang konsisten mengalami penurunan hingga mencapai level 9,66 persen. Dengan demikian, pada tahun ini kinerja pengentasan kemiskinan di Sulbar yang pemerintah targetkan dapat ditekan hingga 10,19 persen sesuai RPJMD belum tercapai.

Dalam skala regional Pulau Sulawesi, tingkat kemiskinan Sulbar berada pada level menengah, yakni urutan ketiga terendah setelah Sulawesi Utara sebesar 7,59 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 8,87 persen. Akan tetapi, jika ditinjau dari progres pengentasan kemiskinan dibandingkan dengan periode September 2017, maka Sulbar

menempati urutan paling akhir. Sulbar mencatatkan kinerja negatif dengan kenaikan tingkat kemiskinan di tengah kinerja positif provinsi lain di kawasan Pulau Sulawesi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu, dalam skala nasional Sulbar menempati urutan ke-21 dari 34 provinsi.

Kemudian dari sisi perbandingan antar kabupaten menunjukkan kabupaten Polewali Mandar memiliki tingkat kemiskinan 16,05 persen, angka tertinggi seiring dengan capaian IPM yang paling rendah. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa salah satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah dengan memperluas akses pendidikan masyarakat. Kabupaten Polman dengan indeks pendidikan (sebagai salah satu komponen pembentuk IPM) paling rendah berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Sejalan dengan peningkatan tingkat kemiskinan, secara absolut jumlah penduduk miskin Sulbar juga bertambah sebanyak 3,36 ribu jiwa dari periode September 2017 menjadi 152 ribu jiwa di periode September 2018. Jumlah tersebut terdiri dari penambahan di daerah perdesaan sebanyak 1.930 jiwa dan di daerah perkotaan sebanyak 1.430 jiwa.

Grafik 1.14 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Sulbar Tahun 2015 - 2018

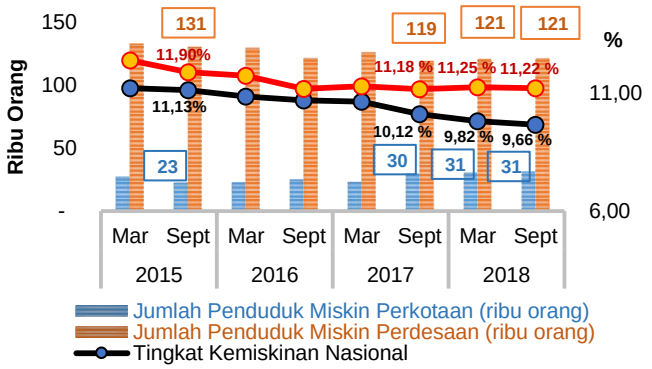

Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2019 (diolah)

Hal ini mengisyaratkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Untuk wilayah perdesaan, peningkatan alokasi Dana Desa dari tahun 2017 relatif kecil, yakni hanya 2,3 persen belum optimal dalam memberdayakan perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di tahun sebelumnya dimana jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang hampir sebanyak 3 ribu jiwa dengan penambahan alokasi Dana Desa sebesar 27 persen dari tahun 2016.

Jika ditinjau dari pergerakan tingkat kemiskinan selama tahun 2018, terdapat fenomena yang cukup menarik, yakni dari periode Maret ke September. Secara persentase, tingkat kemiskinan Sulbar pada September turun 0,02 poin dibandingkan Maret. Akan tetapi, secara absolut jumlah penduduk miskin justru bertambah sebanyak 1,05 ribu jiwa. Berdasarkan klarifikasi dari BPS Sulbar, kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh adanya migrasi penduduk ke wilayah Sulbar dalam jumlah yang relatif besar, mengingat Sulbar merupakan salah satu wilayah sasaran migrasi. Penduduk

yang bermigrasi dimaksud sebagian besar diperkirakan merupakan penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan Sulbar, sehingga menambah jumlah penduduk miskin yang ada di Sulbar.

Memperhatikan komoditas yang berpengaruh terhadap peningkatan Garis Kemiskinan, beras dan rokok merupakan dua kontributor terbesar terhadap kemiskinan di wilayah Sulbar. Hal ini sejalan dengan kontributor inflasi yang terjadi selama tahun 2018, dimana beras juga menjadi kontributor terbesar. Sementara itu, rokok yang tidak memiliki kalori justru seakan menjadi kebutuhan primer bagi kelompok warga miskin. Program persuasi pemerintah agar masyarakat hidup sehat melalui Germas perlu lebih digalakkan, terutama program Anti-Rokok. Lebih jauh, alternatif kebijakan menaikkan cukai rokok dapat ditinjau untuk mendukung program kesehatan tersebut.

Alternatif lain untuk menekan tingkat kemiskinan adalah dengan menggalakkan Program Keluarga Harapan (PKH). Diakui bahwa dalam jangka pendek program PKH tidak akan terlalu berdampak. Akan tetapi, program tersebut merupakan upaya memutus rantai kemiskinan dengan menyasar aspek kesehatan dan pendidikan warga miskin. Oleh karenanya, selain dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, program PKH dimaksud diharapkan pula akan mendongkrak capaian IPM Sulbar. Karena itu, pemda perlu mendukung program nasional PKH tersebut, misalnya dengan mendukung biaya operasional tim pendamping PKH dan memberi kemudahan koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait, termasuk dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan PDRB, kontributor terbesar berasal dari sektor pertanian, utamanya Sub Sektor Perkebunan. Artinya, selain produksinya yang tinggi, masyarakat Sulbar juga paling banyak bekerja pada sektor tersebut. Kondisi itu juga terkonfirmasi dalam peta sebaran tenaga kerja yang dirilis BPS. Hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah untuk mengintervensi sektor ini, misalnya dengan memberi bantuan peralatan dan mesin produksi, atau menggalakkan kembali program sejenis PNPM Mandiri agar hasil produksi pada sektor tersebut dapat dijual dalam keadaan memiliki nilai tambah, tidak dalam kondisi bahan mentah.

Peran BUMDes perlu didorong oleh pemerintah untuk memacu efektivitas Dana Desa melalui peningkatan perekonomian warga desa. Pertumbuhan produksi pada sektor pertanian diyakini memiliki daya ungkit yang lebih besar terhadap perekonomian Sulbar dibandingkan sektor lainnya mengingat kontribusinya sebagai penyumbang terbesar PDRB. Oleh karena itu, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pada sektor

ini diharapkan lebih mampu menjadi salah satu jalan keluar bagi pengentasan kemiskinan.

Grafik 1.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulbar tahun 2015-2018

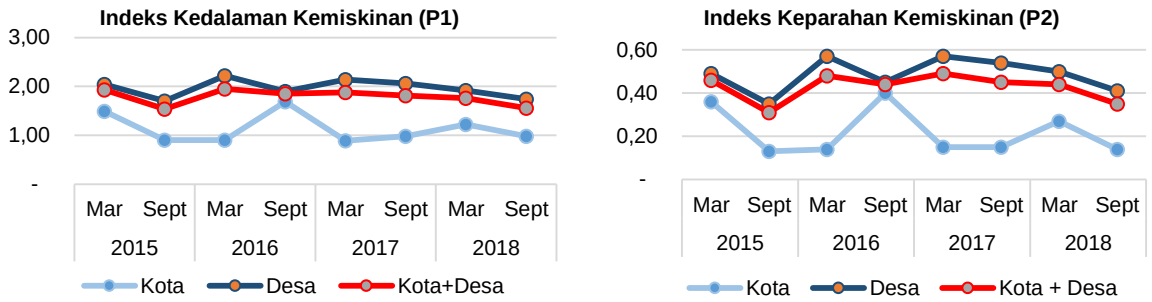

Sumber: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Pada sisi lain, kondisi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan di wilayah Sulbar pada tahun 2018 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun 2017. Data tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung meningkat mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit. Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki Indeks Kedalaman Kemiskinan ini adalah melalui Program Beras Sejahtera (Rastra). Sehubungan dengan dugaan adanya migrasi warga miskin, maka diperlukan konfirmasi BPS. Apabila terbukti benar, maka perlu segera melakukan update data warga miskin agar dapat meningkatkan *coverage* Program Rastra tersebut.

1.2.3 Ketimpangan (Gini Ratio)

Gini Ratio Sulbar pada September 2018 sebesar 0,366 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu wilayah, dengan skala nilai antara 0 hingga 1. *Gini Ratio* bernilai 0 berarti terdapat pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, jika *Gini Ratio* bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan yang sempurna, atau terdapat satu orang yang memiliki segalanya sementara ada orang lain yang tidak memiliki apa-apa. Semakin mendekati nilai 0 menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Pada September 2018, *Gini Ratio* Sulbar berada pada kategori “sedang” yakni sebesar 0,366 meningkat 7,9 persen dibandingkan September 2017. Dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018), *Gini Ratio* Sulbar cenderung berfluktuasi dan mencapai angka terendah (capaian terbaik) pada tahun 2017. Pemerintah perlu memberi perhatian untuk mempersempit kesenjangan pendapatan masyarakat Sulbar karena pada tahun 2018 angka *Gini Ratio* kembali menanjak. Ketimpangan pendapatan masyarakat Sulbar tampak melonjak di daerah perkotaan, seiring dengan fenomena kemiskinan yang juga

meningkat di daerah perkotaan. Jika kondisi dimaksud terus berlangsung, maka potensi risiko terjadinya gesekan sosial menjadi lebih besar.

Grafik 1.16 Perkembangan *Gini Ratio* tahun 2015-2018

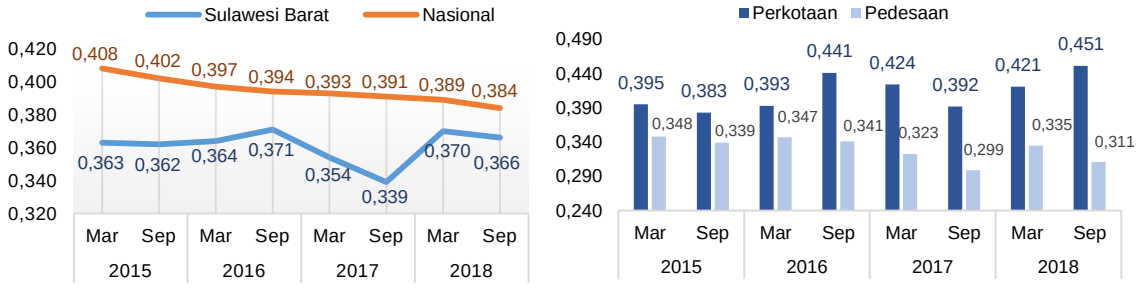

Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2019 (diolah)

Jika dibandingkan dengan rasio gini pada skala nasional sebesar 0,384, *Gini Ratio* Sulbar masih lebih rendah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa PDRB Sulbar hanya menyumbang sebesar 0,29 persen terhadap PDB Nasional, dan PDRB per kapita Sulbar selalu lebih rendah dibandingkan dengan PDB per kapita Nasional. Oleh karena itu, penurunan *Gini Ratio* Sulbar perlu diupayakan dengan mendongkrak ekonomi masyarakat pada sektor penopang utama PDRB, yang sekaligus juga menjadi kantong kemiskinan Sulbar, yaitu Sektor Pertanian. Dengan demikian diharapkan pendapatan masyarakat miskin yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian dapat terangkat sehingga mempersempit kesenjangan ekonomi antar penduduk.

1.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan

Perkembangan penyerapan tenaga kerja di Sulbar menunjukkan tren yang positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulbar terus mengalami penurunan dari 3,35 persen di tahun 2015 menjadi 3,16 persen di tahun 2018 (periode Agustus). Jika dikonversi ke dalam angka absolut, jumlah pengangguran di Sulbar sebanyak 20,2 ribu orang. TPT Sulbar dalam empat tahun terakhir selalu lebih rendah dibandingkan TPT nasional, dimana pada tahun 2018 TPT Nasional tercatat 5,34 persen. Walaupun demikian, capaian tersebut belum memenuhi target pemerintah dalam RPJMD Sulbar yang diharapkan dapat ditekan hingga level 2,96 persen.

Bersamaan dengan kenaikan TPAK, angka TPT Sulbar turun 5 basis poin dari tahun 2017 menjadi 3,16%

Tabel 1.2 Kondisi Ketenagakerjaan Sulawesi Barat Tahun 2015 - 2018

Uraian Indikator	2015		2016		2017		2018	
	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu
Angkt. Kerja Sulbar (Jiwa)	647.709	616.549	641.529	645.671	641.773	614.700	663.300	639.600
TPAK Sulbar (%)	74,74	70,27	72,3	71,9	70,68	66,96	71,53	68,46
TPT Sulbar (%)	1,81	3,35	2,72	3,33	2,98	3,21	2,45	3,16
TPT Nasional (%)	5,81	6,18	5,50	5,61	5,33	5,50	5,13	5,34

Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2019 (diolah)

Tren TPT Sulbar yang cenderung menurun tidak sejalan dengan kondisi kemiskinan masyarakat Sulbar yang justru meningkat. Kondisi tersebut berkorelasi dengan sebaran sektor yang menyerap tenaga kerja yang ada di Sulbar, serta berkaitan pula dengan tingkat pendidikan para tenaga kerja yang mengisi sektor-sektor lapangan pekerjaan dimaksud.

Grafik 1.18 Komposisi Sektor Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Pekerja di Sulbar Tahun 2018

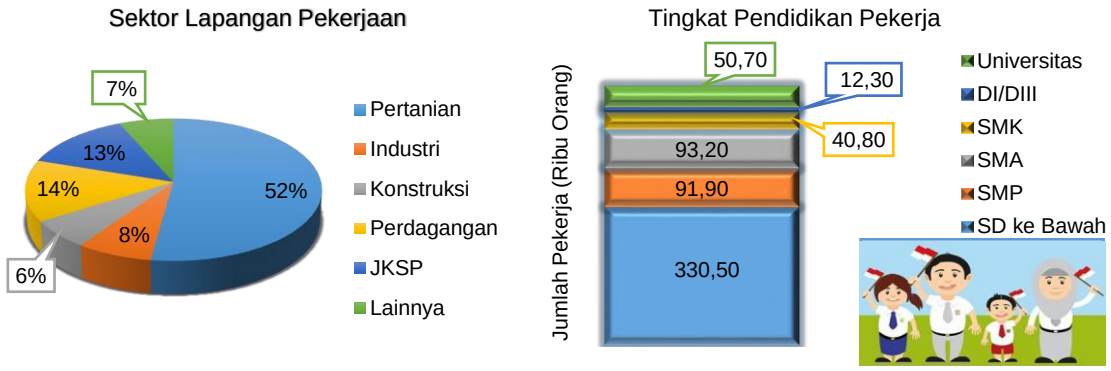

Sumber: BPS Sulbar, 2019

Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 323,3 ribu masyarakat Sulbar yang bekerja di sektor Pertanian. Jumlah tersebut lebih dari separuh angka total pekerja di wilayah Sulbar. Hal ini selaras dengan sektor penyumbang PDRB Sulbar yang terbesar, yang juga ditopang oleh sektor Pertanian. Walaupun demikian, terdapat fenomena yang menjadi kendala terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar dan berkorelasi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan. Situasi dimaksud adalah banyaknya pekerja yang tergolong sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar/diupah, dan jika dibayar pun upahnya masih tergolong rendah.

Dari sisi tingkat pendidikan, pekerja Sulbar didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, yakni sebesar 53 persen. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab mengapa penurunan TPT tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Sulbar. Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, daya tawar para pekerja di pasar tenaga kerja juga menjadi rendah. Artinya, penghasilan yang mereka terima juga terbilang rendah sehingga berdampak pada daya beli yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarganya. Jumlah pengangguran paling banyak berasal dari pekerja dengan tingkat pendidikan SMA dan SMK. Dengan kata lain, di dalam pasar tenaga kerja di Sulbar, terdapat penawaran tenaga kerja yang berpendidikan SMA dan SMK yang justru tidak terserap. Pendidikan vokasi yang menjadi salah satu *concern* pemerintah Sulbar perlu didukung dengan penyiapan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap para alumninya.

1.3 EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL

Kinerja pemerintah Sulbar berhasil mencapai target Inflasi dan TPT sesuai RPJMD Sulbar, sementara indikator lain meleset dari target

Pada tahun 2018, indikator Inflasi telah berjalan pada jalurnya, sesuai dengan target Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022. Sementara itu, indikator lainnya seperti Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Tingkat Kemiskinan, *Gini Ratio,* dan TPT masih membutuhkan upaya yang lebih dari pemerintah untuk mengejar ketertinggalan.

Tabel 1.3 Matriks Target-Capaian Indikator Pembangunan Sulawesi Barat Tahun 2017

Indikator	2017		2018		Naik/ Turun	Keterangan
	Target	Capaian	Target	Capaian		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,1	6,67	7,1 - 7,4	6,23	Turun	Ekonomi Sulbar tumbuh positif namun melambat jika dibandingkan tahun 2017
Inflasi (%)	3,58	3,79	3,23	1,80	Turun	Inflasi Sulbar lebih terkendali jauh melebihi target (tercapai)
IPM (Indeks)	75,70	64,3	66,62	N/A (belum tersedia)	Naik	IPM (tahun 2017) tertinggi di Kab.Mamuju sebesar 66,32 dan terendah di Kab.Polman sebesar 62,35
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9,5	11,18	10,19	11,22	Naik	Secara absolut jumlah penduduk miskin Sulbar naik sebanyak 3,36 ribu jiwa (yoy periode September)
Gini Ratio (Indeks)	0,380	0,339	0,350	0,366	Naik	Kesenjangan pendapatan masyarakat Sulbar semakin melebar dibandingkan tahun 2017
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 - 5,3	3,21	2,96	3,16	Turun	Tingkat Pengangguran Sulbar menurun 5 basis poin (yoy). Sektor Pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja

Sumber: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Khusus untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulbar yang terpaut 87 basis poin dari target RPJMD, perlu diupayakan dengan memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukan investasi pada industri pengolahan kelapa sawit agar menambah kapasitas produksi CPO. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong produksi komoditas dari sektor unggulan Sulbar selain kelapa sawit, seperti Kakao atau dari sub sektor Perikanan untuk mengantisipasi penurunan harga pada satu jenis komoditas. Hal ini karena kondisi perekonomian Sulbar bersifat sensitif terhadap fluktuasi harga CPO di tingkat dunia.

Grafik 1.17 Perkembangan CPO dan Pertumbuhan Ekonomi Sulbar Tahun 2016-2018

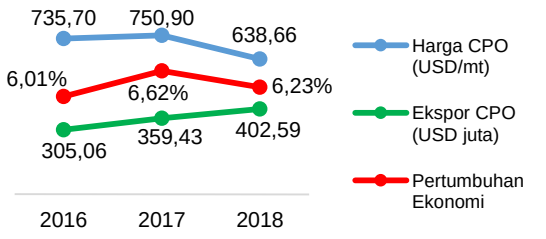

Sumber: BPS Sulbar; Commodity Market World Bank, 2019 (diolah)

Kondisi tersebut menggambarkan pula bahwa perekonomian Sulbar masih rapuh terhadap kondisi perubahan perekonomian global. Untuk itu, perlu menguatkan kemandirian ekonomi Sulbar dengan mendorong program hilirisasi produk melalui

industri pengolahan agar barang yang diekspor tidak dalam keadaan bahan mentah, melainkan berupa barang jadi yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas hidup manusia yang tercermin pada angka IPM perlu diarahkan melalui program peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan. Pada saat yang sama diharapkan upaya tersebut juga mampu memutus mata rantai kemiskinan. Selain itu, potensi sektor pertanian dan pariwisata juga perlu diberikan perhatian lebih oleh pemerintah dalam mengangkat aktivitas perekonomian warga miskin. Peningkatan kesejahteraan warga miskin Sulbar diharapkan akan memangkas kesenjangan pendapatan yang saat ini masih belum mencapai target RPJMD Sulbar.

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL

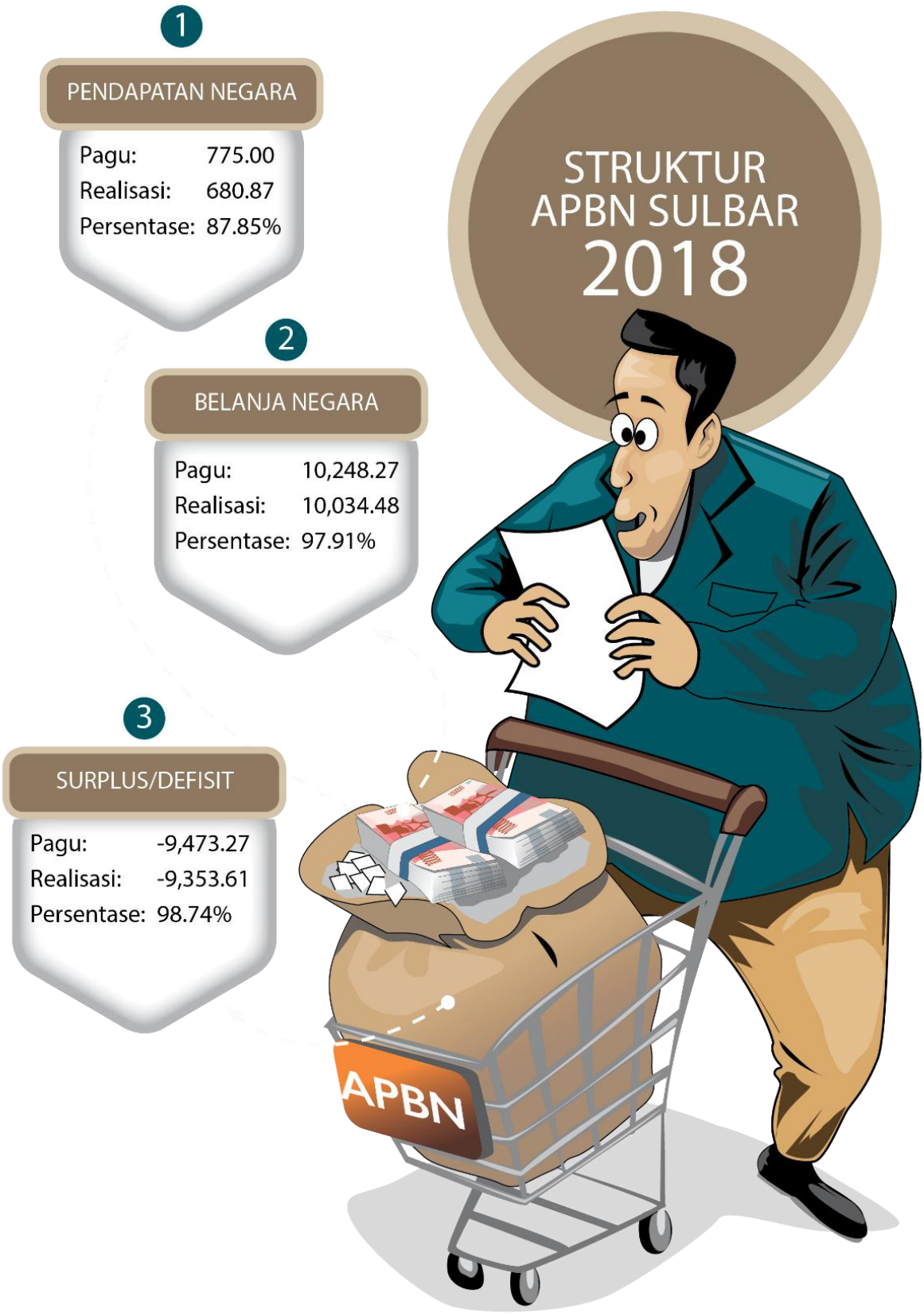

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL

2.1 APBN TINGKAT PROVINSI

APBN Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018
Pendapatan Negara 680,87 M
Belanja Negara 10,03 M

Tabel 2.1 Perkembangan APBN Provinsi Sulawesi Barat (dalam Rp miliar)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Pendapatan Negara	**882,18**	**638,91**	**775,00**	**680,87**
Pendapatan Perpajakan	853,26	584,44	745,26	618,68
Pendapatan Bukan Pajak	28,92	54,47	29,74	62,19
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Negara	**10.010,54**	**9.673,13**	**10.248,27**	**10.034,48**
Belanja Pemerintah Pusat	3.293,32	3.097,34	3.634,11	3.467,58
Transfer ke Daerah	6.717,22	6.575,79	6.614,16	6.566,90
Surplus/(Defisit)	**(9.128,36)**	**(9.034,22)**	**(9.473,27)**	**(9.353,61)**

Sumber: OMSPAN; SIMTRADA; Monev PA, 2019 (diolah)

Total realisasi pendapatan negara dalam APBN di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 680,87 miliar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan dari sektor perpajakan dan PNBP tahun 2018 mengalami kenaikan. Pendapatan dari sektor perpajakan naik sebesar 5,86 persen, sedangkan PNBP naik sebesar 14,17 persen.

Grafik 2.1 Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN di Sulbar Tahun 2016-2018*

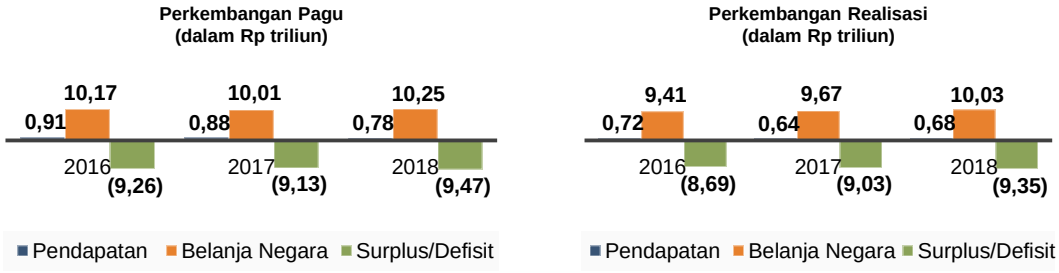

Sumber: OM SPAN; SIMTRADA; serta Aplikasi Monev PA (diolah)

Sementara itu, total realisasi belanja negara dalam APBN Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sebesar Rp10,03 triliun. Jumlah tersebut menyerap 97,91 persen dari total pagu. Pagu belanja barang sebesar Rp1,49 triliun merupakan pagu terbesar dalam alokasi pagu Belanja Pemerintah Pusat. Sedangkan alokasi pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp 6,61 triliun mengalami penurunan 1,53 persen senilai Rp103,06 miliar dibandingkan pagu tahun 2017. Penurunan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa disebabkan oleh penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Secara umum, kenaikan pendapatan negara sebesar 6,57 persen (*yoy*) belum mampu mengimbangi kenaikan belanja negara sebesar 3,74 persen (*yoy*) sehingga defisit anggaran pemerintah pusat di Sulbar tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,54 persen (*yoy*).

2.2 PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI

2.2.1 Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi

Pendapatan negara yang salah satu sektornya adalah penerimaan perpajakan, digunakan pemerintah pusat untuk membiayai belanja negara dalam rangka pembangunan, mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan (fungsi distribusi dan alokasi). Pendapatan dari sektor penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Penerimaan perpajakan terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Lainnya.

Tabel 2.2 Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi di Sulbar (dalam miliar Rp)

Pendapatan Perpajakan	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PPh	458,23	279,18	60,92%	434,96	288,58	66,35%
PPN	374,26	279,59	74,70%	277,10	302,69	109,23%
PPnBM	0,00	0,32	100%	2,82	0,55	19,67%
PBB dan BPHTB	10,12	12,68	125,28%	9,77	12,67	129,63%
Pajak Lainnya	10,66	12,68	118,99%	20,61	14,18	68,82%

Sumber: OMSPAN; KPP Pratama Mamuju dan Majene, 2019 (diolah)

Total realisasi penerimaan perpajakan tahun 2018 sebesar Rp 618,68 miliar meningkat 5,86 persen dibandingkan realisasi tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 584,44 miliar. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun 2018 dapat diketahui bahwa PPh dan PPN memberikan kontribusi penerimaan yang paling besar di Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan PPnBM memberikan kontribusi paling kecil. Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB melampau target yang ditetapkan yaitu sebesar 12,67 miliar atau 129,68 persen dari target.

Secara umum penerimaan perpajakan di Sulawesi Barat tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan. Dalam tiga tahun terakhir *tax ratio* di Provinsi Sulawesi Barat cenderung mengalami penurunan yaitu dari 1,87 persen di tahun 2016, 1,53 persen di tahun 2017 dan 1,42 persen di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulbar belum optimal dalam mendorong realisasi penerimaan pajak. Penetapan target dan realisasi penerimaan perpajakan menjadi sangat penting mengingat target dan realisasi penerimaan perpajakan ditentukan oleh beberapa faktor seperti inflasi, kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak.

2.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi

Menurut UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan

Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pada hakekatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi regular. Realisasi penerimaan PNBP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sebesar Rp62,19 miliar rupiah atau 209,12 persen dari target yang telah ditetapkan. Kinerja postitif tersebut menunjukkan urgensi rasionalisasi target penerimaan PNBP di Sulbar. Dibandingkan dengan realisasi PNBP tahun 2017, capaian realisasi PNBP di tahun 2018 meningkat 14,17 persen atau senilai Rp7,72 miliar.

2.2.2.1 Perkembangan PNBP menurut Jenis

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Barat menurut jenis sebesar Rp62,19 miliar yang berasal dari PNBP Lainnya. Berdasarkan PNBP menurut jenis Provinsi Sulawesi Barat hanya memiliki PNBP Lainnya. Pada prinsipnya, PNBP lainnya meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 2.3 Pendapatan PNBP Pemerintah Pusat per Jenis PNBP di Sulbar (dalam miliar Rp)

Penerimaan PNBP	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
SDA	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Bag. Pemerintah atas laba BUMN	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Lainnya	28,92	54,47	188%	29,74	62,19	209%
Pendapatan BLU	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Sumber: OMSPAN, 2019 (diolah)

Realisasi penerimaan PNBP Lainnya di tahun 2018 meningkat 14,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan dimaksud sebagian besar berasal dari PNBP Pendidikan sebesar Rp24,52 miliar. Secara nominal penerimaan PNBP menurut jenis di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir namun kontribusi kenaikan terhadap Pendapatan Negara relatif masih kecil. Peninjauan ulang atas jenis dan tarif PNBP dapat dijadikan alat untuk mengoptimalisasikan penerimaan PNBP Lainnya.

2.2.2.2 Perkembangan PNBP Fungsional

PNBP Fungsional adalah penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di tahun 2018 realisasi penerimaan PNBP Fungsional terbesar terdapat pada PNBP Pendidikan yaitu sebesar Rp24,52 miliar naik 41,33 persen dibandingkan tahun 2017. Kenaikan yang cukup signifikan tersebut didorong oleh peningkatan kapasitas pendidikan berupa penambahan jumah mahasiswa baru tahun ajaran 2018-2019 dan pembangunan gedung untuk kegiatan perkuliahan di Unsulbar. Berbeda dengan tren PNBP

Kenaikan PNBP Fungsional di Sulbar didorong oleh meningkatnya PNBP Fungsi Pendidikan berupa peningkatan kapasitas pendidikan di Unsulbar.

Pendidikan, PNBP Kejaksaan dan Peradilan justru mengalami penurunan tajam 54,14 persen, yang berhubungan dengan tingkat kesadaran warga masyarakat terhadap kepatuhan dan tertib hukum di Sulawesi Barat meningkat sehingga mengurangi jumlah pelanggaran hukum yang sanksinya berupa uang denda atau tilang. PNBP fungsional di Kementerian/Lembaga perlu dioptimalkan namun dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.4 Pendapatan Empat PNBP Fungsional Terbesar Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018 (dalam miliar Rp)

Penerimaan PNBP	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PNBP Polri	0,61	19,52	3223%	0,24	18,60	7894%
PNBP Pendidikan	18,08	17,35	96%	22,35	24,52	110%
PNBP Perhubungan	5,69	5,72	101%	5,53	6,64	120%
PNBP Kejaksaan dan Peradilan	3,05	2,66	87%	0,25	1,22	492%

Sumber: OMSPAN, 2019 (diolah)

2.3 BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI

2.3.1 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Organisasi (Bagian Anggaran/Kementerian/Lembaga)

APBN Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2018 berdasarkan organisasi terbagi dalam 42 Bagian Anggaran/Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari 41 Kementerian/Lembaga dan satu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). Total pagu Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan organisasi tahun 2018 mencapai Rp 4,94 triliun sedangkan total realisasi belanja seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp4,76 trilun. Secara total terdapat peningkatan pagu di tahun 2018 yaitu sebesar 4,47 persen (*yoy*).

Tabel 2.5 Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Bagian Anggaran (dalam Rp miliar)

Kementerian/Lembaga	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Bendahara Umum Negara	1.442,49	1.402,67	97,2%	1.313,47	1.298,36	98,8%
Kementerian Pekerjaan Umum PR	852,90	817,40	95,8%	929,79	879,34	94,6%
Kementerian Agama	479,90	452,50	94,3%	538,65	489,83	90,9%
Kepolisian Negara Republik Indonesia	527,18	506,64	96,1%	376,96	397,92	105,6%*
Kementerian Pertanian	277,97	235,11	84,6%	308,50	292,60	94,8%

Sumber: OMSPAN (diakses tanggal 9 Februari 2019); Keterangan: (*) dalam proses revisi pagu.

Alokasi Pagu terbesar berada di Kementerian PU Pera 929,79 M. Sedangkan Alokasi Pagu terkecil di Arsip Nasional RI 78,70 Juta.

Pagu belanja terbesar terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebesar Rp929,79 miliar dengan capaian realisasi hingga sebesar 94,57 persen. Sedangkan alokasi pagu dan realisasi belanja terkecil terdapat pada Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar Rp78,70 juta. Kementerian Negara/Lembaga yang mengalami penurunan pagu belanja cukup signifikan adalah Kepolisian RI dimana di tahun 2018 ini hanya memperoleh pagu sebesar Rp376,96

miliar, turun sebesar 28,50 persen dari pagu tahun 2017. Penurunan dimaksud berhubungan dengan telah selesainya beberapa proyek pembangunan gedung dan sarpras Polda Sulbar di tahun 2017 lalu.

2.3.2 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi

Grafik 2.2 Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Fungsi Tahun 2018 (dalam Rp miliar)

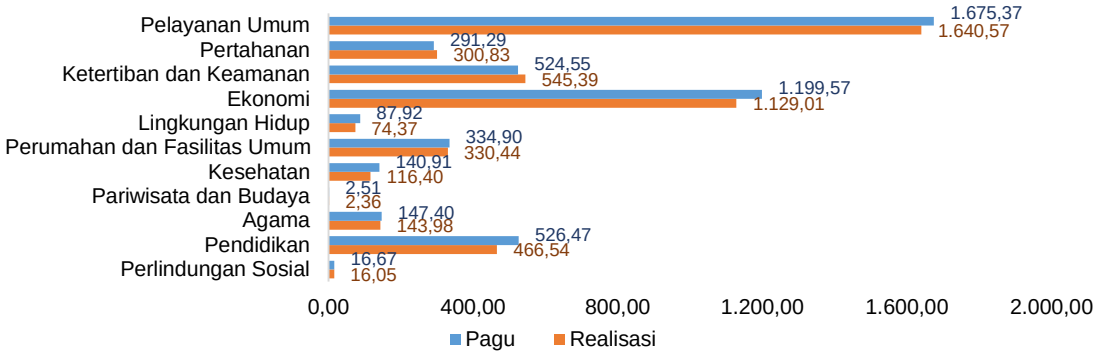

Sumber: OMSPAN, 2019 (diolah)

Alokasi pagu dan realisasi dari belanja menurut fungsi secara umum pada tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017. Total pagu seluruh fungsi mencapai Rp4,94 triliun, naik 4,47 persen di bandingkan pagu tahun 2017. Alokasi pagu belanja fungsi pelayanan umum sebesar Rp1,67 triliun merupakan porsi pagu terbesar dengan realisasi belanja sebesar Rp1,64 triliun. Belanja Fungsi Ekonomi menempati posisi tebesar kedua dengan alokasi pagu sebesar Rp1,19 triliun dengan capaian realisasi sebesar Rp1,12 triliun. Porsi alokasi pagu dan belanja terkecil adalah fungsi pariwisata dan budaya sebesar Rp 2,51 miliar rupiah dengan total realisasi sebesar Rp2,36 miliar.

Tabel 2.6 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018 (dalam Rp miliar)

Nama Fungsi	2017			2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pelayanan Umum	1.678,46	1.614,64	96,2%	1.675,37	1.640,57	97,92%
Pertahanan	248,38	246,76	99,3%	291,29	300,83	103,27%*
Ketertiban dan Keamanan	624,96	601,71	96,3%	524,55	545,39	103,97%*
Ekonomi	1.185,57	1.100,92	92,9%	1.199,57	1.129,01	94,12%
Lingkungan Hidup	60,48	53,31	88,2%	87,92	74,37	84,59%
Perumahan dan Fasilitas Umum	238,14	232,44	97,6%	334,90	330,44	98,67%
Kesehatan	100,35	89,05	88,7%	140,91	116,40	82,60%
Pariwisata dan Budaya	1,27	1,26	99,8%	2,51	2,36	94,00%
Agama	155,28	139,38	89,8%	147,40	143,98	97,68%
Pendidikan	428,89	407,90	95,1%	526,47	466,54	88,62%
Perlindungan Sosial	14,12	13,72	97,2%	16,67	16,05	96,25%
Total	**4.735,89**	**4.501,09**		**4.947,58**	**4.765,94**	

Sumber: OMSPAN (diakses tanggal 9 Februari 2019); Keterangan: (*) dalam proses revisi pagu.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa kebijakan pemerintah pusat untuk Provinsi Sulawesi Barat difokuskan pada tiga fungsi yaitu pelayanan umum, ekonomi, dan pendidikan. Porsi belanja pada fungsi pelayanan umum dimaksudkan untuk

meningkatkan layanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara secara *good governance* dalam rangka reformasi birokrasi. Kemudian, besarnya pagu dan realisasi belanja pada fungsi pendidikan sebesar Rp466,54 miliar diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat mengurangi angka buta huruf dan angka putus sekolah yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Grafik 2.3 Realisasi Belanja per Sub Fungsi pada Fungsi Ekonomi Provinsi Sulbar Tahun 2018 (dalam Rp miliar)

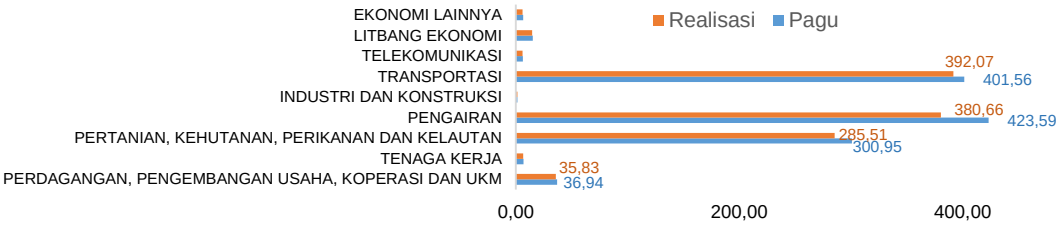

Sumber: Aplikasi Monev PA, 2109 (diolah)

Realisasi belanja pada fungsi ekonomi sebesar Rp1,12 triliun diharapkan agar pengeluaran pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat untuk mengurangi angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Pada fungsi belanja ini, pelaksanaan anggaran paling besar ditujukan pada Subfungsi Transportasi; Pengairan dan Pertanian; dan Kehutanan, Perikanan dan Kelautan. Jadi, pada tahun 2018 upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian warga Sulbar telah diarahkan pada sektor unggulan, yakni sektor pertanian yang didukung oleh konektivitas daerah melalui pembangunan pada sub fungsi Transportasi. Akan tetapi, alokasi belanja dimaksud masih cenderung pada tahap pembangunan hulu pertanian seperti waduk dan irigasi serta bantuan bibit/pupuk. Bantuan berupa mesin/peralatan yang mendukung industri pengolahan belum memadai.

2.3.3 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

Grafik 2.4 Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2018 (dalam Rp miliar)

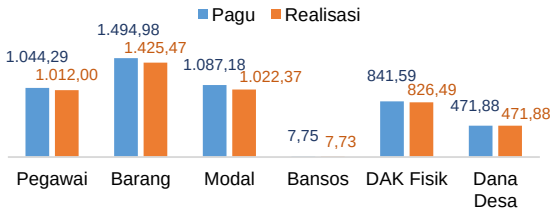

Sumber: Aplikasi Monev PA, 2109 (diolah)

Berdasarkan klasifikasi jenis belanja pemerintah, pada tahun 2018 jenis Belanja Barang memperoleh porsi pagu terbesar yaitu sebesar Rp1,49 triliun. Sementara itu, pagu Belanja Pegawai dan Belanja Barang meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 masing-masing 10,72 persen dan 32,20 persen. Belanja bantuan sosial mengalami penurunan yang signifikan sebesar 41,44 persen. Alokasi Transfer ke Daerah berupa DAK Fisik dan Dana Desa juga mengalami penurunan dikarenakan turunnya alokasi transfer DBH dan alokai DAK Fisik di Provinsi Sulawesi Barat.

Grafik 2.5 Perkembangan Persentase Realisasi Belanja Per Jenis Belanja APBN di Sulbar

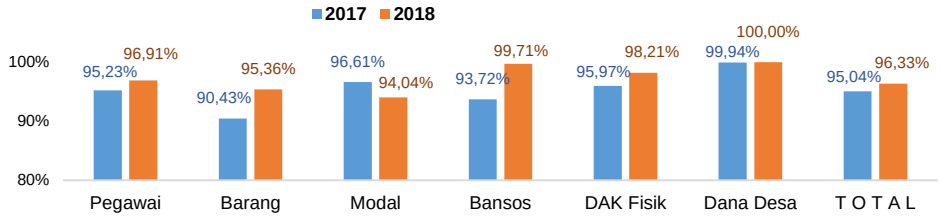

Sumber: OMSPAN, 2019 (diolah)

Dari sisi perkembangan realisasi belanja terhadap pagu belanja APBN, nampak bahwa hampir seluruh jenis belanja pemerintah pusat di Sulbar mengalami peningkatan kinerja penyerapan pagu, kecuali Belanja Modal. Kelompok Belanja Modal mengalami penurunan kinerja penyerapan sebesar 2,66 persen (*yoy*). Hal tersebut berkaitan dengan adanya sisa tender pada belanja modal jaringan serta adanya hambatan pembebasan lahan seluas 5 hektar pada kegiatan pembangunan bendungan di Sulbar.

2.3.4 Analisis Belanja Pemerintah Pusat

2.3.4.1 Perbandingan Belanja Produktif - Konsumtif

Belanja sektor produktif adalah pengeluaran pemerintah atau investasi yang digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka memperoleh aset di masa depan yang diharapkan dapat menimbulkan pengaruh yang besar dan berkelanjutan baik bersifat langsung dan tidak langsung.

Sedangkan Belanja Sektor konsumtif merupakan belanja pemerintah yang dikeluarkkan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah yang sifatnya rutin dan habis pakai yang pengaruhnya bersifat jangka pendek. Efisiensi pada belanja konsumtif untuk keperluan operasional pada kementerian negara dan lembaga perlu dilakukan namun dengan tetap menjaga kualitas tugas dan fungsi pelayanan.

Grafik 2.6 Rasio Belanja Modal dan Rasio Belanja Pegawai di Sulbar Tahun 2016-2018

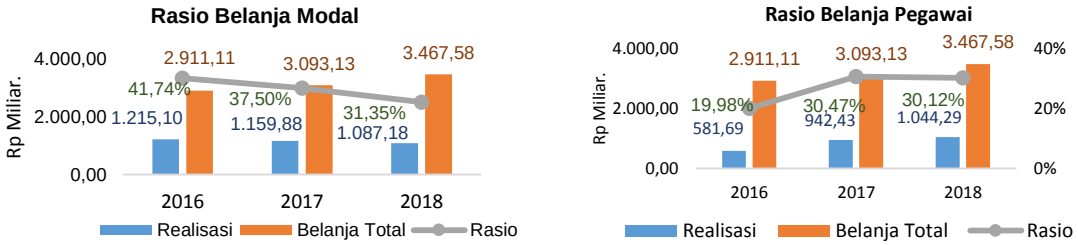

Sumber: Aplikasi Monev PA, 2109 (diolah)

Selanjutnya hasil efisiensi dapat dipergunakan untuk menambah belanja produktif terutama belanja modal untuk pembangunan infrastruktur di Sulbar. Rasio belanja modal dan belanja pegawai Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Barat selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa belanja modal terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan alokasi belanja pegawai.

Rasio Belanja Modal Sektor Produktif Provinsi Sulawesi Barat dalam 3 tahun terakhir cenderung turun.

Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Barat, belanja produktif berupa belanja modal semakin tergerus oleh belanja konsumtif seiring dengan penambahan jumlah pegawai untuk keperluan operasional kelembagaan. Total pagu belanja modal tahun 2018 sebesar Rp1,08 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,02 triliun atau sebesar 94,04 persen dari pagu. Sedangkan alokasi belanja pegawai sebesar Rp1,04 triliun dengan total realisasi sebesar Rp1,01 triliun.

Grafik 2.7 Perbandingan Pagu Belanja Sektor Produktif dan Konsumtif

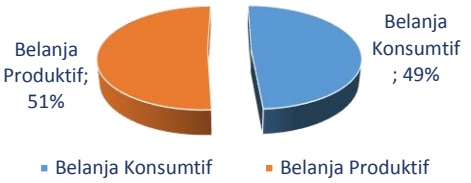

Sumber: Aplikasi Monev PA, 2109 (diolah)

Besaran porsi belanja pegawai hampir menyamai porsi belanja modal. Seharusnya porsi belanja modal untuk sektor produktif lebih besar dari porsi belanja pegawai, mengingat belanja modal memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Di sisi lain perlu dilakukan penghematan dan pengalihan dari belanja sektor konsumtif untuk keperluan belanja pegawai ke belanja modal untuk sektor produktif.

2.3.4.2 Rasio Belanja Pemerintah Pusat terhadap Populasi

Rasio belanja pemerintah pusat terhadap populasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan membandingkan antara total belanja pemarintah pusat dengan jumlah populasi. Rasio ini menunjukkan perbandingan belanja pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir untuk melihat proporsi antara kebijakan fiskal yang tercermin dari anggaran dengan populasi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

Grafik 2.8 Tren Rasio Belanja APBN terhadap Populasi di Sulbar

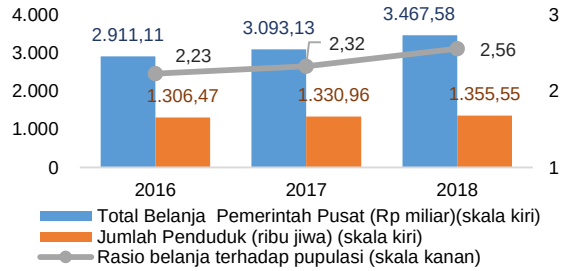

Sumber: Aplikasi Monev PA, 2109 (diolah)

Pada tahun 2018 dalam rangka mendukung pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui kebijakan fiskal, pemerintah pusat telah membelanjakan APBN sebesar Rp3,46 juta untuk setiap satu orang penduduk di Provinsi Sulawesi Barat. Tren Rasio Belanja Pemerintah Pusat terhadap Populasi selalu meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

2.3.4.3 Sensitivitas Belanja Pemerintah Pusat terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah

selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu.

Grafik 2.9 Belanja Pemerintah Pusat dan PDRB di Sulbar

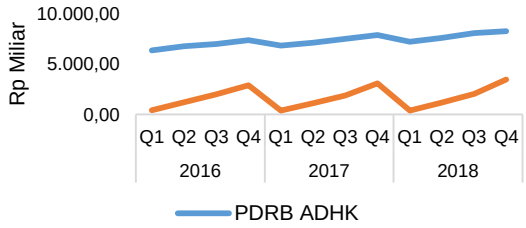

Sumber: BPS, Aplikasi Monev PA, 2109 (diolah)

Belanja pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Barat mempunyai peran yang sangat penting mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat relatif terbatas. Tren belanja pemerintah pusat dan PDRB dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi Belanja Pemerintah Pusat berhasil mendorong kenaikan PDRB Provinsi Sulawesi Barat.

Pola realisasi belanja pemerintah pusat yang biasanya masih sangat kecil pada triwulan I, berkorelasi dengan penurunan PDRB pada kuartal dimaksud. Walaupun demikian, komponen pengeluaran lain seperti konsumsi rumah tangga cenderung lebih terpengaruh oleh perayaan hari-hari besar keagamaan atau budaya sehingga pola pada komponen pengeluaran Rumah Tangga tidak sama dengan pola pengeluaran Belanja Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, penurunan PDRB pada kuartal pertama tidak sebesar penurunan yang terjadi pada komponen Belanja Pemerintah Pusat, karena masih tertahan oleh pengeluaran dari sektor lain seperti Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat yang cenderung memuncak pada kuartal terakhir tampak ikut mendorong capaian PDRB Provinsi Sulawesi Barat yang turut pula mencapai klimaks pada kuartal terakhir tahun 2018.

2.3.4.4 Analisis Rasio dan Sensitivitas Belanja Sektoral Pemerintah Pusat

Analisis belanja pemerintah pusat diarahkan pada sektor unggulan dan sektor yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2018, yaitu infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis rasio masing-masing sektor terhadap total Belanja Pemerintah Pusat.

2.3.4.4.1 Analisis Belanja Infrastruktur

Rasio Belanja Modal Infrastuktur di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 diukur dari perbandingan antara belanja modal dengan kategori output infrastruktur terhadap total Belanja Pemerintah Pusat. Alokasi belanja modal infrastruktur merupakan salah satu indikator dari arah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk

mendukung pencapaian pembangunan di seluruh sektor dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.7 Rasio Belanja Modal Infrastruktur Prov. Sulawesi Barat Tahun 2017-2018

Uraian	TA. 2017		TA. 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Modal Infrastruktur	1.171,98	1.144,45	1.035,63	982,89
Belanja APBN	3.293,32	3.097,34	3.634,11	3.467,58
Rasio Belanja Modal Infrastruktur	35,59%	36,95%	28,50%	28,35%

Sumber: Aplikasi Monev PA, 2109 (diolah)

Dibandingkan dengan tahun 2017, rasio belanja modal infrastruktur tahun 2018 turun menjadi 28,35 persen. Hal ini kurang sinkron dengan kebijakan Pemerintah Pusat bahwa belanja negara diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Kondisi dimaksud diduga berkorelasi dengan capaian pembangunan infrastruktur, dimana pembangunan beberapa proyek besar telah dirampungkan pada tahun-tahun sebelumnya.

2.3.4.4.2 Analisis Belanja Fungsi Pendidikan

Belanja fungsi pendidikan adalah belanja pada fungsi pendidikan yang direalisasikan melalui kementerian negara/lembaga, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Rasio belanja fungsi pendidikan adalah perbandingan belanja pendidikan terhadap total alokasi belanja negara. Tercapainya kebijakan pemerintah pusat di bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah antara lain meningkatnya jumlah guru atau tenaga pendidik, meningkatnya sarana pendidikan berupa bangunan gedung sekolah dan penurunan angka buta huruf. Belanja fungsi pendidikan di provinsi Sulawesi Barat hanya mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017.

Tabel 2.8 Rasio Belanja Fungsi Pendidikan Prov. Sulawesi Barat Tahun 2017-2018

Uraian	TA. 2017		TA. 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Fungsi Pendidikan	428,89	407,66	526,47	466,54
Belanja APBN	3.293,32	3.097,34	3.634,11	3.467,58
Rasio Belanja Fungsi Pendidikan	13,02%	13,16%	14,49%	13,45%

Sumber: Aplikasi Monev PA, 2109 (diolah)

Realisasi belanja fungsi pendidikan hanya 88,62 persen dari pagu. Capaian yang belum maksimal ini cukup disayangkan mengingat pagu yang tersedia di tahun 2018 meningkat 22,75 persen dibandingkan pagu tahun 2017. Dari total realisasi belanja fungsi pendidikan dipergunakan untuk keperluan belanja pegawai sebesar Rp239,85 miliar, belanja barang Rp144,16 miliar, belanja modal Rp81,47 miliar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp1,05 miliar. Pada tahun 2018 rasio belanja fungsi pendidikan hanya sebesar 13,45 persen naik tipis dibanding tahun 2017.

2.3.4.4.3 Analisis Belanja Fungsi Kesehatan

Amanat UU No 36 Tahun 2009 bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kesehatan minimal sebesar 5 persen dari APBN. Total pagu belanja fungsi kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 naik 50,98 persen menjadi sebesar Rp140,91 miliar dibandingkan alokasi tahun 2017 yang hanya sebesar Rp90,34 miliar. Realisasi mencapai 82,60 persen atau senilai Rp116,40 miliar. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Pusat tetap berkomitmen untuk menaikkan kualitas kesehatan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.9 Rasio Belanja Fungsi Kesehatan Prov. Sulawesi Barat

Uraian	TA. 2017		TA. 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Fungsi Kesehatan	90,34	79,80	140,91	116,40
Belanja APBN	3.293,32	3.097,34	3.634,11	3.467,58
Rasio Belanja Fungsi Kesehatan	2,74%	2,58%	3,88%	3,36%

Sumber: Aplikasi Monev PA (diolah, diakses tanggal 12 Februari 2019)

Rasio belanja fungsi kesehatan mencapai 3,36 persen naik sebesar 0,78 persen dari tahun 2017 yang hanya sebesar 2,58 persen. Total realisasi belanja fungsi kesehatan sebesar Rp116,40 miliar dipergunakan untuk keperluan belanja barang yaitu sebesar Rp46,72 miliar, kemudian diikuti belanja modal sebesar Rp35,85 miliar dan belanja pegawai sebesar Rp33,82 miliar. Peningkatan pagu dan realisasi fungsi kesehatan diharapkan dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.

2.3.4.4.4 Analisis Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Belanja Tidak Wajib

Grafik 2.10 Belanja Wajib dan Belanja Tidak Wajib di Sulbar Tahun 2018

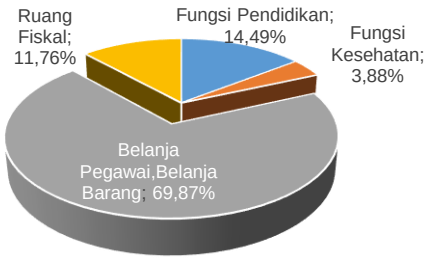

Sumber: Aplikasi Monev PA, 2109 (diolah)

Total Belanja Wajib 18,37% , Belanja Pegawai dan Belanja Barang 69,87%, Ruang Fiskal 11,76%

Sesuai amanat undang-undang tentang pendidikan dan kesehatan bahwa pemerintah harus mengalokasikan belanja wajib (*mandatory spending*) di bidang pendidikan 20 persen dan kesehatan 5 persen. Alokasi pagu fungsi pendidikan sebesar Rp526,47 miliar dan fungsi kesehatan sebesar Rp140,91 miliar. Total alokasi belanja wajib yang ada di Provinsi Sulawesi Barat mencapai Rp667,38 miliar atau 18,37 persen. Pagu belanja pegawai sebesar Rp1,04 triliun, belanja barang Rp1,49 triliun atau 69,87 persen. Total pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,63 triliun. Belanja tidak wajib yang merupakan ruang fiskal Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Barat hanya sebesar 11,76 persen.

2.4 ANALISIS *CASH FLOW* PEMERINTAH PUSAT

Arus Kas Pemerintah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas pemerintah pusat selama periode tertentu. Pada tahun 2018 *defisit cash flow* pemerintah pusat di provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp9.353 miliar. Total penerimaan kas masuk (*cash inflow*) Pemerintah Pusat sebesar Rp681 miliar, sedangkan total kas keluar (*cash outflow*) sebesar Rp10.034 miliar.

Tabel 2.10 Defisit *Cash Flow* APBN Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 (Rp miliar)

Cash In Flow	681
Cash Out Flow	10.034
Defisit	**-9.353**

Sumber: OMSPAN dan SIMTRADA, 2019 (diolah)

Kenaikan Pendapatan dari sektor Perpajakan dan PNBP di Provinsi Sulawesi Barat belum dapat mengimbangi peningkatan belanja dan transfer ke daerah sehingga kenaikan defisit selalu terjadi dari tahun ke tahun. Ketergantungan sumber pendanaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Sumber pendapatan dari sektor perpajakan dan PNBP di Provinsi Sulawesi Barat perlu lebih di optimalkan dan di sisi lain perlu dilakukan penghematan terhadap belanja konsumtif dan belanja operasional K/L.

2.5 TRANSFER KE DAERAH

Transfer ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi dan pergeseran kebutuhan fiskal yang mengikuti. Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Sulawesi Barat pada tahun 2018 mencapai Rp 6.614,16 miliar, turun 1,53 persen dibandingkan tahun 2017. Harga migas yang terus terkoreksi turun di tahun 2017 merupakan salah satu faktor pendorong anjloknya total penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2018, yang tampak dari penurunan DBH Migas.

Tabel 2.11 Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018 (Rp miliar)

Uraian Dana Transfer	2017		2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Transfer ke Daerah	6.256,13	97,74%	6.142,28	99,23%
A Dana Perimbangan	6.089,96	97,68%	5.951,78	99,21%
1 Dana Transfer Umum	4.411,00	98,19%	4.314,05	99,99%
DBH Pajak	201,05	60,75%	81,83	100,00%
DBH SDA	3,64	32,68%	3,12	86,74%
DBH Perikanan	13,46	33,42%	4,21	100,00%
DAU	4.192,85	100,25%	4.224,89	100,00%
2 Dana Transfer Khusus	1.678,96	96,34%	1.637,73	97,14%
DAK Fisik	981,39	95,97%	841,59	98,22%
DAK Non Fisik	697,56	96,86%	796,15	96,00%
B DID	166,17	100,00%	190,50	100,00%
Dana Desa	461,09	99,94%	471,88	100,00%
Total	6.717,22	97,89%	6.614,16	99,29%

Sumber: SIMTRADA, 2019 (diolah)

Meskipun secara agregat Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan, terdapat peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Sulawesi Barat tahun 2018 sebesar 0,76 persen sejalan dengan kebijakan *earmark* Dana Transfer Umum dalam kebijakan belanja tahun 2018. Selain itu terdapat peningkatan alokasi Dana Desa Sulawesi Barat tahun 2018 sebesar 2,34 persen dan diharapkan terus meningkat sejalan dengan program pembangunan dari pinggiran dengan target Dana Desa yang diterima oleh setiap desa minimal sebesar Rp1 miliar.

Secara agregat, DAU memiliki porsi yang terbesar dibandingkan dengan komponen transfer yang lain. Namun demikian, DAU akan terbagi habis untuk mengisi kebutuhan gaji pegawai Pemda dan mengisi celah fiskal yang timbul akibat rendahnya kapasitas fiskal daerah. Saat ini, yang masih dapat diharapkan untuk dapat bangkit dalam mendorong penerimaan transfer adalah bangkitnya penerimaan dari sektor Migas.

2.6 PENGELOLAAN BLU PUSAT

Hingga tahun 2018 berakhir, Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki sebuah instansi yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) Pusat. Akan tetapi, ditinjau dari segi probabilitas untuk memenuhi persyaratan substantif, terdapat dua instansi/satker pengguna PNBP yang memiliki potensi untuk diajukan sebagai instansi yang mengelola keuangannya dengan sistem BLU. Kedua satker dimaksud bergerak di bidang jasa layanan pendidikan, yaitu Politeknik Kesehatan Mamuju dan Universitas Sulawesi Barat.

Tabel 2.12 Perkembangan Pengelolaan Aset Satker PNBP di Prov. Sulawesi Barat Tahun 2016-2018

No	Nama Satuan Kerja PNBP	Nilai Aset 2016	2017	2018
1	Politeknik Kesehatan Mamuju	7.268.115.129	72.242.357.912	86.837.982.157
2	Universitas Sulawesi Barat	98.013.967.730	103.737.013.733	137.175.795.008

Sumber: OMSPAN, 2019 (diolah)

Dilihat dari perkembangannya, di tahun 2018 satker Universitas Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan aset yang pesat hingga 32,23 persen (*yoy*), sedangkan Politeknik Kesehatan Mamuju ikut tumbuh 20,20 persen (*yoy*). Lonjakan aset satker Universitas Sulawesi Barat berhubungan dengan pembangunan Gedung dan Bangunan senilai Rp3,08 miliar serta pengadaan peralatan dan mesin senilai Rp1,05 miliar, dan juga adanya revaluasi aset serta penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Sementara pada Politeknik Kesehatan Mamuju, peningkatan jumlah aset dibandingkan tahun 2017 disebabkan oleh adanya pengadaan peralatan dan mesin serta penambahan nilai KDP berupa gedung dan bangunan untuk menambah kapasitas kampus.

Tabel 2.13 Perkembangan Pagu PNBP dan Pagu RM Satker PNBP di Prov. Sulawesi Barat Tahun 2017-2018 (dalam Rp.)

No	Nama Satuan Kerja PNBP	PNBP		RM	
		2017	2018	2017	2018
1	Politeknik Kesehatan Mamuju	3.364.075.000	3.413.364.000	39.171.198.000	49.102.133.000
2	Universitas Sulawesi Barat	11.848.009.000	17.372.297.000	23.750.600.000	32.032.062.000

Sumber: OMSPAN, 2019 (diolah)

2.7 PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT

2.7.1 Penerusan Pinjaman

Pada tahun 2018 tidak terdapat Penerusan Pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*) kepada pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

2.7.2 Kredit Program

Realisasi Penyaluran Kredit Program : KUR 819,10 M Pembiayaan UMi 4,47 M

Kredit Program adalah kredit/pembiayaan usaha yang disalurkan oleh lembaga keuangan, badan layanan umum atau koperasi simpan pinjam yang memperoleh fasilitas dari pemerintah untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. KUR yang merupakan kredit pembiayaan modal kerja dengan suku bunga rendah (karena disubsidi Pemerintah) dapat dijadikan alat untuk menstimulasi para pelaku usaha pemula ataupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya dari usaha mikro ke usaha kecil, dari usaha kecil ke usaha menengah dan dari usaha menengah ke usaha besar. Ketepatan sasaran pemberian subsidi bunga pada KUR oleh Pemerintah diharapkan dapat dinikmati oleh para pelaku usaha UMKM.

Tabel 2.14 Penyaluran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi di Prov. Sulawesi Barat TA 2018

No	Sektor Ekonomi	Realisasi Penyaluran KUR			Rata-Rata Per Debitur
		Akad	Oustanding	Debitur	
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	329.545.500.000	259.300.636.680	7.402	44.521.143
2	Perikanan	7.381.000.000	5.592.926.107	311	23.733.119
3	Industri Pengolahan	31.892.000.000	24.005.418.341	1.120	28.475.000
4	Konstruksi	200.000.000	184.407.252	1	200.000.000
5	Perdagangan Besar dan Eceran	382.251.881.000	287.193.250.846	16.328	23.410.821
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan	16.045.500.000	13.549.131.853	219	73.267.123
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	6.146.000.000	4.624.050.820	280	21.950.000
8	Real Estate	4.761.000.000	3.473.535.168	58	82.086.207
9	Jasa Pendidikan	50.000.000	45.832.256	2	25.000.000
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154.000.000	141.528.132	9	17.111.111
11	Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan	40.680.896.205	30.007.942.164	1.666	24.418.305
	Jumlah	819.107.777.205	628.118.659.619	27.396	

Sumber: SIKP, 2019 (diolah)

Jika dikaitkan dengan lapangang usaha di Sulbar, nampak bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Barat dengan kontribusi sebesar 46,67 persen. Sedangkan realisasi terkecil

adalah sektor jasa pendidikan yang hanya terealisasi sebesar Rp50 juta. Penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Barat masih didominisasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan.

Dari sebaran penyaluran KUR di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 Kabupaten Mamuju Utara menempati poisisi pertama yaitu sebesar Rp242,89 milyar atau 26 persen dari total penyaluran KUR. Meskipun realisasi penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Mamuju Utara akan tetapi jumlah debitur terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar, sebanyak 9.287 orang/unit usaha.

Tabel 2.15 Penyaluran KUR berdasarkan Wilayah di Prov. Sulawesi Barat TA 2018

No	Kabupaten	Realisasi Penyaluran KUR			Rata-Rata Per Debitur (Rp.)
		Akad (Rp.)	Oustanding (Rp.)	Debitur	
1	Kab. Mamuju Utara	242.892.226.000	191.028.992.008	4.731	51.340.568
2	Kab. Mamuju	212.626.700.000	162.083.670.671	6.879	30.909.536
3	Kab. Mamasa	45.455.000.000	35.084.959.921	2.164	21.005.083
4	Kab. Polewali Mandar	226.304.951.205	170.071.017.545	9.287	24.367.928
5	Kab. Majene	68.530.900.000	49.528.873.933	4.165	16.453.998
6	Kab. Mamuju Tengah	23.298.000.000	20.321.145.541	170	137.047.059
Jumlah		**819.107.777.205**	**628.118.659.619**	**27.396**	

Sumber: SIKP, 2019 (diolah)

Penyaluran KUR menurut skema perbankan di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 didominasi oleh penyaluran KUR Mikro. KUR Mikro diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25 juta setiap individu atau perseorangan. Sedangkan KUR Ritel/Kecil diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah di atas Rp25 juta dan paling banyak Rp500 juta. KUR Penempatan TKI diberikan kepada penerima KUR paling banyak Rp25 Juta.

Tabel 2.16 Penyaluran KUR per Skema di Prov. Sulawesi Barat TA.2018

Bank	Realisasi Penyaluran KUR			
	Akad (Rp.)	Oustanding (Rp.)	Debitur	Rata-Rata Per Debitur (Rp.)
MIKRO - BRI	418.663.700.000	310.706.346.671	22.553	18.563.548
MIKRO - Bank Mandiri	6.104.000.000	4.616.309.426	317	19.255.521
MIKRO - BNI	1.555.000.000	1.105.330.247	65	23.923.077
MIKRO - Bank Arta Graha	25.000.000	18.572.385	1	25.000.000
MIKRO - BPD Sulselbar	7.899.000.000	5.467.489.153	361	21.880.886
MIKRO - BRI Syariah	15.000.000	9.352.515	1	15.000.000
Jumlah KUR MIKRO	**434.261.700.000**	**321.923.400.397**	**23.298**	**18.639.441**
RITEL - BRI	59.085.000.000	47.200.153.718	271	218.025.830
RITEL - Bank Mandiri	220.344.181.000	193.244.586.769	1.883	117.017.621
RITEL - BNI	82.725.000.000	51.392.764.196	336	246.205.357
RITEL – BPD Sulselbar	16.905.000.000	13.340.045.205	81	208.703.704
RITEL - BTN	1.190.000.000	414.740.561	3	396.666.667
Jumlah KUR RITEL	**380.249.181.000**	**305.592.290.449**	**2.574**	**147.726.955**
TKI – BRI	95.000.000	69.425.120	19	18.151.205
TKI - BNI	18.151.205	-	1	14.745.000
TKI - Bank Arta Graha	14.745.000	3.344.012	1	6.090.295
Jumlah TKI	**127.896.205**	**72.769.132**	**21**	**6.090.295**
Ultra Mikro (UMi)	**4.469.000.000**	**530.199.641**	**1.503**	**2.973.387**
Jumlah	**819.107.777.205**	**628.118.659.619**	**27.396**	**29.898.809**

Sumber: SIKP, 2019 (diolah)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Sulawesi Barat memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, UMKM sering menghadapi kendala diantaranya kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka.

Grafik 2.11 Penyaluran KUR Menurut Skema di Prov. Sulawesi Barat Tahun 2018 (dalam miliar Rp)

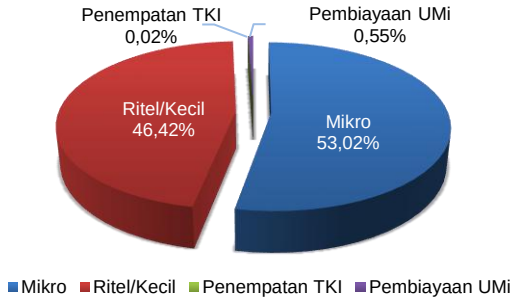

Sumber: SIKP, 2019 (diolah

Pada tahun 2017 pemerintah meluncurkan skema pembiayaan baru untuk segmen usaha mikro yaitu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dengan *plafond* pembiayaan maksimum Rp10 juta per nasabah dan disalurkan tidak oleh perbankan melainkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Realisasi Pembiyaan Ultra Mikro di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 adalah sebesar Rp4.47 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 1.503 debitur. Dengan adanya KUR dan Pembiayaan UMi di Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

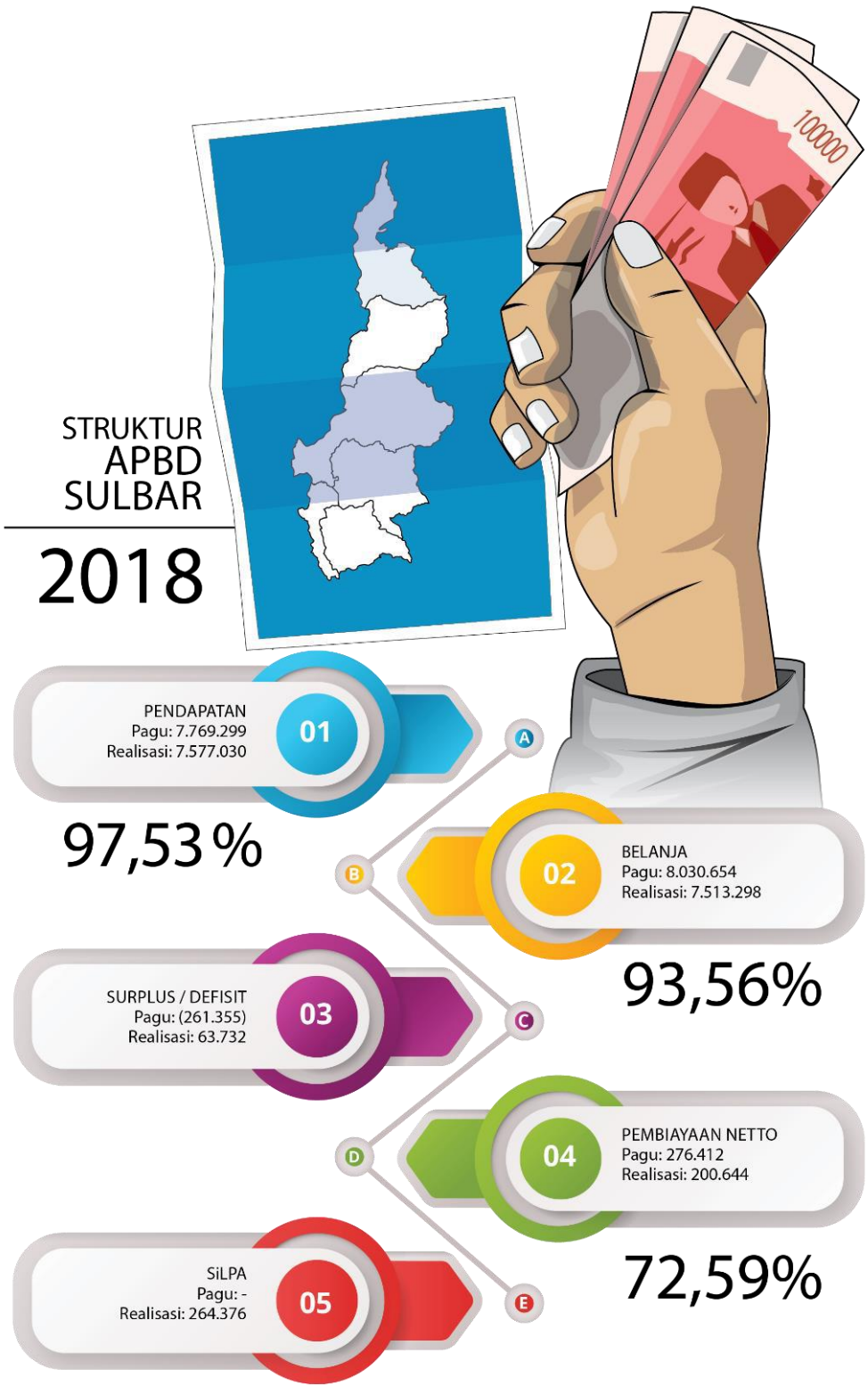

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

3.1 APBD TINGKAT PROVINSI

APBD merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di daerah, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan dan membuka lapangan pekerjaan. Pada tahun 2018 ekonomi Sulawesi Barat tumbuh sebesar 6,23 persen (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun pada beberapa indikator makro lainnya seperti pengangguran, kemiskinan secara absolut dan *Gini Ratio* justru mengalami peningkatan. Pengelolaan APBD secara produktif pada upaya peningkatan lapangan pekerjaan, serta pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan Pemda lingkup Sulawesi Barat di tahun mendatang.

Selain itu, APBD juga sebagai alat untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sebagaimana telah diidentifikasi dalam RKPD Provinsi Sulawesi Barat 2018, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah telah mengacu pada arah kebijakan dalam RKP Tahun 2018 yang telah digariskan pada RPJMN Tahun 2005-2025. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sinergitas antara kebijakan pusat dan daerah.

Tabel 3.1 Profil APBD Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (dalam miliar Rupiah)

Uraian	2017			2018*)		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pendapatan	7.369.307	7.628.298	103,51%	7.769.298	7.577.030	97,53%
PAD	854.820	805.497	94,23%	813.013	696.851	85,71%
Pendapatan Transfer	5.967.187	6.260.708	104,92%	6.364.191	6.270.703	98,53%
Dana Desa	461.095	460.819	99,94%	472.183	471.878	99,94%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	86.205	101.274	117,48%	119.911	137.598	114,75%
Belanja	8.093.789	7.642.119	94,42%	8.030.604	7.513.299	93,56%
Belanja Operasi	5.023.429	4.769.696	91,07%	5.194.151	4.906.331	88,69%
Belanja Modal	2.171.389	1.977.588	91,07%	1.871.372	1.659.658	88,69%
Belanja Tak Terduga	4.016	935	23,29%	6.522	4.157	63,74%
Transfer Pemerintah Daerah	894.955	893.901	99,88%	958.559	943.152	98,39%
Surplus / Defisit	(263.387)	(13.822)	5,25%	(261.355)	(263.387)	100,78%
Pembiayaan Netto	292.980	218.115	74,45%	352.896	276.412	78,33%
Penerimaan Pembiayaan	**278.183**	**206.332**	**74,17%**	**314.654**	**238.528**	**75,81%**
Pengeluaran Pembiayaan	**14.797**	**11.783**	**79,63%**	**38.242**	**37.884**	**99,06%**

Sumber : Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)
*Keterangan: *) Data sementara (Penyajian Data APBD An Audited Tahun 2018 per tanggal 8 Februari 2019)*

Alokasi dana transfer pemerintah pusat sangat mendominasi target pendapatan daerah di Sulawesi Barat. Kondisi ini dipertegas oleh penurunan alokasi transfer DAK Fisik sebesar Rp129,4 miliar atau 13,38 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp19,2 miliar atau 15,57 persen di tahun 2018, sehingga target pendapatan daerah turun menjadi 0,78 persen dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 3.1 Proporsi Target Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan

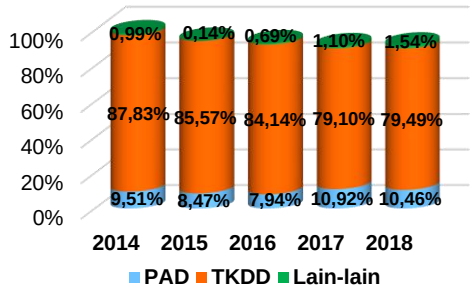

Sumber : Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Menurunnya target pada lain-lain PAD yang sah hingga 20,36 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,43 persen berdampak pada kurangnya proporsi target PAD terhadap total pendapatan hingga 0,45 persen (*yoy*). Hal tersebut mengindikasikan penurunan tingkat kemandirian daerah di tahun 2018.

Berkurangnya alokasi belanja modal menyebabkan menurunnya pagu total belanja daerah di Sulbar tahun 2018.

Grafik 3.2 Tren Kenaikan Alokasi Belanja Operasi dengan Defisit Anggaran

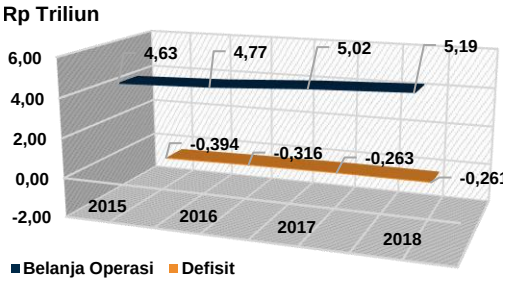

Sumber : Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Berkurangnya alokasi belanja modal sebesar 13,82 persen menyebabkan menurunnya pagu total belanja daerah sebesar 0,78 persen (*yoy*). Hal tersebut memicu kenaikan proporsi belanja operasi 2,61% dan transfer pemerintah daerah 0,88%. Hal ini mempertegas bahwa agregat belanja daerah Sulawesi Barat tahun 2018 sebagian besar masih digunakan untuk belanja operasional.

Peningkatan proporsi belanja operasi berdampak pada turunnya perkiraan defisit anggaran dalam empat tahun terakhir. Di tahun 2018 proporsi belanja operasi meningkat hingga 2,61% dari tahun sebelumnya sehingga berdampak pada turunnya perkiraan defisit APBD sebesar 0,77%.

Sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut berasal dari SiLPA TA sebelumnya sebesar Rp299,59 miliar. Selebihnya berasal dari penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp85,90 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp56,94 miliar. Selanjutnya dari total pengeluaran pembiayaan, 44,58% diantaranya dialokasikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah dan selebihnya untuk pembayaran pokok utang.

3.2 JENIS PENDAPATAN DALAM APBD

Pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah di Sulawesi Barat mengalami penurunan 0,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan karena pada 2 (dua) kelompok pendapatan utama yaitu PAD turun 13,49 persen dan Dana Perimbangan turun 16,37 persen. Sedangkan realisasi pendapatan lain-lain yang sah menunjukkan peningkatan 35,87 persen karena adanya realisasi hibah yang melebihi target.

Pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah di Sulawesi Barat mengalami penurunan 0,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 Jenis Pendapatan APBD di Provinsi Sulawesi Barat (dalam Rp juta)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018*)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PAD	854.820	805.497	813.013	696.851
Pajak Daerah	330.610	326.817	362.372	347.316
Retribusi Daerah	102.964	86.548	110.372	81.416
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	26.752	23.357	26.103	22.978
Lain-Lain PAD yang Sah	394.494	368.775	314.166	245.142
Pendapatan Transfer	6.428.282	6.260.708	6.364.191	6.270.703
Dana Perimbangan	6.000.683	5.914.463	5.959.104	5.902.216
Dana Bagi Hasil	123.815	106.049	104.533	88.687
Dana Alokasi Umum	4.198.361	4.192.852	4.224.888	4.224.888
Dana Alokasi Khusus Fisik	967.671	932.315	838.193	826.629
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	710.836	683.246	791.490	762.011
Non Dana Perimbangan	192.842	166.173	216.545	190.500
Transfer Dana Lainnya	192.842	166.173	216.545	190.500
Transfer Pemerintah Daerah	234.757	180.073	188.542	177.987
Bagi Hasil Pajak	189.607	132.347	144.092	141.537
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	45.150	47.726	44.450	36.450
Dana Desa	461.095	460.819	472.183	471.878
Pendapatan lain-lain daerah yang sah	86.205	101.274	119.911	137.598
Pendapatan Hibah	33.029	49.575	114.663	135.558
Dana Darurat	-	500	-	-
Pendapatan Lainnya	53.176	51.198	5.249	2.040
JUMLAH PENDAPATAN	7.830.401	7.628.298	7.769.299	7.577.030

Sumber : Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)
*Keterangan: *) Data sementara*

Berdasarkan tabel di atas, proporsi realisasi PAD terhadap total pendapatan Sulbar tahun 2018 mencapai 9,20 persen, Dana Perimbangan 77,90 persen serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,82 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, terjadi peningkatan ketergantungan kepada pemerintah pusat sebesar 0,69 persen.

Grafik 3.3 Rasio PAD terhadap PDRB Sulbar

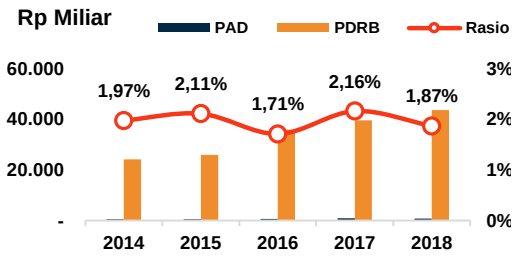

Sumber : Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Selanjutnya jika melihat rasio PAD terhadap PDRB, terdapat penurunan 0,29 persen dari rasio tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan kontribusi perekonomian yang tumbuh 6,23 persen pada tahun 2018 belum berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD.

Potensi PAD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat cukup tinggi karena wilayahnya kaya akan sumber daya alam yang begitu melimpah mulai dari sektor agraris, pertambangan dan pariwisata. Penurunan rasio PAD terhadap PDRB juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah, karena hal ini menunjukan penurunan kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan PAD.

Grafik 3.4 Rasio Kemandirian Daerah Sulbar

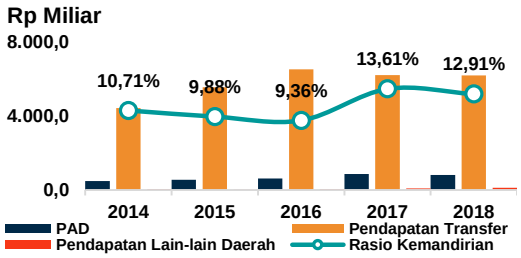

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Sementara jika dianalisis dari kemampuan PAD terhadap belanja pemerintah daerah, menunjukkan bahwa kontribusi PAD untuk membiayai belanja daerah hanya mencapai 9,27 persen, turun 1,27 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kemandirian pemerintah daerah. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mendongkrak pendapatan daerahnya, terutama pada sektor pariwisata. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan menggelar pemilihan duta wisata dari komunitas milenial untuk kegiatan promosi wisata melalui media sosial.

Apabila dibandingkan antar pemda, maka tingkat kemandirian tertinggi diraih oleh Pemprov Sulbar dengan penopang utama dari penerimaan pajak daerah yang sah, khususnya dari penerimaan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Capaiannya bahkan mendominasi 36,34 persen dari total penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, Kabupaten Mamasa merupakan daerah dengan tingkat kemandirian fiskal terendah. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi geografis daerah Mamasa yang didominasi dataran tinggi dan kawasan hutan serta terjadinya gempa bumi di tahun 2018.

Grafik 3.5 Rasio Kemandirian Daerah Sulbar per Kabupaten

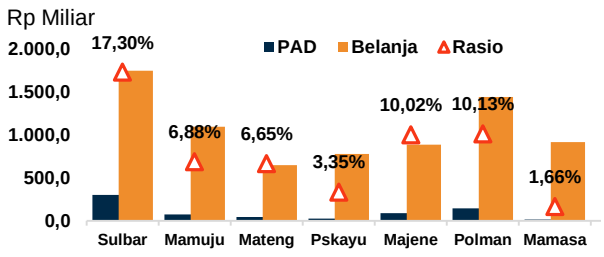

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Infrastruktur pendukung utama di Mamasa seperti jalan mengalami kerusakan cukup berat, khususnya jalan penghubung antar kecamatan dan desa sehingga kontribusi terhadap PDRB Sulbar hanya 7,16 persen. Kemudian kontribusi pajak dan retribusi daerah hanya 0,62 persen, sementara pendapatan dari dana perimbangan mencapai 84,31 persen dari total pendapatan daerahnya.

Jika dikaitkan dengan komponen penyumbang, pajak daerah menjadi kontributor terbesar PAD di Sulbar dengan sumbangan sebesar 49,84 persen, meningkat 6,27 persen dari pencapaian tahun sebelumnya. Penerimaan terbesar pajak kabupaten berasal dari jenis pajak penerangan jalan dengan realisasi mencapai Rp32,25 miliar, meningkat 13,91 persen dari tahun 2017. Peningkatan pajak jenis ini berkorelasi positif dengan laju pergerakan PDRB dari sektor pengeluaran pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 7,19 persen. Kota Mamuju memberikan kontribusi pajak penerangan jalan terbesar hingga 35,93 persen. Hal tersebut berkorelasi dengan tingginya arus urbanisasi dan migrasi masuk (PNS vertikal, Anggota TNI/Polri Sulbar).

Grafik 3.6 Realisasi Jenis PAD per Pemda Tahun 2018

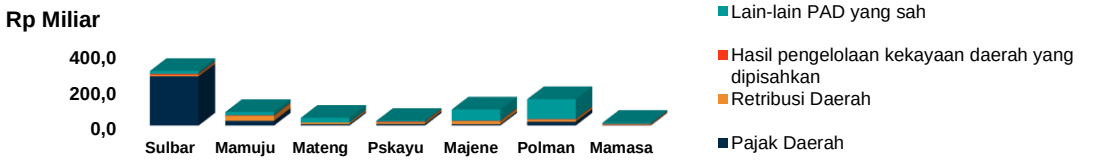

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Untuk jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, penerimaan terbesar berasal dari pajak rokok dengan kontribusi sebesar 31,39 persen dari total realisasi pajak daerah. Kinerja pendapatan retribusi daerah turun hingga 5,93 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dipicu oleh turunnya kontributor terbesar dari retribusi jasa umum hingga 15,15 persen. Meskipun demikian, penerimaan dari retribusi daerah mencapai 73,76 persen dan berkontribusi 11,68 persen terhadap total PAD. Penerimaan retribusi didominasi dari pendapatan retribusi jasa umum dengan proporsi hingga 80,12 persen dari total realisasi retribusi daerah. Progres tersebut bergerak sejalan dengan laju pertumbuhan PDRB dari sektor jasa kesehatan yang tumbuh sebesar 7,43 persen.

Penerimaan retribusi dari sektor lain masih menyediakan potensi yang cukup besar bagi pendapatan daerah namun belum digarap secara optimal. Salah satunya retribusi parkir tepi jalan umum yang selama ini belum dilakukan secara tertib, padahal potensinya cukup besar mengingat jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat 7,46 persen dalam dua tahun terakhir. Dan diprediksi jumlah penjualan dari kendaraan bermotor akan terus meningkat di tahun 2019 ± 1.000 unit.

Komponen PAD lainnya yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD berasal dari penerimaan lain-lain PAD yang Sah dengan proporsi mencapai 35,18 persen. Terdapat penurunan sebesar 33,53 persen (*yoy*) yang diakibatkan lambatnya penerimaan dari klaim BPJS RSUD pada sejumlah di Polewali Mandar, Mamuju, dan Pasangkayu. Hal tersebut tidak lepas dari berlakunya sistem pembayaran tagihan klaim BPJS yang

terpusat. Sementara itu penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan sumbangsih paling minim. Laba yang berasal dari penyertaan modal pada BUMD/perusda hanya berkontribusi 3,30 persen.

3.3 JENIS BELANJA DALAM APBD

Pada tahun 2018 realisasi belanja dan transfer pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat mencapai Rp7,51 triliun (93,56 persen) dari alokasi sebesar Rp8,03 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp4,91 triliun (94,46 persen), Belanja Modal Rp1,66 triliun (88,69 persen), Transfer Pemerintah Daerah Rp943,15 miliar (98.39 persen) dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4,16 miliar (63,74 persen).

Pada tahun 2018 realisasi belanja dan transfer pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat mencapai Rp7.513.299 juta (93,56 persen)

3.3.1 Rincian Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Tabel 3.3 Profil APBD Berdasarkan Klasifikasi Urusan di Provinsi Sulawesi Barat (dalam Rp juta)

Kode	Urusan	Pagu 2017	Pagu 2018*)
01	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**		
01.1.01	Pendidikan	1.490.929	1.631.939
01.1.02	Kesehatan	1.080.805	1.047.486
01.1.03	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.453.610	1.172.454
01.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	64.460	79.882
01.1.05	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyrakat	75.113	80.235
01.1.06	Sosial	40.105	41.404
01.2.04	Pertanahan	46.214	76.094
01.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	40.477	38.338
02	**Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar**		
02.2.01	Ketenagakerjaan	27.860	25.630
02.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34.139	30.702
02.2.03	Ketahanan Pangan	39.465	34.545
02.2.05	Lingkungan Hidup	85.692	59.343
02.2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	34.872	40.451
02.2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	38.170	30.956
02.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40.502	51.856
02.2.09	Perhubungan	52.605	41.028
02.2.10	Komunikasi dan Informatika	38.595	41.848
02.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.818	20.124
02.2.12	Penanaman Modal	30.525	30.422
02.2.14	Statistik	357	212
02.2.16	Kebudayaan	12.266	17.109
02.2.17	Perpustakaan	15.872	21.203
02.2.18	Kearsipan	3.945	4.022
02.4.02	Pariwisata	32.677	34.425
02.4.04	Perdagangan	30.880	44.879
02.4.05	Kehutanan	28.657	40.957
02.4.06	Energi dan Sumber Daya Mineral	25.607	28.045
02.4.07	Perindustrian	15.763	14.787
02.4.08	Ketransmigrasian	18.433	20.117
03	**Urusan Penunjangan Pemerintahan**		
03.3.01 - 10	Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan lainnya	2.884.991	2.938.920
04	**Urusan Pemerintah Pilihan**		
04.4.01	Kelautan & Perikanan	72.391	70.874
04.4.03	Pertanian	211.992	220.366
	Jumlah	**8.093.788**	**8.030.654**

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)
*Keterangan: *) Data Sementara*

Berdasarkan tabel diatas, secara nominal alokasi belanja bidang Pendidikan naik sebesar 9,46 persen (*yoy*). Kenaikan tersebut dipicu adanya program prioritas nasional berupa peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan menengah dan luar biasa. Sementara itu, alokasi belanja bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berkurang hingga Rp281,15 miliar akibat berkurangnya alokasi transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2018 sebesar 13,38 persen (*yoy*).

Pada tahun 2018 bidang Administrasi Pemerintahan mendapat alokasi belanja terbesar 36,60 persen

Berdasarkan porsinya, bidang Administrasi Pemerintahan mendapat alokasi belanja terbesar 36,60 persen. Diikuti oleh alokasi bidang Pendidikan sebesar 20,32 persen, Kesehatan 13,04 persen, dan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 14,60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja APBD di Sulbar menitikberatkan pada pelayanan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur untuk menunjang program pemerintah dan mengakselerasi pertumbuhan perekonomian.

3.3.2 Rincian Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja (Sifat Ekonomi)

Pagu belanja APBD Sulbar tahun 2018 turun dibandingkan tahun 2017 yang disebabkan oleh penurunan pagu Belanja Modal 16,60 persen.

Berdasarkan jenis belanja umum, pagu belanja APBD Sulbar tahun 2018 turun dibandingkan tahun 2017 yang disebabkan oleh penurunan pagu Belanja Modal 16,60 persen (*yoy*) sehingga berimbas pada Belanja APBD secara agregat meskipun pada komponen pagu Belanja Operasi meningkat 2,86 persen.

Tabel 3.4 Profil APBD Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat (dalam juta rupiah)

Uraian	2017			2018*)		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
BELANJA + TRANSFER PEMDA	8.093.788	7.642.119	94,42%	8.030.654	7.513.299	93,56%
BELANJA OPERASI	5.023.429	4.769.695	94,95%	5.194.151	4.906.331	94,46%
Belanja Pegawai	2.555.708	2.422.099	94,77%	2.622.504	2.557.938	97,54%
Belanja Barang	1.930.732	1.840.675	95,34%	2.107.618	1.911.020	90,67%
Belanja Bunga	12.962	11.927	92,01%	19.808	18.500	93,40%
Belanja Hibah	457.316	430.935	94,23%	408.801	384.932	94,16%
Belanja Bantuan Sosial	66.711	64.059	96,02%	35.420	33.941	95,82%
BELANJA MODAL	2.171.389	1.977.588	91,07%	1.871.372	1.659.658	88,69%
BELANJA TAK TERDUGA	4.016	935	23,29%	6.522	4.157	63,74%
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	894.955	893.901	99,88%	958.609	943.152	98,39%
Transfer Dana Desa	461.095	461.095	100,00%	471.878	471.878	100,00%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda/Desa	293.438	292.743	99,76%	294.382	292.481	99,35%
Transfer Bagi Hasil Pajak	135.635	135.277	99,74%	146.308	141.086	96,43%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4.786	4.786	100,00%	46.040	37.707	81,90%

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Berdasarkan kinerjanya, belanja operasi mengalami peningkatan 2,86 persen yang didorong oleh naiknya realisasi belanja pegawai 5,61 persen dan belanja barang 3,82 persen sebagai dampak dari pertambahan jumlah formasi CPNS Daerah di lingkungan pemda di tahun 2018. Sementara itu, realisasi belanja modal turun hingga 16,08 persen yang disebabkan lambatnya serapan di hampir seluruh komponen belanja modal.

Proporsi terbesar belanja modal 52,16 persen dari belanja jalan, irigasi dan jaringan realisasinya merosot hingga 16,64 persen karena disebabkan oleh faktor pembebasan lahan yang sering menimbulkan konflik sosial dilokasi pembangunan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan dari sisi transfer pemerintah daerah mengalami kenaikan sebesar 5,51 persen sebagai dampak meningkatnya transfer Dana Desa hingga 2,40 persen di Sulbar.

Grafik 3.7 Proporsi Realisasi Belanja Modal

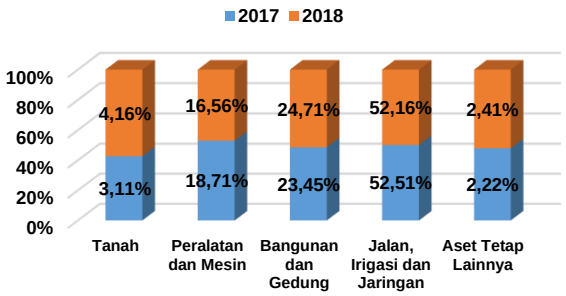

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Berdasarkan porsinya, secara umum realisasi di beberapa komponen belanja daerah mengalami peningkatan 0,58 persen. Kenaikan porsi realisasi tertinggi terdapat pada belanja operasi 2,89 persen. Sementara itu, porsi realisasi belanja modal turun 3,79 persen yang disebabkan oleh seretnya penyerapan dari kontributor terbesar belanja modal yaitu belanja jalan, jembatan dan irigasi yang realisasinya merosot hingga 6,96 persen dari tahun sebelumnya.

APBD tahun 2018 proporsi dana DAU terbesar digunakan untuk belanja pegawai 31,10 persen, belanja barang 26,06 persen dan hanya 5,42 persen untuk belanja modal.

Berdasarkan alokasi sumber dana perimbangan, secara umum dana DAU menyentuh pada seluruh komponen realisasi belanja daerah. Sedangkan proporsi dana DAU terbesar digunakan untuk belanja pegawai 31,10 persen, belanja barang 26,06 persen dan hanya 5,42 persen untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa dana DAU sebagian besar (± 50 persen) masih digunakan untuk keperluan operasional pemerintahan dan pelayanan umum.

Grafik 3.8 Proporsi Pengunaan Dana Perimbangan (Miliar Rupiah)

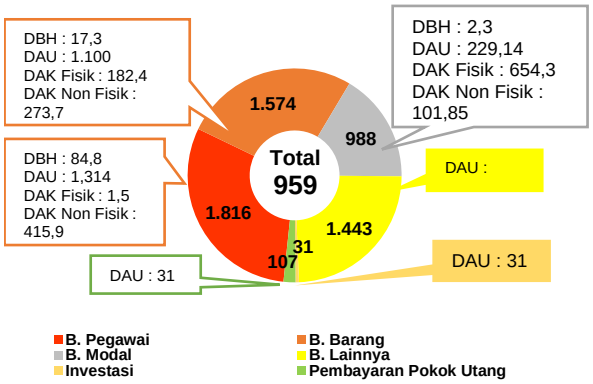

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Ke depan, pemda harus berupaya dalam mengoptimalkan dana perimbangan untuk dua tugas penting Pertama, mengelola APBD secara efisien, tepat kualitas, dan menghasilkan dampak positif; Kedua, menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi untuk bisa ditanamkan di daerah masing-masing sehingga membuka lebih banyak kesempatan kerja.

3.4 PENGELOLAAN BLU DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, ditegaskan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam hal ini, tujuan pemerintah daerah menerapkan pola keuangan BLUD pada puskesmas adalah peningkatan pelayanan dan kinerja institusi pelayanan publik.

3.4.1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah

Sampai dengan tahun 2018, Sulbar memiliki beberapa SKPD/UPT yang terdiri dari tujuh unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 95 unit Puskesmas. Namun, hanya dua unit RSUD yang sudah berstatus BLUD. Salah satu kendala RSUD/puskesmas yang lain masih belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD karena pendapatan jasa kesehatan dari RSUD dinilai memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD di kas daerah, dan apabila telah menjadi BLUD maka riil uang/pendapatannya tidak lagi masuk ke dalam kas daerah namun masuk dalam kas BLUD sehingga berdampak pada menurunnya PAD di daerah tersebut.

Pendapatan jasa kesehatan dari RSUD dinilai memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD di kas daerah Sulbar.

Tabel 3.5 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah 2018* (dalam rupiah)

No	Jenis Layanan	Satker BLUD	Nilai Aset	Pagu PNBP BLU	Pagu RM	Jumlah Pagu
1	Kesehatan	RSUD Polman	265.476.399.727	76.858.845.065	250.000.000	77.108.845.065
2	Kesehatan	RSUD Majene	103.497.779.215	30.897.328.270	23.165.013.280	54.062.341.550

Sumber : Data BLUD Sulbar; Keterangan: (*) Data Sementara

Dari profil diatas, dapat diketahui bahwa komposisi pagu yang paling mencerminkan kemandirian BLUD adalah RSUD Polewali Mandar (Polman) dengan proporsi pagu PNBP 99,68 persen dari total pagu. Sementara itu komposisi pagu PNBP pada RSUD Majene hanya sebesar 57,15 persen dari total pagu. Pagu PNBP pada RSUD BLUD sebesar 44 persen digunakan untuk pembayaran jasa medis dan 56 persen digunakan untuk operasional RSUD (40 persen untuk obat, BHP kedokteran, konsumsi pasien, 12 persen untuk pelatihan, dan 48 persen untuk pemeliharaan sarpras).

Tingginya proporsi PNBP pada RSUD Polman didorong oleh meningkatnya rata-rata kunjungan pasien rawat inap 8,85 persen dan rawat jalan 21,32 persen serta pendapatan klaim BPJS 12,8 persen. Selanjutnya, RSUD Polman memiliki total aset lebih besar dari RSUD Majene karena status / tipe rumah sakit yang berbeda. RSUD Polewali Mandar berstatus Rumah Sakit Rujukan dengan fasilitas layanan kesehatan lebih lengkap, sementara RSUD Majene baru berstatus Rumah Sakit Klas C.

Grafik 3.9 Tren Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Polewali Mandar (per hari)

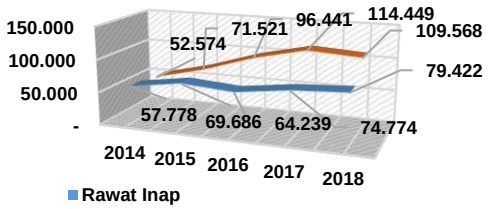

Sumber : BLUD RSUD Polewali Mandar (data diolah)

3.4.2 Perkembangan Pengelolaan Aset, PNBP, dan RM BLU Daerah

Tabel 3.6 Perkembangan Pengelolaan Aset BLU Daerah (dalam rupiah)

No	Nama Satker BLUD	Aset 2017	Aset 2018*)
1	RSUD Polman	225.131.823.987	265.476.399.727
2	RSUD Majene	71.041.625.009	103.497.779.215

Sumber : Data BLUD Sulbar; Keterangan: (*) Data Sementara

Pertumbuhan Aset RSUD BLUD di Sulbar didorong oleh dana DAK Fisik Tahun 2018 dan PNBP

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa peningkatan nominal aset terbesar terjadi pada RSUD Majene mencapai 45,69 persen, sementara pada RSUD Polman meningkat 17,92 persen. Peningkatan nilai aset pada RSUD Majene sebesar Rp32,4 miliar didorong oleh belanja modal dari DAK Fisik senilai Rp6,7 miliar dan selebihnya dari PNBP senilai Rp25,7 miliar. Sementara itu peningkatan aset pada RSUD Polman sebesar Rp40,3 miliar didorong oleh belanja modal dari DAK Fisik senilai Rp38,5 miliar dan sisanya senilai Rp1,7 miliar dari PNBP.

Perkembangan pagu PNBP dan RM BLUD pada RSUD Polewali Mandar dan RSUD Majene tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7 Perkembangan Pagu PNBP dan Pagu RM Satker BLU Daerah (dalam rupiah)

No	Nama Satker BLUD	2017		2018*)	
		Pagu RM	Pagu PNBP	Pagu RM	Pagu PNBP
1	RSUD Polman	576.190.000	84.426.246.650	250.000.000	76.858.845.065
2	RSUD Majene	54.618.006.748	28.836.448.796	23.165.013.280	30.897.328.270

Sumber : Data BLUD Sulbar; Keterangan: (*) Data Sementara

Pembayaran klaim BPJS menjadi salah satu penyumbang pendapatan PNBP pada RSUD. Pada tahun 2018 pagu PNBP pada RSUD Majene meningkat 7,15 persen karena adanya pembayaran klaim BPJS di akhir tahun dan layanan kesehatan baru yaitu poli paru-paru. Meskipun demikian, 42,85 persen belanja pembangunan/rehab gedung dan pengadaan alkes/BHP kedokteran di RSUD Majene masih ditopang dari APBD 2018. Sementara itu, pagu PNBP pada RSUD Polman menurun 8,96 persen karena terjadi pembayaran klaim BPJS kuartal 4 belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun 2018.

Lebih lanjut, jenis layanan kesehatan dasar yang berkontribusi besar terhadap penerimaan PNBP kedua RSUD tersebut adalah dari poli penyakit dalam, poli bedah, poli kandungan dan poli anak. Selain itu, pendapatan temporer RSUD tahun 2018 dari cek kesehatan dan bebas narkoba bagi calon legislatif (DPR, DPRD). Dalam rangka mendorong meningkatkan PNBP RSUD BLUD, pemerintah daerah dapat mempedomani Permenkes Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan. Kerjasama Operasional (KSO) Pemanfaatan Barang Milik Negara dan BLUD dengan pihak ketiga untuk mendapatkan bagi hasil keuntungan yang wajar dan proporsional.

3.4.3 Analisis Legal

a. **Aspek legal Kelembagaan** yaitu dalam hal perubahan struktur kelembagaan. Berdasarkan PP 23/2005 pasal 31 dan Permendagri No 61/2007 pasal 21 yang menyebutkan bahwa penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, penetapan status BLUD pada satker-satker BLUD di wilayah Sulawesi Barat ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah (Bupati).

b. **Aspek legal Tata Kelola** yaitu pola tata kelola yang antara lain mencantumkan struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelompokan sumber daya manusia. Prinsip Tata Kelola pada satker satker BLUD di wilayah Sulawesi Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati terkait Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penetapan tersebut telah sinkron dengan PP 23/2005 Bab VI pasal 31 s.d pasal 33 dan Permendagri No 61/2007 Bab IV, pasal 31 s.d pasal 42.

c. **Aspek legal SDM** yaitu pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD. Sejalan dengan PP 23/2005 pasal 33 dan Permendagri No 61/2007 pasal 40 s.d 42, untuk wilayah Sulbar pedoman pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS ditetapkan oleh Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS Pada BLUD. pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD. Sejalan dengan PP No 23/2005 pasal 33 dan Permendagri No 61/2007 pasal 40 s.d 42.

d. **Aspek legal Pengendalian** yaitu dalam hal pembinaan teknis BLUD serta pembentukan dewan pengawas. SKPD BLUD di wilayah Sulbar mempunyai Dewan Pengawas dan yang ditetapkan oleh Bupati masing-masing kabupaten. Penetapan tersebut telah sinkron dengan PP 23/2005 pasal 34 dan Permendagri No 61/2007

pasal 43 s.d 49. dalam hal pembinaan teknis BLUD serta pembentukan Santuan Pemeriksa Internal (SPI) dan Dewan Pengawas.

Tabel 3.8 Analisi Legal Aspek Pengelolaan BLU Daerah di Provinsi Sulawesi Barat

No	Aspek	PP nomor 23/2005 jo PP nomor 74/2012	Permendagri nomor 61/2007	Peraturan Bupati
1.	Kelembagaan	Pasal 31	Pasal 21	• Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/440/479/HUK tanggal 24 Oktober 2014 tentang Perubahan Status Bertahap menjadi Pengelolaan Pola Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dengan Status Penuh. • Keputusan Bupati Majene Nomor 1199/HK/KEP-BUP/IV/20147 tanggal 3 April 2014 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh pada RSUD Majene.
2.	Tata Kelola	Pasal 31 s.d 33	Pasal 31 s.d 42	• Perbup Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum • Perda Kab. Majene Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja RSUD Majene.
3.	SDM	Pasal 33	Pasal 40 s.d 42	• Perbup Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum • Perda Kab. Majene Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja RSUD Majene. • Keputusan Bupati Majene 1479/HK/KEP-BUP/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS RSUD Majene Tahun 2017
4.	Pengendalian	Pasal 34	Pasal 33 s.d 39	• Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Polewali • Perda Kab. Majene Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja RSUD Majene.

Sumber: RSUD Polman dan RSUD Majene (diolah)

3.5 PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

3.5.1 Bentuk Investasi Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 Tentang Investasi Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian suat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Bentuk Investasi daerah dalam hal ini berupa penyertaan modal daerah. Selain berupa uang, penyertaan modal juga berupa kendaraan ataupun peralatan. Bentuk investasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat, dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Perkembangan Investasi Daerah di Provinsi Sulawesi Barat

No	Bentuk Investasi	Investasi s.d. TA 2017	Realisasi TA. 2018	Total Investasi TA. 2018
1.	Penyertaan Modal Pemda pada PDAM	34.225.747.859		34.225.747.859
2.	Penyertaan Modal Pemda pada Bank Sulselbar	70.596.293.493	16.750.000.000	87.346.293.493
3.	Penyertaan Modal Pemda pada Perusda	1.987.216.278		1.987.216.278
4.	Dana Bergulir	19.069.045.114		19.069.045.114
	Jumlah Investasi	**125.878.302.744**	**16.750.000.000**	**142.628.302.744**

Sumber : LHP Perwakilan BPK Sulbar 2017, LRA Pemda se-Sulbar (data diolah)

Investasi pemerintah daerah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah dalam jangka panjang dengan tujuan mendapatkan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2018, anggaran penyertaan modal di Sulbar terealisasi sebesar Rp16,75 miliar (98,24 persen) yang ditanamkan pada Bank Sulselbar.

3.5.2 Profil dan Jenis Badan Usaha Milik Daerah

Tabel 3.10 Perkembangan Aset BUMD di Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama Satker BUMD	Aset 2017*)	Aset 2018*)
1.	PDAM Majene	14.790.742.244	20.054.565.877
2.	PDAM Polewali Mandar	42.369.267.778	46.129.168.185
3.	PDAM Mamuju	29.259.954.375	33.265.998.816

Sumber : BUMD Sulbar (data diolah)

BUMD di Provinsi Sulawesi Barat hanya terdapat pada sektor pelayanan air bersih yaitu pada PDAM majene, PDAM Polewali Mandar dan PDAM Mamuju yang bergerak di bidang perdagangan serta penyediaan air minum kepada masyarakat. Secara keseluruhan, total aset BUMD di Sulawesi Barat naik sebesar 15,08% atau Rp13,02 miliar.

3.6 SILPA DAN PEMBIAYAAN

Hingga akhir tahun 2018, SiLPA agregat yang terbentuk adalah sebesar Rp264,37 miliar, naik cukup tinggi 46,28 persen dari tahun sebelumnya yang dipicu oleh menurunnya realisasi belanja daerah hingga 1,69 persen. Sementara itu, pembiayaan *netto* mengalami kenaikan 3,13 persen yang dipicu oleh naiknya realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 15,60 persen. Kebijakan ekspansif dengan defisit anggaran yang ditujukan untuk menggerakkan perekonomian. Empat rasio berikut dapat digunakan untuk mengukur kebijakan defisit.

3.6.1 Perkembangan Surplus/Defisit APBD

3.6.1.1 Rasio Surplus/Defisit Terhadap Agregat Pendapatan

Grafik 3.10 Rasio Surplus/Defisit Terhadap Pendapatan

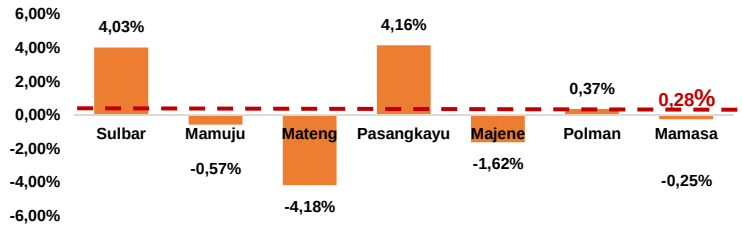

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Secara agregat pendapatan daerah pemda Sulawesi Barat masih dapat memenuhi kebutuhan belanja.

Rata-rata rasio surplus/defisit terhadap pendapatan di Sulawesi Barat 0,28 persen, turun 0,32 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa secara agregat pendapatan daerah pemda Sulawesi Barat masih dapat memenuhi kebutuhan belanja. Surplus terbesar terjadi di Pemkab Pasangkayu yang disebabkan kurang lancarnya serapan belanja hanya 92,13 persen dari pagu. Sebaliknya, defisit terendah terjadi di Pemkab Mamuju Tengah yang disebabkan oleh adanya gap yang cukup jauh antara proporsi pendapatan (42,81 persen) dibandingan proporsi belanja (50,00 persen) terhadap total APBD. Untuk menutup defisit anggarannya Pemkab Mamuju Tengah mengandalkan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan melakukan pinjaman daerah.

3.6.1.2 Rasio Surplus/Defisit Terhadap Realisasi Dana Transfer (Semester I)

Grafik 3.11 Rasio Surplus/Defisit Terhadap Dana Transfer Smt I

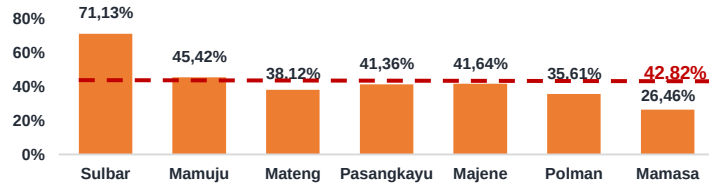

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Rata-rata rasio surplus/defisit terhadap realisasi dana transfer pada semester I Tahun 2018 adalah 42,82 persen, naik 10,86 persen dari tahun sebelumnya. Rasio tertinggi berada di pemda Pemprov Sulbar 71,13 persen sedangkan terendah berada di Pemkab Mamasa 26,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penggunaan dana transfer dalam realisasi belanja sampai dengan semester I masih sangat rendah sehingga terjadi *iddle cash* yang cukup tinggi. Diperlukan penyelarasan pola penyaluran dana transfer yang tepat terutama awal sampai dengan pertengahan tahun mengingat tren lonjakan realisasi belanja daerah baru akan terjadi pada kuartal ketiga.

3.6.1.3 Surplus/Defisit Terhadap PDRB

Rata-rata rasio surplus/defisit terhadap PDRB Sulawesi Barat tahun 2018 adalah 6,21 persen naik 7,54 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai -1,33 persen. Hal ini mencerminkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan pemda di Sulawesi Barat

dalam memproduksi barang/jasa untuk membiayai hutang yang terjadi akibat defisit anggaran pemerintah daerah.

3.6.1.4 Rasio SILPA Terhadap Alokasi Belanja

Grafik 3.12 Rasio SiLPA Terhadap Alokasi Belanja

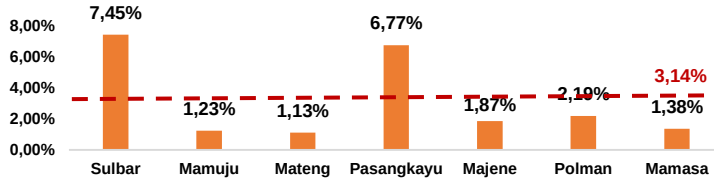

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Rata-rata rasio SiLPA terhadap Alokasi Belanja Sulawesi Barat tahun 2018 mencapai 3,14 persen, turun 0,65 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,79 persen. Rasio SiLPA terhadap belanja tertinggi ditempati oleh Pemprov Sulbar yang menandakan kecilnya serapan belanja yang digunakan secara efektif oleh pemerintah daerah tersebut. Komponen lain penyumbang tingginya rasio SiLPA terhadap belanja adalah dari besarnya realisasi SiLPA TA sebelumnya.

3.6.2 Pembiayaan Daerah

3.6.2.1 Keseimbangan Primer

Grafik 3.13 Rasio Keseimbangan Primer 2018

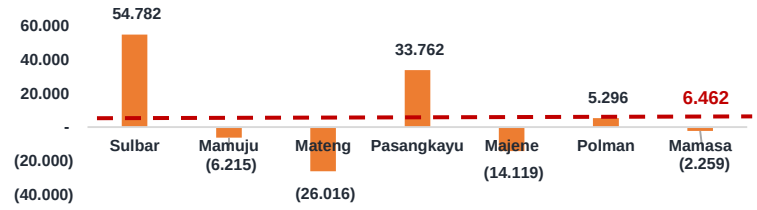

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Realisasi APBD di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 rata-rata mencapai Rp6,4 miliar. Sementara itu, Angka keseimbangan primer yang positif menunjukkan kondisi likuiditas yang relatif baik. Namun demikian perlu dicermati apakah hal tersebut diikuti dengan kualitas belanja yang baik. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga likuiditas fiskal pada posisi yang aman tapi tetap mengoptimalkan realisasi belanja daerahnya.

3.6.2.2 Rasio Pinjaman Daerah atau Obligasi Daerah Terhadap Total Pembiayaan

Pada tahun 2018 hanya Pemkab Mamuju Tengah yang merencanakan pinjaman dalam APBD-nya dan telah terealisasi 13,53 persen dari target pinjaman sebesar Rp85,9 miliar. Rasio pinjaman daerah tersebut terhadap total pembiayaannya mencapai angka 31,08 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Pemkab Mamuju Tengah cukup besar dalam melakukan pinjaman daerah. Perlu ditekankan kembali piutang pemerintah daerah atas pajak PBB dan Piutang Pendapatan dana Kapitasi JKN mencapai total Rp4,45 miliar.

3.7 ANALISIS LAINNYA

3.7.1 Analisis Realisasi APBD per Kabupaten di Sulbar

Tabel 3.11 Realisasi APBD TA 2018 per Pemda di Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Pemprov	Mamuju	Mateng	Pasangkayu	Majene	Polman	Mamasa
Pendapatan	**1.819.709**	**1.090.283**	**622.856**	**811.829**	**872.170**	**1.445.605**	**914.577**
PAD	302.216	75.398	43.145	26.086	88.812	145.970	15.225
Pendapatan Transfer	1.515.760	902.890	534.485	707.431	727.270	1.111.807	771.060
Dana Desa	-	70.315	45.226	48.436	53.384	130.070	124.447
LLPD	1.733	41.681	-	29.877	2.704	57.758	3.845
Belanja	**1.746.427**	**1.096.499**	**1.096.499**	**778.068**	**886.289**	**1.440.308**	**916.836**
Belanja Operasi	1.251.120	723.618	723.618	399.577	606.617	994.881	557.056
Belanja Modal	322.021	272.491	272.491	277.167	159.921	239.911	181.042
Belanja Tak Terduga	537	578	578	1.367	323	144	1.084
Transfer Pemda	172.749	99.811	99.811	99.957	119.428	205.372	177.655
Surplus/Defisit	**73.282**	**(6.215)**	**(473.642)**	**33.762**	**(14.119)**	**5.296**	**(2.259)**
Pembiayaan Netto	**56.886**	**19.755**	**33.320**	**18.876**	**30.651**	**26.287**	**14.868**

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman memiliki pendapatan tertinggi yang mencapai lebih dari Rp1 triliun, didukung oleh PAD yang juga tinggi. Sejalan dengan kondisi pendapatan tersebut, belanja terbesar juga direalisasikan oleh kedua pemda tersebut. Selanjutnya jika dilihat komposisi jenis belanja, proporsi realisasi belanja operasi pada pada seluruh pemda di Sulbar lebih besar dibandingkan realisasi belanja modalnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh pemda tersebut masih memprioritaskan pada belanja sektor konsumtif.

Proporsi realisasi belanja operasi pada pada seluruh Pemda lebih besar dibandingkan realisasi belanja modalnya.

Grafik 3.14 Porsi Pendapatan dan Belanja Daerah di Sulbar Tahun 2018

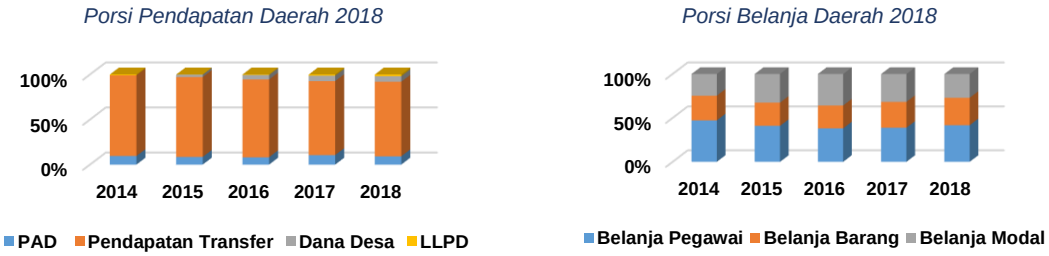

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Dari sisi pendapatan, kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah di Provinsi Sulbar masih sangat dominan (82,76 persen per tahun 2018) walaupun perkembangan kontribusi PAD (9,20 persen per tahun 2018) turun 1,36 persen dari tahun 2017. Dari sisi belanja, porsi belanja modal masih kecil (27,08 persen per 2017) dan dalam tren meningkat (2,40 persen per tahun 2014). Hal tersebut mencerminkan bahwa respon Pemerintah Daerah terhadap kebijakan penetapan prioritas pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat sudah cukup baik.

3.7.2 Analisis Kontribusi Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD di Sulbar

Tingginya porsi dana perimbangan di hampir seluruh Pemda menunjukkan ketergantungan terhadap dana perimbangan masih besar. Bahkan di tiga pemerintah daerah, yakni Pemkab Mamasa, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah porsinya diatas 90

Tingginya porsi dana perimbangan di hampir seluruh Pemda menunjukkan ketergantungan terhadap dana perimbangan masih besar. Bahkan tiga pemda di Sulbar porsinya diatas 90 persen

persen. Selain itu, kebijakan penguatan desentralisasi fiskal (melalui DAU dan DAK) juga menyebabkan tingginya sumbangan DAU di masing-masing Pemda. Di Pemda Mamasa, DAU bahkan menyumbang lebih dari setengah pendapatan karena kapasitas fiskalnya yang masih rendah. Untuk komponen DBH, Pemkab Pasangkayu sebagai daerah penghasil terbesar kelapa sawit di Sulbar (DBH PBB Perkebunan) memiliki porsi DBH yang paling tinggi.

Tabel 3.12 Analisis Vertikal Realisasi Pendapatan APBD 2018 di Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Pemprov	Mamuju	Mateng	Pasangkayu	Majene	Polman	Mamasa
PAD	**16,78%**	**7,70%**	**8,04%**	**3,72%**	**11,68%**	**11,90%**	**2,08%**
Pajak Daerah	15,11%	2,70%	1,39%	1,28%	1,01%	1,77%	0,39%
Retribusi Daerah	0,40%	2,74%	1,75%	1,24%	2,11%	0,85%	0,38%
HPKD	0,34%	0,37%	0,00%	0,53%	0,35%	0,31%	0,43%
LLPAD	0,92%	1,90%	4,90%	0,67%	8,21%	8,98%	0,88%
Dana Perimbangan	**83,13%**	**88,04%**	**91,96%**	**92,03%**	**87,96%**	**83,39%**	**97,39%**
DBH	1,05%	1,50%	1,77%	2,36%	1,16%	0,85%	1,34%
DAU	56,90%	64,14%	64,79%	68,85%	67,36%	58,15%	70,55%
DAK Fisik	6,14%	14,20%	18,96%	15,86%	9,09%	14,07%	16,72%
DAK Non Fisik	19,03%	8,20%	6,44%	4,95%	10,35%	10,32%	8,79%
LLPD	**0,10%**	**4,26%**	**0,00%**	**4,26%**	**0,36%**	**4,71%**	**0,53%**
Hibah	0,02%	4,26%	0,00%	4,17%	0,36%	4,71%	0,53%
Lain-lain	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Dari tujuh Pemda di Sulbar, tiga pemda diantaranya memiliki kontribusi PAD yang signifikan (di atas 10 persen), yakni Pemprov Sulbar, Pemkab Polman dan Pemkab Majene. Pertumbuhan positif PAD di Pemkab Majene 2,62 persen dari tahun sebelumnya setidaknya disumbang oleh aktivitas perhotelan dan restoran dari penyelenggaran Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) di kota Majene. Sedangkan sumbangan PAD di Pemkab Polman didorong oleh sektor retribusi jasa usaha sektor pemakaian kekayaan daerah berupa sewa penggunaan stadion olah raga, sewa gedung pertemuan dan pemakaian papan reklame.

Tabel 3.13 Analisis Vertikal Realisasi Belanja APBD 2018 di Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Prov	Mamuju	Mateng	Pasangkayu	Majene	Polman	Mamasa
Belanja Operasi	**71,64%**	**65,99%**	**57,56%**	**51,36%**	**68,44%**	**69,07%**	**60,76%**
Belanja Pegawai	30,17%	34,75%	22,05%	29,78%	42,65%	41,29%	32,99%
Belanja Barang dan Jasa	26,33%	29,68%	34,13%	21,36%	24,85%	23,22%	20,00%
Belanja Bunga	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Hibah	14,07%	1,52%	1,26%	0,22%	0,37%	4,20%	5,34%
Belanja Bantuan Sosial	0,00%	0,04%	0,12%	0,00%	0,57%	0,37%	2,43%
Belanja Modal	**18,44%**	**24,85%**	**31,92%**	**35,62%**	**18,04%**	**16,66%**	**19,75%**
Belanja tidak terduga	**0,03%**	**0,05%**	**0,02%**	**0,18%**	**0,04%**	**0,01%**	**0,12%**
Transfer	**9,89%**	**9,10%**	**10,51%**	**12,85%**	**13,48%**	**14,26%**	**19,38%**
Transfer Dana Desa	0,00%	6,41%	6,97%	6,23%	6,02%	9,03%	13,57%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah/Desa (ADD)	0,00%	2,67%	3,54%	6,44%	7,32%	5,05%	5,73%
Transfer Bagi Hasil Pajak	7,89%	0,00%	0,00%	0,12%	0,08%	0,12%	0,00%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2,01%	0,02%	0,00%	0,06%	0,05%	0,06%	0,08%

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Belanja Pemda lingkup Sulbar masih didominasi oleh belanja konsumtif (Belanja Pegawai dan Barang). Dari tujuh Pemda, hanya Pemkab Pasangkayu dan Pemkab Mamuju Tengah yang porsi belanja modalnya signifikan (di atas 30 persen). Untuk itu, perlu disosialisasikan kembali pada pihak Pemda mengenai sanksi terhadap daerah-daerah yang tidak memenuhi kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang (*mandatory spending*), khususnya alokasi anggaran infrastruktur minimal 25 persen dari APBD. Secara garis besar *outcome* dari peningkatan infrastruktur daerah untuk menciptakan iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik sehingga dapat menumbuhan perekonomian daerah.

3.7.3 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal 2018 sebesar Rp16.947.501,- per penduduk miskin. Terdapat penurunan kapasitas fiskal Rp1.675.449,- dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan kapasitas fiskal, diperoleh angka sementara sebesar Rp16.947.501 per penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat pada tahun 2018 mencapai 152.830 jiwa. Sementara pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat mencapai 149.470 jiwa dengan kapasitas fiskal sebesar Rp18.622.950 per penduduk miskin. Melihat data yang ada, terdapat penurunan kapasitas fiskal Rp1.675.449 dari tahun sebelumnya. Faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain menurunnya sumber-sumber pendapatan dalam membiayai program pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Turunnya kapasitas fiskal daerah menunjukkan berkurangnya kemampuan daerah di Sulawesi Barat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Berdasarkan PMK Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Provinsi Sulawesi Barat memiliki indeks kapasitas fiskal 0,25 dengan kategori sangat rendah. Diharapkan dikemudian hari indeks kapasitas fiskal di Sulawesi barat dapat ditingkatkan seiring meningkatknya aktivitas pertumbuhan ekonomi.

3.7.4 Analisis Kesehatan Pengelolaan Keuangan Daerah di Sulbar

3.7.4.1 Indikator Rasio PAD (Realisasi PAD/Total Pendapatan)

Grafik 3.15 Rasio PAD per Pemda di Sulbar Tahun 2018

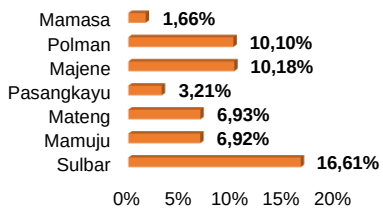

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Rasio PAD tertinggi ditunjukkan oleh Pemprov Sulbar, didorong oleh kenaikan realisasi pajak daerah sebesar 4,76 persen dari tahun sebelumnya. Jenis PAD yang menjadi primadona Pemprov, dari Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB terealisasi Rp126,19 miliar, meningkat 6,58 persen (*yoy*). Sebaliknya, rasio PAD terendah terdapat pada Pemkab Pasangkayu karena merosotnya realisasi

PAD hingga 50,33 persen dari tahun sebelumnya. Faktor lainnya, jenis potensi utama daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit adalah sebagai objek Pajak Pempus (PBB Sektor Perkebunan).

3.7.4.2 Rasio Efektivitas PAD (Realisasi PAD / Target PAD)

Grafik 3.16 Rasio Efektivitas PAD per Pemda 2018

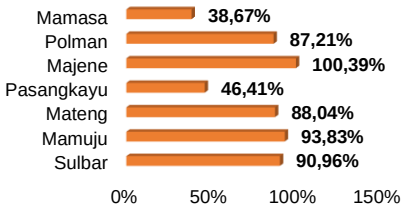

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Rasio efektivitas PAD tertinggi (melebihi target) ditunjukkan oleh Pemkab Majene, didorong oleh realisasi Hasil kekayaan Daerah yang Dipisahkan (100 persen) dan Lain-lain PAD yang Sah (103,21 persen). Seluruh komponen pembentuk PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama dari sektor Lain-Lain PAD hanya terealisasi 30,52 persen, padahal proporsi target PADnya paling besar 53,69 persen.

3.7.4.3 Rasio Pertumbuhan PAD ((PADt1-PADt0)/PADt0)

Grafik 3.17 Rasio Pertumbuhan PAD per Pemda Tahun 2018

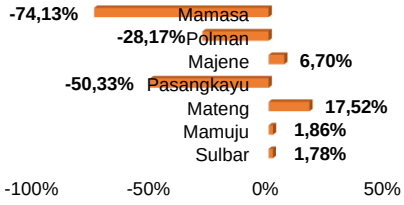

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Rasio pertumbuhan PAD tertinggi ditunjukkan oleh Pemkab Mamuju Tengah karena didorong oleh realisasi retribusi daerah yang meningkat 73,75 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan dari retribusi umum sektor pelayanan kesehatan dan pelayanan pengguna air bersih memberikan andil yang cukup besar terhadap lonjakan penerimaan retribusi daerah. Sebaliknya, rasio pertumbuhan PAD terendah terdapat pada Pemkab Mamasa (-74,13 persen) karena dipicu oleh merosotnya kinerja seluruh komponen pembentuk PAD.

3.7.4.4 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (Belanja Modal/Total Belanja)

Grafik 3.18 Rasio Belanja Modal per Pemda 2018

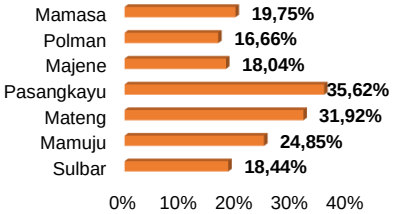

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar daerah telah merealisasikan belanja modal. Rasio Belanja Modal tertinggi terdapat pada Pemkab Pasangkayu. Rasio tersebut lebih tinggi dari Belanja Pegawai (29,78 persen). Faktor lain pendorong tingginya rasio adalah dari serapan DAK Fisik tahun 2018 yang mencapai 99,22 persen dari pagu. Sebaliknya, rasio terendah terdapat pada Pemkab Majene karena porsi belanja pegawai (42,65 persen) dan belanja barang (24,85

persen) jauh lebih besar dari belanja modal. Faktor lain pemicu merosotnya rasio adalah turunnya realisasi DAK Fisik hingga 50,34 persen dari tahun 2017.

3.7.4.5 Rasio Belanja Pegawai (Realisasi Belanja Pegawai / Total Belanja)

Grafik 3.19 Rasio Pegawai Modal per Pemda 2018

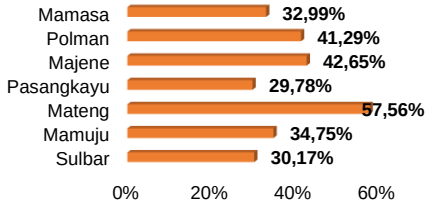

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar daerah telah membelanjakan untuk kebutuhan pegawai. Rasio Belanja Pegawai tertinggi terdapat pada Pemkab Mamuju Tengah. Faktor pendorong tingginya rasio tersebut dari kenaikan belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp26,41 miliar, meningkat 197,83 persen dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, rasio terendah terdapat pada Pemprov Sulbar karena adanya penurunan realisasi belanja daerah sebesar 9,39 persen dari tahun sebelumnya. Faktor lainnya karena adanya kenaikan pada proporsi belanja barang sehingga menambah jumlah proporsi belanja daerah Pemprov Sulbar.

3.7.4.6 Penyerapan Anggaran (Realisasi Belanja / Pagu Belanja)

Grafik 3.20 Penyerapan Anggaran per Pemda 2018

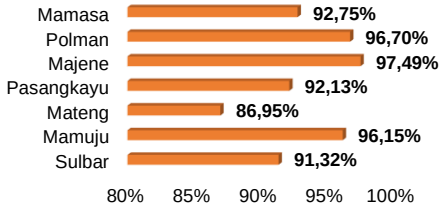

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Faktor pendorong tingginya penyerapan dari kenaikan belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp26,41 miliar, meningkat 197,83 persen dari tahun sebelumnya. Sebaliknya rasio terendah terdapat pada Pemprov Sulbar karena adanya penurunan realisasi belanja daerah sebesar 9,39 persen dari tahun sebelumnya. Faktor lainnya karena adanya kenaikan pada proporsi belanja barang sehingga menambah jumlah proporsi belanja daerah Pemprov Sulbar.

3.7.4.7 Rasio Ruang Fiskal ((Total Pendapatan-DAK)-Belanja Pegawai Tak Langsung)/Realisasi Total Pendapatan APBD)

Grafik 3.21 Rasio Ruang Fiskal per Pemda 2018

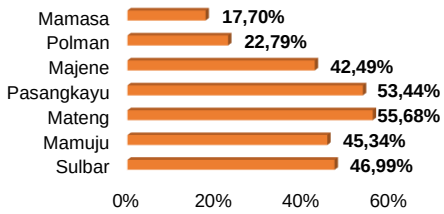

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Rasio ini mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Rasio terdapat di Pemkab Mamuju Tengah sehubungan dengan besarnya penerimaan dari transfer dan pinjaman daerah. Oleh karena itu Pemkab Mateng mempunyai ruang yang cukup luas dalam memenuhi kebutuhan daerahnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sebaliknya, Pemkab Mamasa

merupakan daerah yang memiliki ruang fiskal yang terendah. Pemkab Mamasa harus pandai memilih belanja yang tepat dalam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.7.4.8 Rasio Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan

Grafik 3.22 Rasio Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan per Pemda 2018

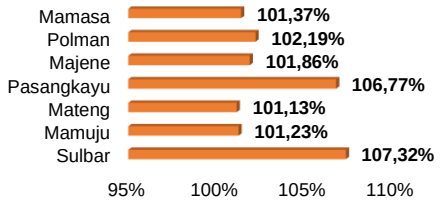

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah untuk merealisasikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Rasio tertinggi diraih oleh Pemprov Sulbar berkaitan dengan besarnya pendapatan daerah dan realisasi SiLPA TA sebelumnya. Tingginya rasio mengindikasikan besarnya sumber-sumber pendapatan daerah namun belum optimal digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, Pemkab Mamuju Tengah merupakan daerah dengan rasio terendah. Dengan demikian, Pemkab Mamuju Tengah harus selektif dalam memberikan porsi belanja yang konsumtif, dan lebih besar mendorong kepada belanja yang produktif guna memperoleh pendapatan daerah.

3.7.4.9 Rasio SiLPA

Grafik 3.23 Rasio SiLPA per Pemda 2018

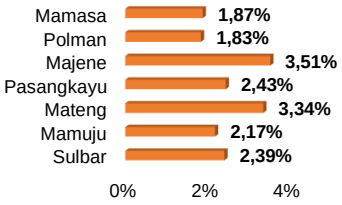

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi SiLPA tahun sebelumnya dalam mendanai belanja daerah tahun berjalan. Rasio Penyerapan Anggaran tertinggi terdapat pada Pemkab Majene. Faktor pendorong tingginya penyerapan dari kenaikan belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp26,41 miliar, meningkat 197,83 persen dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, rasio terendah terdapat pada Pemprov Sulbar karena adanya penurunan realisasi belanja daerah sebesar 9,39 persen dari tahun sebelumnya. Faktor lainnya karena adanya kenaikan pada proporsi belanja barang sehingga menambah jumlah proporsi belanja daerah Pemprov Sulbar.

3.7.4.10 Gambaran Tingkat Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan sembilan indikator kesehatan keuangan daerah di atas, diperoleh hasil penilaian dengan memberikan pembobotan terhadap setiap pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Bobot Skor Penilaian Indikator Kesehatan Keuangan Daerah per Pemda

Uraian		Pemerintah Daerah						
		Pemprov	Mamuju	Mateng	Pasangkayu	Majene	Polman	Mamasa
Rasio PAD	1	3	3	3	3	3	3	3
Rasio Efektivitas PAD	2	15	15	15	9	15	15	6
Rasio Pertumbuhan PAD	3	5	5	10	5	5	5	5
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja	4	4	4	6	8	4	4	4
Rasio Belanja Pegawai	5	4	4	6	4	6	6	4
Penyerapan Anggaran	6	8	8	6	8	8	8	8
Rasio Ruang Fiskal	7	4	4	4	4	4	3	2
Rasio Pendapatan dan Pen. Pembiayaan	8	3	3	3	3	3	3	3
Rasio SiLPA	9	1	1	1	1	1	1	1
Total		47	47	54	45	49	48	36

Sumber: Pemda lingkup Sulbar, 2019 (diolah)

Dari skor agregat tersebut terlihat bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah merupakan Pemda dengan tingkat kesehatan keuangan paling baik di Sulbar. Hal ini sejalan dengan konsentrasi Pemkab Mamuju Tengah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada pembenahan infastruktur daerah dan layanan dasar publik sehingga harus melakukan pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp60 miliar.

Pada posisi terakhir, Pemda dengan skor terendah adalah Pemkab Mamasa dengan skor 36 poin. Kabupaten yang terbentuk sejak 2002 ini sebenarnya memiliki potensi wisata alam yang berlimpah. Namun, pariwisata di Mamasa nyatanya belum terdongkrak meski wacana pembangunan pariwisata terus disuarakan. Kendala lainnya, adanya beberapa proyek tertunda karena pekerjanya pergi mengungsi akibat bencana gempa bumi yang terjadi pada bulan November dan Desember 2018.

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

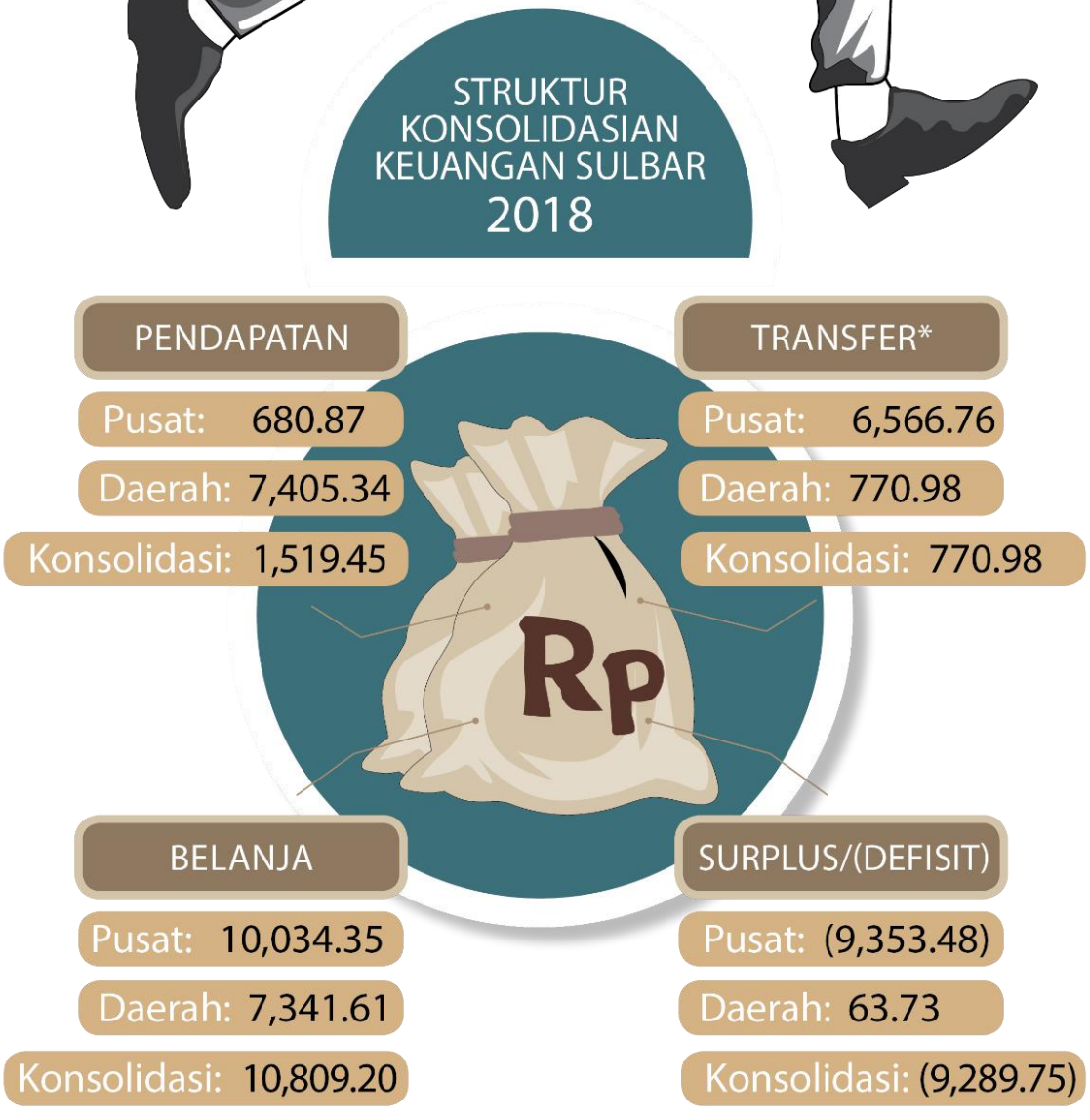

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

4.1 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Pendapatan Konsolidasian Sulbar sebesar Rp1,52 triliun sedangkan Belanja Konsolidasiannya sebesar Rp10,81 triliun

Pada tahun 2018, Pendapatan Konsolidasian (gabungan antara APBN dan APBD) Sulbar sebesar Rp1,52 triliun sedangkan Belanja Konsolidasiannya sebesar Rp10,81 triliun. Ekspansi Belanja yang dilakukan di tengah menyusutnya pendapatan menyebabkan Defisit Konsolidasian melebar hampir empat persen dari tahun 2017 menjadi Rp9,29 triliun.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 (dalam miliar Rp)

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	**680,87**	**7.405,34**	**1.519,45**	**-5,67%**	**1.610,83**
Pendapatan Perpajakan	618,68	347,31	965,99	3,79%	930,73
Pendapatan Bukan Pajak	62,19	393,25	453,24	-5,36%	478,93
Hibah	-	93,88	93,88	98,21%	47,36
Transfer*	-	6.570,90	6,34	-95,88%	153,82
Belanja Negara	**10.034,35**	**7.341,61**	**10.809,20**	**2,24%**	**10.572,69**
Belanja Pemerintah	3.467,59	6.570,63	10.038,22	2,60%	9.783,66
Transfer*	6.566,76	770,98	770,98	-2,29%	789,03
Surplus/(Defisit)	**(9.353,48)**	**63,73**	**(9.289,75)**	**3,66%**	**(8.961,86)**
Pembiayaan	**-**	**200,64**	**200,64**	**20,00%**	**167,20**
Penerimaan Pembiayaan	-	238,52	238,52	33,25%	179,00
Pengeluaran Pembiayaan	-	37,88	37,88	221,10%	11,80
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	**(9.353,48)**	**264,37**	**(9.089,11)**	**3,35%**	**(8.794,66)**

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar, 2019 (diolah)
*Catatan: *) Seluruh Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah, menghasilkan angka Konsolidasi.*

Dari sisi pendapatan, penurunan realisasi dibandingkan tahun 2017 secara dominan berasal dari pengurangan realisasi Pendaptan Transfer DBH, DAK Fisik dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan dari sisi belanja, peningkatan realisasi berasal dari Ekspansi pada jenis Belanja Pembayaran Bunga Utang dan Belanja Barang yang masing-masing naik sebesar 55 persen dan 24 persen.

4.2 PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

4.2.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan Konsolidasian Sulbar di tahun 2018 menyusut 5,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp1,61 triliun. Hal tersebut

Grafik 4.1 Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pendapatan Konsolidasian di Sulbar

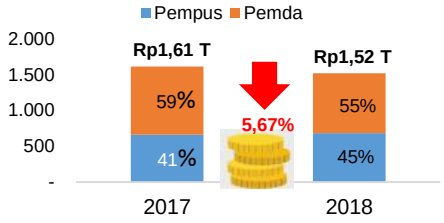

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar, 2019 (diolah)

Penurunan Pendapatan Konsolidasian Sulbar dipicu oleh berkurangnya penerimaan Pemda, khususnya pada DAK Fisik dan DBH serta pada jenis Lain-lain PAD yang Sah.

sejalan dengan kondisi perekonomian Sulbar yang sedang mengalami perlambatan. Kontribusi pendapatan pemerintah pusat kembali menguat, sedangkan sumbangan pemda terhadap pendapatan konsolidasian mengalami penurunan. Pengurangan sebesar empat persen pada realisasi penerimaan pemda tersebut sebagian besar disumbang oleh realisasi DAK Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masing-masing berkurang sebesar Rp106 miliar dan Rp17 miliar. Sedangkan menguatnya dominasi penerimaan pemerintah pusat berasal dari peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp19 miliar.

Jika dilihat dari komposisi per komponen pendapatan, maka Pendapatan Perpajakan menjadi kontributor utama dengan menyumbang 64 persen dari total pendapatan konsolidasian Sulbar. Sejalan dengan peningkatan realisasi Penerimaan Perpajakan pemerintah pusat, kinerja penerimaan Pajak Daerah turut meningkat senilai Rp20 miliar atau setara dengan 6,27 persen dari tahun sebelumnya.

Grafik 4.2 Perbandingan Komponen Pendapatan Konsolidasian Sulbar Tahun 2017-2018

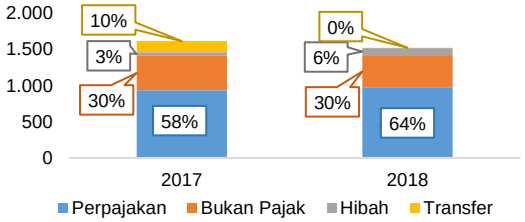

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar, 2019 (diolah)

Namun demikian, peningkatan yang terjadi pada kinerja sektor perpajakan tidak diikuti oleh kondisi yang sama pada sektor pendapatan Bukan Pajak. Pada tahun ini realisasi dari sektor Bukan Pajak justru mengalami penurunan hampir sebesar lima persen dari Rp479 miliar (tahun 2017) menjadi Rp453 miliar. Pengurangan realisasi pada jenis Lain-lain PAD yang Sah Pemda senilai Rp123 miliar menjadi kontributor dominan terhadap penurunan kinerja yang terjadi pada sektor Bukan Pajak tersebut.

Ditinjau dari komposisi pada realisasi tahun 2018, penerimaan Perpajakan Konsolidasian Sulbar paling banyak berasal dari penerimaan pemerintah pusat berupa PPN sebesar 31 persen dan PPH sebesar 29 persen dari total Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Sulbar, atau masing-masing setara dengan Rp303 miliar dan Rp286

Grafik 4.3 Komposisi Pendapatan Pemda dan Pempus pada Pendapatan Pajak dan Bukan Pajak Konsolidasian Sulbar Tahun 2018

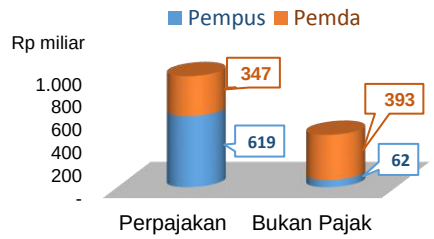

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar, 2019 (diolah)

miliar. Sedangkan realisasi Pendapatan Bukan Pajak dominan berasal dari penerimaan pemda berupa Lain-lain PAD yang Sah sebesar 54 persen (setara dengan Rp 245 miliar) dari total realisasi Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian Sulbar.

4.2.2 Rasio Pajak (*Tax Ratio*)

Tax Ratio Sulbar pada tahun 2018 sebesar 3,10% turun dari tahun 7 basis poin dari tahun 2017

Pada tahun 2018, kinerja pajak Sulbar yang dihitung dari perbandingan antara Pendapatan Pajak Konsolidasian terhadap total PDRB ADHK Sulbar adalah 3,10 persen. Angka tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 2016 yang sebesar 3,55 persen dan tahun 2017 sebesar 3,17 persen.

Grafik 4.4 Perbandingan Komposisi Penerimaan Perpajakan dan PDRB di Sulbar (Rp miliar)

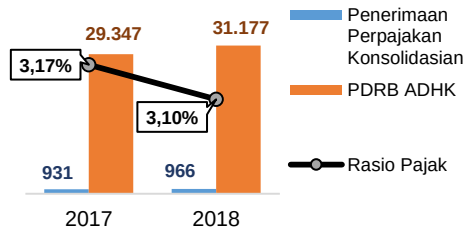

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Tren tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan aktivitas perekonomian Sulbar belum dapat diikuti secara optimal oleh penerimaan Pendapatan Perpajakan. Sementara secara konsepsi, penambahan volume perekonomian suatu wilayah seharusnya diikuti dengan penambahan penerimaan perpajakan.

Kondisi yang tidak sejalan dimaksud dapat berhubungan dengan beberapa hal, antara lain disebabkan oleh kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat berasal dari sektor pertanian dimana masyarakatnya memiliki penghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu, komoditas di sektor tersebut termasuk komoditas strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Adapun wajib pajak pada sub sektor perkebunan merupakan wajib pajak besar yang pemungutan pajaknya diatur secara khusus dan terdaftar sebagai WP wilayah Jakarta. Selain itu, turunnya *Tax Ratio* juga berkorelasi dengan penurunan realisasi Belanja Modal Pemerintah sebesar Rp446 miliar, mengingat besarnya kontribusi belanja pemerintah terhadap total Pendapatan Perpajakan Sulbar.

4.2.2.1 Rasio Pajak per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Di lingkup Sulbar, Kabupaten Mamuju memiliki *Tax Ratio* tertinggi, sedangkan terendah di Kabupaten Pasangkayu

Tax ratio dihitung dari jumlah penerimaan pajak suatu daerah dibagi dengan aktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh jumlah PDRB daerah yang bersangkutan. Kabupaten Mamuju memiliki *tax ratio* tertinggi, jauh meninggalkan kabupaten lainnya di Sulbar. Selain status sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan, dalam perhitungan *tax ratio* ini penerimaan pajak pemda Provinsi Sulbar juga diperhitungkan sebagai penerimaan Kabupaten Mamuju.

Sementara itu, Kabupaten Pasangkayu dan Polewali Mandar merupakan dua daerah yang memiliki PDRB yang tinggi bersanding dengan kabupaten Mamuju. Pada

Kabupaten Pasangkayu, aktivitas perekonomian masyarakat ditopang oleh perkebunan kelapa sawit yang ditunjang dengan adanya pabrik pengolahan CPO, sedangkan aktivitas ekonomi masyarakat Polewali Mandar bertumpu pada kegiatan perdagangan dan pertanian. Namun jika dilihat perbandingan antar kabupaten, Pasangkayu dan Polewali Mandar justru menjadi kabupaten yang memiliki *tax ratio* yang paling rendah.

Grafik 4.5 *Tax Ratio* Konsolidasian per Kabupaten di Prov. Sulawesi Barat Tahun 2018

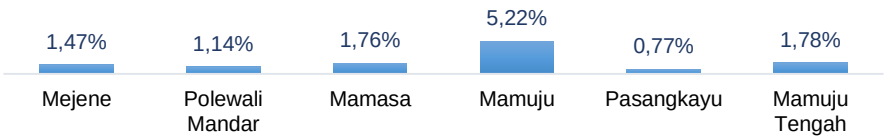

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Sulbar, 2019 (diolah)
Catatan: Data penerimaan pajak pemda Provinsi Sulbar sebesar Rp272,2 miliar dimasukkan sebagai penerimaan pajak Kabupaten Mamuju, sedangkan data PDRB per Kabupaten menggunakan angka proyeksi yang dihitung dari rata-rata pertumbuhan data PDRB dari BPS Sulbar.

Kondisi tersebut merupakan tantangan besar bagi pemerintah Sulbar. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak perlu lebih ditingkatkan untuk mendorong penerimaan pajak dari kedua daerah tersebut. Selain itu, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan untuk membuka Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk mendukung penerimaan daerah. Himbauan Gubernur Sulbar terhadap rekanan mitra kerja pemerintah untuk memiliki NPWP yang terdaftar di wilayah kerja Sulbar juga perlu diterapkan bagi para pengusaha swasta yang melakukan aktivitas ekonomi di wilayah Sulbar.

4.2.2.2 Rasio Pajak per Kapita Kabupaten di Provinsi Sulbar

Rasio Pajak per Kapita kabupaten Mamuju yang tertinggi, sedangkan terendah di Kabupaten mamasa

Rasio pajak per kapita dihitung dari jumlah penerimaan pajak setiap kabupaten dibagi dengan jumlah penduduknya. Berdasarkan perhitungan tersebut, Kabupaten Mamuju memiliki rasio pajak per kapita tertinggi sedangkan yang terendah terjadi di kabupaten Mamasa. Terdapat beberapa faktor yang berkorelasi dengan hal tersebut. Antara lain adalah Mamuju sebagai ibukota provinsi memiliki penerimaan pajak yang terbesar, yakni Rp579,81 miliar yang bersumber dari penerimaan PPh dan PPN atas proyek-proyek besar pemerintah.

Sebaliknya, Mamasa memiliki penerimaan pajak terkecil sebesar Rp50,14 miliar. Sementara itu, meskipun Polewali Mandar memiliki penerimaan pajak terbesar, yakni sebesar Rp142,6 miliar, namun dengan jumlah penduduk yang paling banyak (hampir dua kali lipat dari jumlah penduduk Mamuju) menyebabkan kabupaten ini memiliki rasio pajak per kapita yang relatif rendah.

Grafik 4.6 Rasio Pajak per Kapita setiap Kabupaten Lingkup Sulbar Tahun 2018 (Rp)

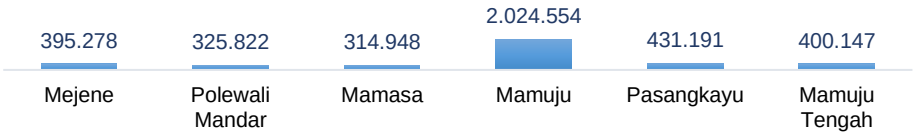

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Sulbar, 2019 (diolah)
Catatan: Data penerimaan pajak pemda Provinsi Sulbar sebesar Rp272,2 miliar dimasukkan sebagai penerimaan pajak Kabupaten Mamuju.

Grafik di atas menunjukkan bahwa setiap penduduk pada Kabupaten Mamuju telah berkontribusi sebesar Rp2.024.554 terhadap penerimaan perpajakan kabupaten ini. Jika dilihat secara agregat Sulbar, maka setiap penduduk di wilayah Sulbar berkontribusi sebesar Rp712.616 terhadap total Pendapatan Perpajakan konsolidasian Sulbar, meningkat 3,52 persen dibandingkan tahun 2017. Sementara dari sisi masyarakat, angka tersebut menunjukkan beban pajak yang harus ditanggung oleh setiap penduduk Sulbar.

4.2.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Pertumbuhan ekonomi Sulbar sebesar 6,23% belum mampu diikuti oleh pertumbuhan yang sepada pada sisi penerimaan pajak dan non pajak Sulbar.

Kinerja Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Sulbar pada tahun 2018 yang meningkat Rp35 miliar dari tahun sebelumnya tertahan oleh penurunan pada Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp26 miliar. Akibatnya, secara agregat penerimaan pajak dan non pajak Sulbar hanya menanjak tipis 0,68 persen. Sementara itu, dari sisi aktivitas perekonomian Sulbar, meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun 2017 namun secara agregat ekonomi Sulbar mampu tumbuh pada angka 6,23 persen.

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian di Prov. Sulawesi Barat Tahun 2017 dan 2018

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan (Rp miliar)	930,73	-4,83%	965,99	3,79%
PNBP (Rp miliar)	478,93	40,00%	453,24	-5,36%
Total Penerimaan Pajak dan Non Pajak (Rp miliar)	**1.409,65**	**6,79%**	**1.419,23**	**0,68%**
PDRB ADHK (miliar Rp) dan Pert.Ekonomi	**29.347,00**	**6,62%**	**31.177,00**	**6,23%**

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Pertumbuhan yang selaras antara kenaikan PDRB dan penerimaan perpajakan Sulbar mengindikasikan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Sulbar telah berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak. Adanya *gap* antara pertumbuhan pajak dan non pajak dengan PDRB juga menandakan bahwa perlambatan ekonomi berpengaruh terhadap lambatnya pertumbuhan penerimaan Sulbar. Selain itu, hal tersebut juga menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa masih terdapat potensi penerimaan pajak yang perlu dieksplor.

Di sisi lain, pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap penurunan penerimaan dari sektor non pajak yang tidak mampu merespons pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang selama ini masih cenderung longgar perlu diperketat. Selain itu, potensi pariwisata juga perlu digarap secar lebih serius dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sebagai alternatif lain untuk meningkatkan retribusi daerah. Untuk itu, pemda setempat perlu menggandeng BUMDes untuk memaksimalkan potensi pariwisata tersebut.

4.3 BELANJA KONSOLIDASIAN

4.3.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.7 Perbandingan Proporsi Belanja Konsolidasian di Sulbar

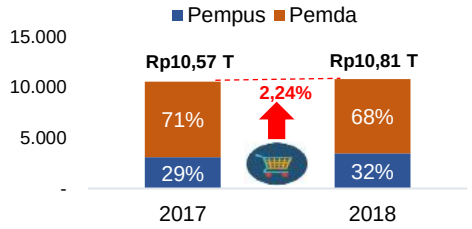

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar, 2019 (diolah)

Belanja Konsolidasian Sulbar terealisasi sebesar Rp10,81 triliun, didominasi oleh Belanja Pemerintah Daerah

Sama halnya dengan tahun sebelumnya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2018 didominasi oleh Belanja Pemerintah Daerah. Dari total Belanja Konsolidasian Rp10,8 triliun, sejumlah Rp7,3 triliun di antaranya merupakan Belanja Pemda, sedangkan sisanya Belanja Pempus sebesar Rp3,5 triliun. Dominasi pemda tampak pada hampir semua jenis belanja konsolidasian Sulbar.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka kontribusi pemda pada tahun ini sedikit berkurang seiring dengan ekspansi yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada jenis belanja barang. Untuk membiayai defisit anggaran, di antaranya ditutupi dengan penggunaan penggunaan SILPA TA sebelumnya sebesar Rp180 miliar.

Grafik 4.8 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Belanja Konsolidasian per Jenis Belanja di Sulbar

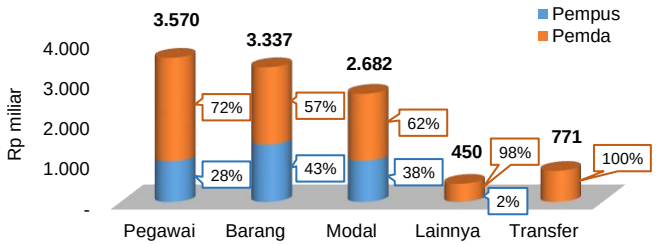

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar, 2019 (diolah)

4.3.2 Analisis Perubahan

Ekspansi pada jenis Belanja Barang semakin memperkecil porsi Belanja Modal

Ekspansi jenis belanja barang yang dilakukan di tengah kinerja penyerapan belanja modal yang kurang maksimal, membuat porsi belanja modal semakin mengecil. Pada tahun 2018 belanja modal konsolidasian hanya terealisasi 90,65 persen dari total anggaran konsolidasian sebesar Rp2,96 triliun. Kinerja penyerapan belanja modal tersebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang terealisasi 93,05 persen.

Selanjutnya, Belanja Pembayaran Bunga Utang meningkat 55 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sehubungan dengan pembiayaan anggaran yang dilakukan oleh pemda pada tahun 2017 melalui Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp98,7 miliar sehingga pada tahun 2018 dilakukan pembayaran bunga utang (secara agregat) sebesar Rp18,5 miliar.

Grafik 4.9 Perbandingan Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja Konsolidasian Sulbar

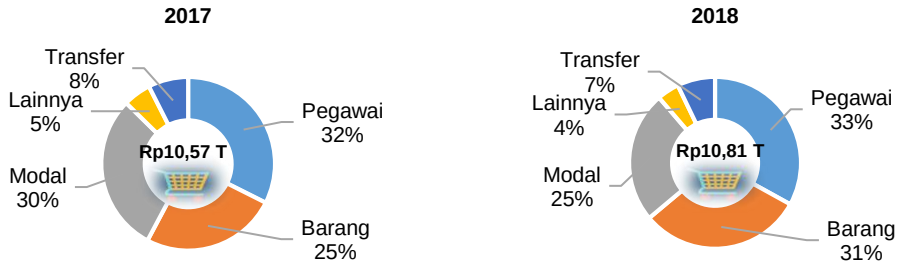

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar, 2019 (diolah)

Lebih lanjut, Pinjaman Daerah dimaksud diterima dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk mendanai Pembangunan RSUD Provinsi Sulbar Kelas B senilai Rp239,69 miliar dimana penyaluran pinjamannya dilakukan secara bertahap selama tujuh tahun. Adapun bunga pinjaman yang ditetapkan atas pinjaman tersebut sebesar 9,75 persen per tahun. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan efektivitas dan efisiensi anggaran, terutama pada jenis Belanja Pegawai dan Belanja Barang mengingat ruang fiskal Sulbar pada tahun-tahun berikutnya relatif terbatas.

4.3.3 Analisis Rasio Belanja Konsolidasian

4.3.3.1 Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal

Pada tahun 2018 rasio Belanja Operasi Konsolidasian Sulbar meningkat lima persen dari tahun sebelumnya menjadi 68,02 persen. Tren peningkatan pada rasio ini berpotensi mengurangi daya *multiplier effect* dari belanja pemerintah, karena penambahan pada jenis belanja operasi tentu akan mengurangi porsi belanja produktif.

Dominasi Realisasi Belanja Operasional Sulbar semakin melebar, dan memperkecil rasio Belanja Produktif yang tercermin pada turunnya rasio Belanja Modal.

Grafik 4.10 Rasio Belanja Konsolidasian Provinsi Sulawesi Barat

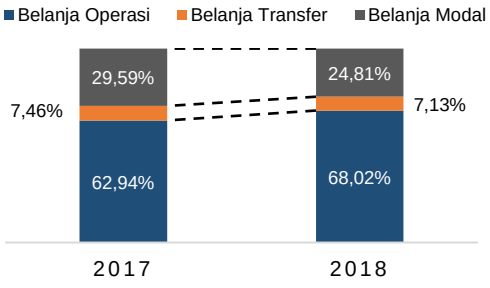

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar, 2019 (diolah)

Hal tersebut terlihat dari tren penurunan rasio Belanja Modal Konsolidasian Sulbar yang turun menjadi 24,81 persen atau senilai Rp2,68 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi APBN sebesar 38 persen dan porsi APBD sebesar 62 persen. Artinya, anggaran daerah masih menjadi motor utama pelaksanaan berbagai program infrastruktur di Sulbar.

4.1.1.1. Rasio Belanja Konsolidasian per Kapita

Grafik 4.11 Rasio Belanja Konsolidasian Sulbar per Kapita Tahun 2017-2018

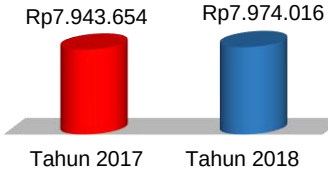

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS, 2019 (diolah)

Rasio Belanja Konsolidasian Sulbar per Kapita naik Rp30ribu dibandingkan tahun 2017 menjadi Rp7,97 juta per jiwa

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Sulbar, maka rasio Belanja Konsolidasian Sulbar per kapita naik sebesar Rp30 ribu dari tahun sebelumnya menjadi Rp7.974.016,- per jiwa. Artinya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam APBN maupun APBD, maka selama tahun 2018 pemerintah telah membelanjakan anggaran sebesar Rp7,98 juta untuk setiap penduduk Sulbar. Meninjau perbandingan antar kabupaten, Polewali Mandar menjadi kabupaten dengan rasio belanja per kapita yang paling rendah dibanding kabupaten lainnya, yakni sebesar Rp4,01 juta per jiwa. Walaupun nilai realisasi Belanja Konsolidasiannya terbesar kedua setelah Mamuju, yakni sebesar Rp1,76 triliun, tetapi jumlah penduduknya paling banyak sehingga berpengaruh terhadap rendahnya rasio belanja per kapita.

4.1.1.2. Rasio Belanja Pendidikan

Rasio Belanja Pendidikan Sulbar terhadap Belanja Konsolidasian sebesar 19%, tertinggi di Kabupaten Majene sebesar 36% dan terendah di Pasangkayu sebesar 13%

Dari sisi Belanja pada Fungsi Pendidikan, porsi belanja pendidikan terbesar pada Kabupaten Majene yang terealisasi sebesar 35 persen dari total realisasi Belanja Konsolidasiannya. Hal tersebut sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Sulbar yang menunjuk kabupaten Majene sebagai pusat pendidikan Sulbar. Sementara itu, Kabupaten Polewali Mandar berupaya mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dengan realisasi belanja pendidikan sebesar 29 persen dari total belanja konsolidasian Polman.

Porsi tersebut merupakan salah satu wujud komitmen pemda Polman untuk meningkatkan angka IPM, mengingat pada tahun sebelumnya porsi belanja pendidikannya hanya sebesar enam persen. Hal tersebut berdampak pada peningkatan rasio belanja pendidikan per kapita Polman yang pada tahun 2017 hanya sebesar Rp0,46 juta per jiwa menjadi Rp1,2 juta per jiwa. Dengan upaya ini, diharapkan angka

Lompatan besar Kabupaten Polman pada Belanja Pendidikan menyebabkan rasio Belanja Pendidikan per Kapita-nya ikut melonjak dari Rp0,46 juta menjadi Rp1,2 juta per jiwa.

Grafik 4.12 Rasio Belanja Pendidikan per Kapita Lingkup Sulbar Tahun 2018

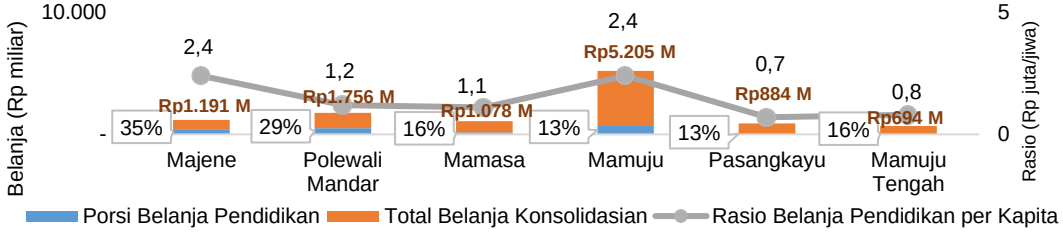

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS, 2019 (diolah)

IPM Kabupaten Polman tumbuh lebih besar dari tahun sebelumnya dan dapat mengejar ketertinggalannya dari capaian IPM Kabupaten lainnya.

4.3.4 Analisis Belanja Sektor Unggulan

Berdasarkan hasil analisis *Overlay*, sektor unggulan Sulbar adalah sektor Pertanian. Belanja Pemerintah Sulbar yang ditujukan pada sektor pertanian untuk tahun 2018 adalah sebesar 5,45 persen atau senilai Rp589 miliar. Pada saat yang sama, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Sulbar mencapai 42,12 persen. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa dengan belanja pemerintah sebesar itu, pemerintah telah turut andil dalam mendorong perekonomian Sulbar melalui dukungan pelaksanaan anggaran baik APBN maupun APBD pada sektor pertanian.

Realisasi belanja sektor Pertanian sebesar 5,45%, dan kontribusi sektor Pertanian terhadap total PDRB Sulbar sebesar 42,12%

Apabila dibandingkan, dukungan terhadap sektor pertanian ini tampak lebih kuat dari pemerintah pusat. Dalam APBN, pemerintah membelanjakan anggarannya sebesar 8,23 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat, sedangkan porsi belanja untuk Urusan Pertanian dalam APBD hanya sebesar 4,13 persen. Mengingat besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sulbar, maka pertumbuhan pada sektor ini akan lebih mampu meningkatkan nilai PDRB.

Oleh karena itu, dukungan pemda perlu ditingkatkan khususnya upaya menuju hilirisasi produk pertanian. Pengadaan mesin pengolah bahan pertanian menjadi prioritas mendesak. Selain itu, pemda dapat bekerja sama dengan pihak universitas jurusan pertanian, teknologi dan manajemen pemasaran untuk menempatkan praktek mahasiswa di sentra-sentra pertanian Sulbar agar dapat mengedukasi masyarakat mengenai implementasi metode bertani yang lebih produktif. Pemanfaatan kemajuan teknologi seperti digitalisasi pemasaran produk pertanian melalui media sosial juga perlu didorong. Optimalisasi peran BUMDes juga tidak kalah penting untuk mengangkat perekonomian warga desa yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian.

4.3.5 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Ekonomi Regional

Berdasarkan hasil analisis rasio terkait Belanja Konsolidasian Sulbar, maka dapat diketahui dampak kebijakan fiskal terhadap indikator ekonomi regional, antara lain:

Realisasi Belanja Konsolidasian Sulbar pada Fungsi Kesehatan tumbuh 3,25% mendorong pertumbuhan pada fasilitas dan tenaga kesehatan

a. Bidang Kesehatan

1) Realisasi belanja konsolidasian Sulbar pada fungsi/urusan kesehatan tumbuh 3,25 persen dari tahun sebelumnya. Secara proporsi, realisasi belanja kesehatan terhadap total belanja konsolidasian Sulbar naik tipis 0,1 persen menjadi 10,09 persen atau senilai Rp1,09 triliun.

2) Fasilitas kesehatan tumbuh 1,67 persen dan tenaga kesehatan melonjak hingga 44,32 persen. Peningkatan paling besar terjadi pada kelompok tenaga Bidan dan Perawat yang masing-masing bertambah 512 dan 625 orang. Sedangkan jumlah dokter hanya bertambah sebanyak 11 orang. Penambahan tersebut berhubungan dengan operasionalisasi gedung baru RSUD Regional Provinsi Sulbar. Selain menerima dana dalam bentuk DAK Fisik, pembangunan RSUD tersebut juga menggunakan dana pinjaman pemerintah daerah dari PIP. Penambahan tenaga kesehatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sulbar yang tercermin pada indeks Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu komponen dalam perhitungan IPM.

b. Bidang Pendidikan

1) Pada tahun 2018 realisasi belanja konsolidasian Sulbar pada fungsi/urusan Pendidikan sebesar Rp2,01 triliun, setara dengan 19 persen dari total belanja pemerintah. Porsi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 13 persen. Sedangkan secara absolut, realisasi belanja pendidikan Sulbar tumbuh melejit 51 persen dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Konsolidasian Sulbar pada Fungsi Pendidikan melonjak 51% dari tahun 2017, mendorong perbaikan pada sejumlah indikator Pendidikan Sulbar

2) Sejalan dengan ekspansi pemerintah Sulbar pada fungsi Pendidikan, indikator kualitas pendidikan masyarakat Sulbar mengalami perbaikan. Jumlah sekolah dan jumlah guru masing-masing mengalami kenaikan 1,30 persen dan 2,25 persen dari tahun sebelumnya. Penambahan fasilitas dan tenaga pendidik tersebut cukup mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah sebesar 122,61 persen menjadi 155.392 orang. Hal tersebut memperkuat harapan akan meningkatnya capaian IPM Sulbar di tahun 2018 ini.

c. Sektor Pertanian

1) Realisasi belanja pemerintah untuk sektor Pertanian di tahun 2018 sebesar Rp589 miliar. Jumlah tersebut sedikit bertumbuh (1,08 persen) dari realisasi tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Konsolidasian Sulbar pada sektor pertannian naik tipis 1,08% dari tahun 2017, mendorong pertumbuhan pada NTP dan PDRB dari sektor pertanian

2) Sejalan dengan pertumbuhan belanja pertanian, Nilai Tukar Petani Sulbar juga tumbuh 3,73 persen dari 106,93 di tahun 2017 menjadi 110,92 di tahun 2018. Artinya, perbandingan antara indeks yang diterima petani dari hasil pertaniannya lebih tinggi dengan indeks yang dibayar petani pada tahun 2018 lebih tinggi 399 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya.

3) Terkait kontribusi terhadap perekonomian Sulbar, pertumbuhan belanja pemerintah untuk sub fungsi Pertanian telah mendorong pertumbuhan PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebesar 5,84 persen.

4) Dalam kurun waktu yang sama, indikator kesejahteraan yang tercermin pada tingkat kemiskinan dan Gini Ratio, khususnya di daerah perdesaan turut meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor pertanian tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan para petaninya. Kue ekonomi Sulbar terindikasi tidak terdistribusi secara merata, yang terkonfirmasi dari angka kemiskinan dan Gini Ratio Sulbar.

Pendapatan Konsolidasian Sulbar sebesar Rp1,52 triliun sedangkan Belanja Konsolidasaian nya sebesar Rp10,81 triliun

d. Dana Desa

1) Dalam kurun waktu empat tahun, Sulbar telah menerima Dana Desa sebesar Rp1,48 triliun. Dalam rentang waktu yang sama pula, hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilakukan oleh BPS Sulbar menunjukkan kenaikan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Perbaikan IPD tersebut ditunjukkan pada hampir semua dimensi penyusun IPD, seperti Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Transportasi, Pelayanan Umum, dan Pemerintahan Desa. Selanjutnya peningkatan tersebut berdampak pada shifting kategori desa, dari 214 desa tertinggal pada tahun 2014 menjadi 113 desa pada tahun 2018. Pada periode yang sama, Desa Berkembang bertambah dari 359 menjadi 451 desa.

Dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018), Sulbar telah menerima Dana Desa sebesar Rp1,48 triliun. Besamaan dengan itu, Indeks Pembangunan Desa juga meningkat

2) Bersamaan dengan bergulirnya Dana Desa, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan Sulbar turut berkurang sebanyak hampir 9,32 ribu orang dari 131 ribu pada September 2015 menjadi 121 ribu pada September 2018.

3) Walaupun demikian, efektivitas pelaksanaan Dana Desa di tahun 2018 masih perlu menjadi perhatian pemerintah. Realisasi Dana Desa yang meningkat hampir sebesar Rp11 miliar dari tahun 2017 tidak serta-merta mengurangi angka kemiskinan di daerah perdesaan Sulbar. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan Sulbar justru bertambah sebanyak 1,93 ribu orang.

e. Agregat Belanja Konsolidasian

Pertumbuhan Belanja Konsolidassian Sulbar sebesar 2,24% dari tahun 2017 telah berkontribusi terhadap pertumbuhan PDRB Sulbar yang tumbuh 6,23 % pada tahun 2018.

Secara agregat, belanja pemerintah konsolidasian Sulbar di tahun 2018 sebesar Rp10,81 triliun, tumbuh 2,24 persen atau mengalami ekspansi senilai Rp236 miliar dibandingkan tahun 2017. Pada saat yang sama, PDRB ADHK Sulbar bertambah Rp1,83 triliun. Belanja pemerintah telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulbar yang tumbuh sebesar 6,23 persen.

Jadi, secara umum, belanja pemerintah berkorelasi positif terhadap PDRB. Namun terhadap TPT, belanja pemerintah berkorelasi negatif. Ekspansi belanja pemerintah telah turut menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran Sulbar menurun dari tahun 2017. Adapun terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, seyogyanya peningkatan belanja pemerintah

berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Akan tetapi pada tahun ini, tingkat kemiskinan justru mengalami kenaikan.

Tabel 4.3 Relevansi Pertumbuhan Belanja Pemerintah Terhadap Indikator Ekonomi Regional Sulbar

Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Naik/(Turun)
Belanja Konsolidasian Sulbar (Rp miliar)	10.573	10.809	2,24%
PDRB ADHK (Rp miliar)	29.347	31.177	6,23%
Tingkat Kemiskinan	11,18%	11,22%	0,04%
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,21%	3,16%	-0,05%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Sulbar, 2019 (diolah)

4.4 SURPLUS/DEFISIT

Defisit Konsolidasian Sulbar sebesar Rp9,23 triliun terdiri dari: Defisit APBN Rp9,35 triliun dan Surplus APBD Rp63,73 miliar.

Tabel 4.4 Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap PDRB Sulawesi Barat

Uraian	Surplus/Defisit		Rasio terhadap PDRB
	Realisasi (Rp miliar)	Komposisi	
Pemda	63,73	-0,69%	0,15%
Pempus	(9.353,48)	100,69%	-21,48%
Konsolidasian	(9.289,75)	100,00%	-21,33%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Pada tahun 2018, Defisit Konsolidasian Sulbar sebesar Rp9,23 triliun, meningkat 3,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit konsolidasian disumbang oleh pemerintah pusat sebesar Rp9,35 triliun dan sedikit ditutupi oleh Surplus dari pemerintah daerah sebesar Rp63,73 miliar. Dengan demikian, rasio defisit terhadap PDRB Sulbar adalah sebesar 21,33 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, rasio tersebut menunjukkan tren penurunan dari 22,62 persen. Hal itu dapat mengindikasikan bahwa kebijakan peningkatan ekspansi belanja yang diikuti dengan naiknya defisit anggaran berdampak pada kenaikan yang lebih besar pada perekonomian Sulbar secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh nilai PDRB.

4.5 ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Kontribusi pemerintah dalam PDRB Sulbar dihitung dari perbandingan antara belanja pemerintah konsolidasian Sulbar dibagi dengan PDRB ADHB-nya. Di tahun

Tabel 4.5 Tabel Rasio Belanja terhadap PDRB Sulbar Tahun 2018 (miliar Rp)

Jenis Belanja	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Rasio terhadap PDRB
Belanja Operasi	2.445,22	5.681,96	8.127,18	**18,66%**
Pegawai	1.012,00	2.557,94	3.569,94	8,20%
Barang	1.425,49	1.911,02	3.336,51	7,66%
Lainnya	7,73	1.213,00	1.220,73	2,80%
Belanja Modal	1.022,37	1.659,66	2.682,03	**6,16%**
Total Belanja	**3.467,60**	**7.341,62**	**10.809,22**	**24,82%**
PDRB ADHB			**43.545,00**	

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB Sulbar sebesar 24,82%

2018, secara keseluruhan Belanja Pemerintah Sulbar berkontribusi sebesar 24,82 persen terhadap PDRB Sulbar.

Dalam komponen PDRB sisi Pengeluaran/Konsumsi, belanja pemerintah berkontribusi dalam bentuk Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 18,66 persen, yang dihitung dari kontribusi Belanja Operasi. Sedangkan kelompok Belanja modal berkontribusi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,16 persen. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai sensitivitas belanja pemeritah konsolidasian Sulbar terhadap PDRB, maka dilakukan analisis regresi dengan menggunakan data belanja pemerintah konsolidasian sebagai variabel independen, dan data PDRB ADHK sebagai variabel dependen.

Data series yang digunakan adalah data LRA Triwulanan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 (N=16). Dari hasil olahan analisis regresi dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS (Lampiran I), disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah Konsolidasian Sulbar berpengaruh positif secara signifikan sebesar 43,2 persen terhadap PDRB Sulbar. Bentuk persamaaan yang dibentuk adalah Y=6.313,271+0,336X. Artinya, setiap penambahan Belanja Pemerintah Konsolidasian Sulbar sebesar Rp1 miliar akan mendorong kenaikan PDRB sebesar Rp0,336 miliar.

Belanja Pemerintah berpengaruh 43,2% terhadap PDRB Sulbar. Setiap penambahan Rp1 miliar Belanja Pemerintah akan menambah PBRB Sulbar sebesar Rp0,336 miliar

BAB V KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL

STRUKTUR KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SULBAR | 2018

HASIL ANALISIS LQ, MRP, DAN SS-EM (METODE OVERLAY)

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib
3. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
4. Pertanian, Peternakan Perburuan dan Jasa Pertanian
5. Industri Makanan dan Minuman

TANTANGAN FISKAL REGIONAL

URGENSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI SULBAR

Komposisi Realisasi Belanja Infrastruktur Tahun 2017-2018

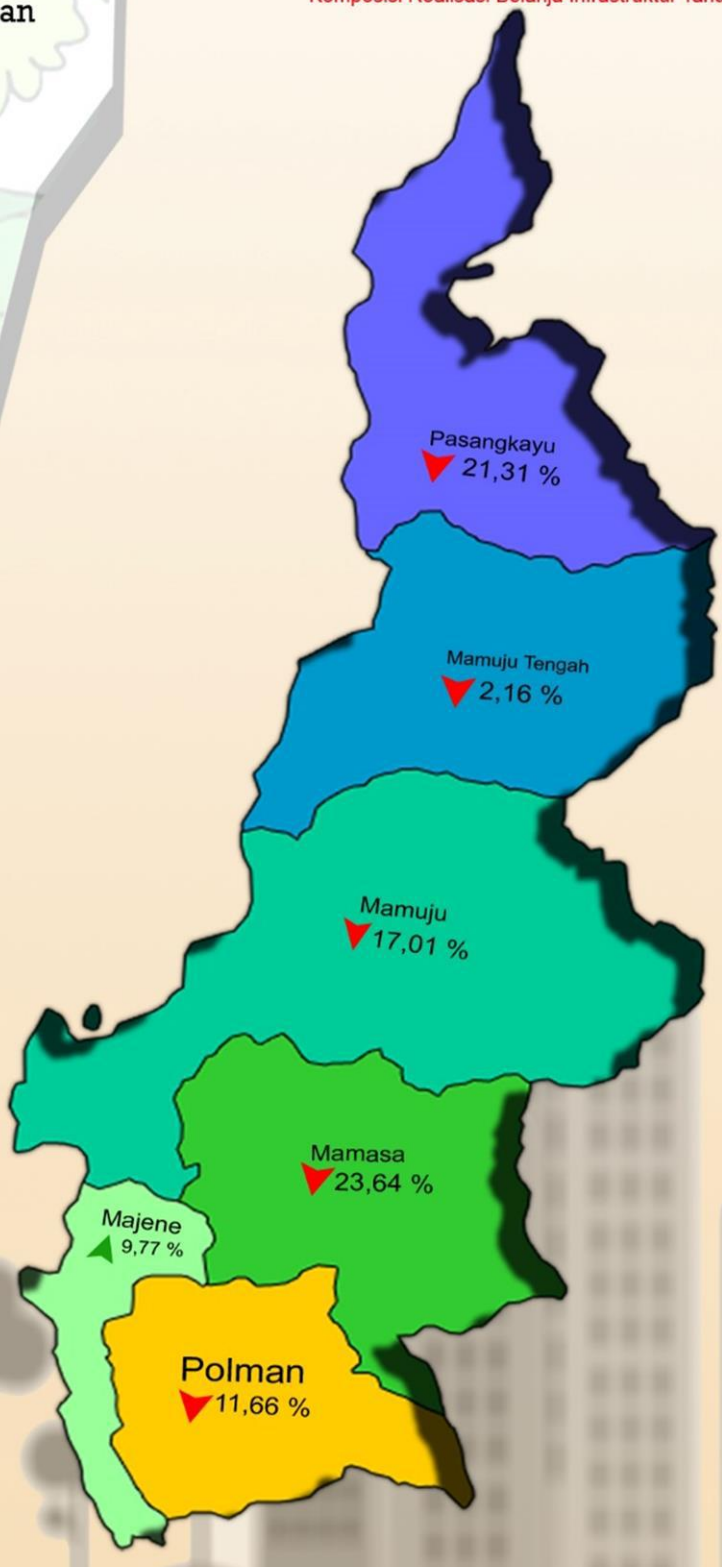

BAB V KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL

5.1 SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL DI SULAWESI BARAT BERDASARKAN ANALISIS LQ, MRP, *SHIFT-SHARE EM*, *OVERLAY*, DAN TIPOLOGI *KLASSEN*

Analisis terhadap perubahan peranan setiap sektor usaha terhadap struktur PDRB dapat memberikan gambaran keunggulan dan potensi ekonomi di Sulbar. Sektor ekonomi yang unggul dan potensial tersebut perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan di Sulbar di tengah keterbatasan sumber daya anggaran pemda. Linearitas antara prioritas pembangunan dan sektor ekonomi potensial suatu daerah menjadi penting mengingat potensi pembangunan yang dimiliki setiap wilayah sangat bervariasi (Syafrizal, 1997).

Analisis terhadap perubahan peranan setiap sektor usaha terhadap struktur PDRB dapat memberikan gambaran keunggulan dan potensi ekonomi di Sulbar.

Gambar 5.1 Alur Analisis Sektor/Sub Sektor Ekonomi Unggulan di Sulbar

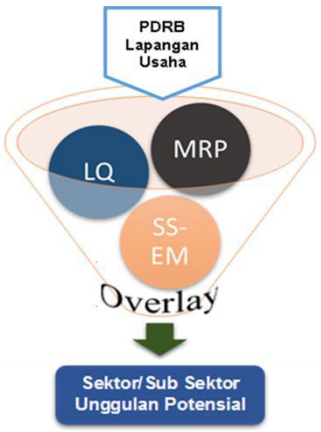

Sumber: Studi literatur (diolah)

Sektor ekonomi unggulan yang potensial di Sulawesi Barat dapat diketahui melalui analisis data PDRB Sulbar dan PDB Nasional er lapangan usaha menggunakan beberapa alat analisis yaitu analisis *Location Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), *Shift Share Esteban Marquillas* (SS-EM), dan *Overlay*.

Analisis LQ dilakukan untuk mengetahui sektor usaha yang menjadi sektor basis dan memiliki keunggulan komparatif. Sementara itu, analisis MRP digunakan untuk melihat sektor ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan struktur ekonomi wilayah (Yusuf, 1999).

Keunggulan kompetitif dan spesialisasi suatu lapangan usaha di Sulbar dianalisis menggunakan alat analisis SS-EM. Hasil dari analisis LQ, MRP, dan SS-EM tersebut digabungkan menggunakan metode *Overlay* untuk menentukan sektor dan subsektor ekonomi di Sulawesi Barat yang potensial. Berdasarkan data PDRB Sulawesi Barat pdan PDB Nasional per lapangan usaha dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, diperoleh hasil analisis sektor dan subsektor unggulan di Provinsi Sulbar sebagaimana tampak pada tabel berikut (hasil lengkap pada Lampiran II).

Tabel 5.1 Hasil Analisis Potensi Sektor/Subsektor Ekonomi Provinsi Sulbar Tahun 2013 - 2018

Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha		LQ	MRP (RPs)	*Shift Share* EM		*Overlay*	
				Kompetitif (rij - rin)	Spesialisasi (Eij - E'ij)	(1234)	
1.	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**3,07**	**1,54**	**0,11**	**6.255,46**	**+ + + +**	●
	a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	3,03	1.63	0,12	4.777,08	+ + + +	●
	b. Perikanan	4,00	1,06	0,02	1.549,13	+ + + +	●
2.	**Industri Pengolahan**	**0,49**	**2,98**	**0,47**	**-2.861,76**	**- + + -**	●
	a. Industri Makanan dan Minuman	1,57	1,47	0,24	514,03	+ + + +	●
3.	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jamsos Wajib**	**2,55**	**2,27**	**0,26**	**1.090,30**	**+ + + +**	●
4.	**Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**	**1,88**	**1,12**	**0,05**	**224,80**	**+ + + +**	●

Sumber: Data PDRB BPS Sulbar (diolah, pilihan disesuaikan disesuaikan fokus pembahasan selanjutnya)

Keterangan:
1. Data sumber adalah data PDRB Sulbar dan PDB Nasional tahun 2013 - 2018.
2. Jika **nilai LQ > 1**, maka hasil *Overlay* 1 bertanda +, hal tersebut berarti sektor atau sub sektor usaha bersangkutan merupakan sektor basis dan memiliki **keunggulan komparatif**.
3. Jika **MRP (RPs) > 1**, maka hasil *Overlay* 2 bertanda +, artinya laju pertumbuhan sektor atau subsektor tersebut di Sulbar **lebih tinggi** dibandingkan di tingkat nasional.
4. Jika **(rij-rin) > 0**, maka hasil *Overlay* 3 bertanda +, artinya sektor atau subsektor tersebut memiliki **keunggulan kompetitif**.
5. Jika **(Eij – E*ij) > 0**, maka hasil *Overlay* 4 bertanda +, artinya sektor atau subsektor tersebut memliki keunggulan **spesialisasi**.
6. ● : Sektor/Subsektor Unggulan; ● : Sektor/Subsektor non unggulan.

Analisis Overlay menunjukkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor paling unggul di Sulbar pada tahun 2018.

Hasil analisis *Overlay* menunjukkan bahwa keunggulan beberapa sektor dan subsektor usaha di Sulbar dibandingkan dengan sektor lainnya, baik dari sisi keunggulan komparatif, laju pertumbuhan, keunggulan kompetitif, dan keunggulan spesialisasi. Lapangan usaha tersebut yaitu (1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; (3) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (4) Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian; (5) Subsektor Perikanan; dan (6) Subsektor Industri Makanan dan Minuman.

Grafik 5.1 *Scatter Plot* Tipologi Klassen Sektor Potensial Sulbar Tahun 2013 - 2018

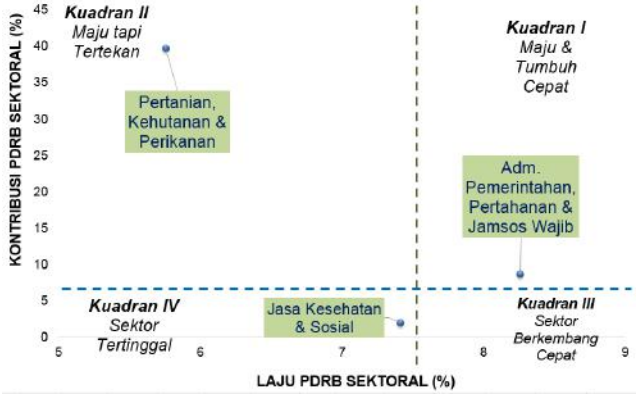

Sumber: BPS Prov. Sulbar (diolah)

Selanjutnya, analisis lebih dalam dilakukan menggunakan *scatter plot* Tipologi Klassen. Analisis Klassen memetakan posisi suatu sektor ekonomi di Sulbar berdasarkan laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektoral.

Meski unggul berdasarkan analisis *Overlay* yang menggunakan PDB nasional sebagai referensi studi, nampak bahwa sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,

Meski unggul berdasarkan analisis Overlay, nampak bahwa laju dan kontribusi sektor Jasa Kesehatan dan Sosial masih berada di bawah rata-rata laju sektor lainnya di Sulbar.

masih berada di kategori Sektor Tertinggal (Kuadran IV Tipologi *Klassen*). Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut masih memerlukan dorongan dari sisi fiskal agar laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Sulbar dapat melampaui rata-rata keseluruhan sektor di Sulbar.

5.2 SEKTOR DAN SUBSEKTOR POTENSIAL DI SULBAR

5.2.1 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Berdasarkan hasil analisis *Overlay* di atas, jelas terlihat keunggulan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Keunggulan komparatif sektor tersebut ditunjukkan oleh nilai LQ sebesar 3,07, lebih tinggi dibandingkan rata-rata keseluruhan LQ sektor unggulan di Sulbar sebesar 2,08. Hal tersebut berarti hasil produksi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan telah melebihi kebutuhan domestik Sulbar dan surplus produksinya didistribusikan ke daerah di luar Sulbar.

Grafik 5.2 Perkembangan Kontribusi dan Andil Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sulbar Tahun 2016 - 2018

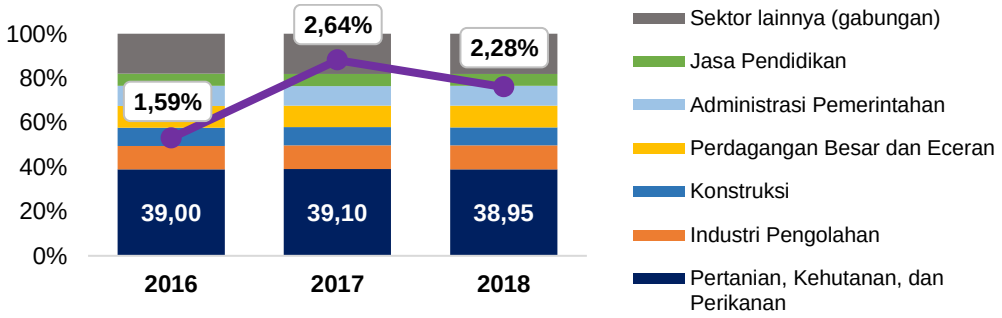

Sumber: BPS Provinsi Sulbar (diolah)

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi tulang punggung perekonomian di Sulbar. Sektor tersebut menyumbang 42,12 persen dari total PDRB (ADHB) di Sulbar. Namun, andil sektor tersebut terhadap laju PDRB Sulbar melambat sebesar 36 basis poin di tahun 2018 menjadi 2,28 persen. Hal tersebut dipicu oleh pelemahan harga CPO di pasar global yang mendorong pertumbuhan ekspor CPO melambat 581 basis poin, dari 17,82 persen di 2017 menjadi 12,01 persen.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 42,12 persen dari total PDRB (ADHB) di Sulbar.

Gambar 5.2 Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Sektoral di Sulbar Tahun 2018

Sumber: BPS Prov. Sulbar (diolah)

Salah satu faktor yang mendukung keunggulan sektor tersebut serapan tenaga kerja. Sektor tersebut menyerap 47,2 persen dari total 647 ribu tenaga kerja di Sulbar. Hal ini menjadi modal untuk mempertahanan keunggulan sektor basis tersebut di masa mendatang.

Namun, perlu diantisipasi adanya pergeseran tenaga kerja ke sektor lainnya terutama sektor Perdagangan yang tumbuh 12,2 persen di tahun 2018. Dari sudut pandang lain, hal tersebut menunjukkan perkembangan sektor non pertanian yang dapat mengurangi ketergantungan perekonomian Sulbar pada sektor pertanian. Hal tersebut penting mengingat sektor Pertanian sangat rentan terhadap volatilitas harga produk pangan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan industri pengolahan yang dapat menghasilkan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

5.2.2 Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Mengacu pada KLBI BPS (2017), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib terdiri dari kegiatan yang termasuk dalam administrasi pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, serta jaminan sosial wajib. Nilai PDRB dari sektor tersebut diperoleh dari penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan ditambah dengan penyusutan. Jumlah pegawai pemerintah di Sulbar menjadi indeks tertimbang yang berpengaruh terhadap fluktuasi kontribusi PDRB dari sektor dimaksud.

Grafik 5.3 Perkembangan Jumlah PNS di Sulbar dan Kontribusi PDRB Adm. Pemerintahan

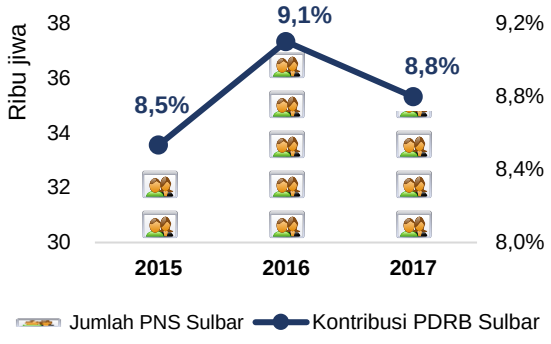

Sumber: BPS Prov. Sulbar (diolah)

Di tahun 2018, kontribusi sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib terhadap total PDRB (ADHK) di Sulbar tumbuh tipis 1 basis poin menjadi 8,9 persen (*yoy*). Hal tersebut didorong oleh penambahan personel di instansi Polda Sulbar dan Korem Tatag Sulbar.

ketergantungan ekonomi kepada sektor administrasi pemerintahan perlu dikurangi.

Pertumbuhan kontribusi sektor dimaksud dalam beberapa tahun ke depan diprediksi akan stabil pada kisaran delapan persen. Prediksi tersebut berdasarkan rata-rata pertumbuhan jumlah PNS di Sulbar yang hanya tumbuh 0,6 persen dalam tiga tahun terakhir. Lebih lanjut, kontribusi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (8,9 persen) terhadap PDRB Sulbar yang melampaui peranan sektor Konstruksi (8,1 persen), sektor Jasa Pendidikan (5,4 persen), dan usaha Tanaman Pangan (4,9 persen) menunjukkan keunggulan sektor tersebut di Sulbar. Namun demikian, ketergantungan ekonomi kepada sektor administrasi pemerintahan perlu dikurangi.

Hal tersebut menandakan bahwa sektor primer (pertanian) dan sekunder (industri pengolahan) masih memerlukan dukungan lebih dari pemerintah daerah. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi pemerintahan di Sulbar masih berbiaya tinggi. Pemerintah daerah dan unit instansi vertikal di Sulbar perlu meningkatkan efisiensi kegiatan administrasi pemerintahan. Penyederhanaan alur birokrasi dan penerapan administrasi berbasis IT seperti aplikasi *E-Office* dan rapat kerja melalui media *video conference* dapat menjadi langkah awal efisiensi tersebut.

5.2.3 Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menjadi sektor potensial di Sulbar mengingat laju pertumbuhan PDRB sektoralnya di tahun 2018 melampaui laju sektor tersebut di tingkat nasional. Selain itu, sektor tersebut berperan penting terhadap perbaikan IPM Sulbar.

Grafik 5.4 Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan di Sulbar 2016-2018

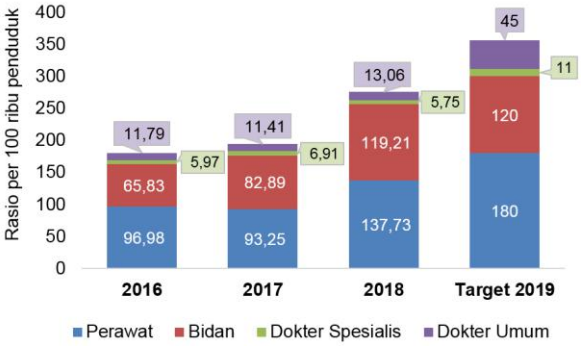

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sulbar, Menkokesra (diolah)

Kenaikan rasio tenaga kesehatan per 100 ribu penduduk di Sulbar menunjukkan semakin luas nya akses terhadap layanan kesehatan.

Hal tersebut tercermin pada perbaikan Angka Harapan Hidup (AHH) yang terakselerasi sebesar 3 basis poin menjadi 64,34 persen di tahun 2017. Kinerja tersebut didukung oleh kenaikan rasio tenaga kesehatan. Rasio dokter umum, bidan, dan perawat semakin mendekati target rasio ideal tahun 2019. Hal ini merupakan indikasi bahwa masyarakat Sulbar memiliki akses yang semakin luas terhadap layanan kesehatan.

Namun, terdapat tantangan yang membutuhkan dukungan dari sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Angka kematian bayi di Sulbar menunjukkan peningkatan rata-rata 14 persen dalam rentang tahun 2014 sampai dengan 2016. Sementara itu, prevalensi *stunting* atau anak bertubuh pendek di Sulbar mencapai 40 persen, tertinggi kedua secara nasional setelah NTT[1] (Kementerian Kesehatan, 2018).

Upaya pencegahan harus dilakukan guna menghindari kerugian ekonomi jangka panjang di Sulbar. Pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dengan meningkatkan upaya peningkatan gizi ibu hamil dan balita. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang mewajibkan penggunaan sebagian Dana Desa untuk kegiatan peningkatan gizi warga desa.

[1] Kementerian Kesehatan, *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017,* (Jakarta: Kementerian Kesehatan), hlm 47.

Grafik 5.5 Prevalensi Stunting di Sulbar Tahun 2017

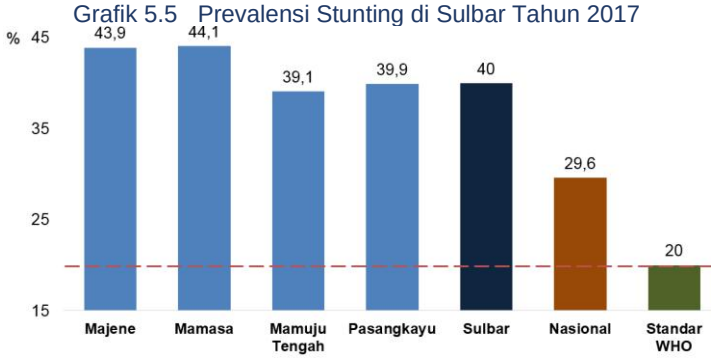

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sulbar, Kemenkses (diolah)

Program tersebut dapat diaplikasikan melalui pemberian makanan tambahan bagi balita, intensifikasi pemberian ASI eksklusif, dan peningkatan peran posyandu dan PKK di masing-masing desa. Upaya tersebut membutuhkan komitmen dan koordinasi dari seluruh pihak terkait baik Dinas Kesehatan, BKKBN, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, aparatur desa, dan masyarakat.

5.2.4 Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian

Pada tahun 2018, subsektor ini memberikan kontribusi sebesar 73,17 persen terhadap PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Bahkan, subsektor tersebut memberikan sumbangan sebesar 30,82 persen terhadap total PDRB (ADHB) Provinsi Sulbar. Kontribusi tersebut melebihi peranan Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Konstruksi yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 9,7 persen dan 8,25 persen terhadap PDRB (ADHB) Sulbar Tahun 2018. Hal tersebut mengkonfirmasi keunggulan subsektor tersebut berdasarkan analisis *Overlay* di atas.

Gambar 5.3 Luas Panen Tanaman Pangan di Sulbar Tahun 2017

Sumber: BPS Prov. Sulbar

Serapan tenaga kerja pertanian di Sulbar sebesar 47,2 persen.

Serapan tenaga kerja pertanian sebesar 47,2 persen dan ketersediaan lahan pertanian yang luas menjadi faktor kunci keunggulan subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Sulbar. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Sulbar, luas lahan sawah di Sulbar tahun 2017 mencapai 64.232 hektar (Ha). Sementara luas lahan kering mencapai 279.156 Ha. Faktor lainnya yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian adalah iklim yang kondusif. Terbukti, meskipun luas panen jagung mengalami penurunan di tahun 2018, produktivitas komoditi Jagung meningkat 3,04 persen (*yoy*). Kinerja positif tersebut didukung oleh tingginya curah hujan yang turun merata sepanjang tahun.

Selanjutnya jika dianalisis lebih dalam, usaha ekonomi Perkebunan memiliki potensi paling besar terhadap perekonomian di Sulbar. Lapangan usaha tersebut memberikan

kontribusi sebesar 19,68 persen terhadap total PDRB (ADHB) Sulbar Tahun 2018. Usaha Tanaman Perkebunan tersebut mencakup kegiatan cocok tanam tanaman perkebunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (BPS, 2018). Komoditas unggulan Tanaman Perkebunan di Sulbar antara lain kelapa, kakao, kelapa sawit, dan kopi.

Kelapa sawit menjadi komoditas primadona usaha Perkebunan di Sulbar. Produksi kelapa sawit di Sulbar tahun 2018 mencapai 258.503 ton, tumbuh 12,2 persen dibandingkan tahun 2017. Peningkatan nilai produksi tersebut didorong oleh tingginya curah hujan sepanjang tahun 2018 dan kembali pulihnya tanaman sawit setelah terkena dampak El Nino pada 2015 .

Grafik 5.6 Perbandingan Produktivitas Komoditas Pertanian Sulbar dan Nasional Tahun 2017

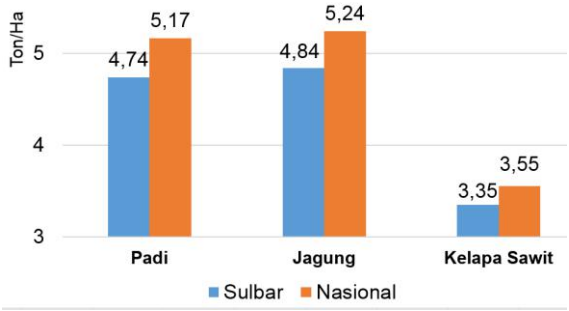

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2018, BPS (diolah)

Tata kelola pertanian di Sulbar yang secara umum masih dilakukan secara tradisional.

Namun, dibalik kinerja positif di atas, terdapat tantangan yang harus diatasi yakni produktivitas yang relatif rendah. Hal tersebut berhubungan dengan tata kelola pertanian di Sulbar yang secara umum masih dilakukan secara tradisional. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian dan perkebunan di Sulbar, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, baik dari sisi peningkatan produksi, pengaman produksi, perluasan dan pengolahan lahan, serta penyempurnaan manajemen pertanian.

Tabel 5.2 Strategi Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan di Sulbar

Peningkatan Produksi	• Penggunaan varietas unggul bermutu. • Penyediaan alat mesin pertanian. • Penerapan sistem tanam jajar legowo dan teknologi Hazton. • Pemakaian pupuk organik.
Pengamanan Produksi	• Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). • Mengurangi kehilangan hasil saat panen dan pascapanen. • Pengadaan Cadangan Benih Daerah (CBD)
Perluasan dan Pengolahan Lahan	• Optimasi Lahan pertanian. • Rehab dan pembangunan jaringan irigasi. • Penanaman tumpang sari di lahan perkebunan dan kehutanan. • Penambahan baku lahan sawah (cetak sawah baru) • Pengelolaan air irigasi.
Penyempurnaan Manajemen Pertanian	• Pemanfaatan kelembagaan petani secara optimal. • Mempermudah akses bantuan keuangan petani melalui KUR dan UMi. • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Penyuluh Pertanian. • Penyempurnaan pedoman dan regulasi pertanian.

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Sulbar, Kanwil DJPb Sulbar (diolah)

5.2.5 Sub Sektor Perikanan

Berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Baku Indonesia (KLBI) tahun 2017 yang diterbitkan BPS, Subsektor Perikanan mencakup usaha penangkapan dan budidaya ikan, jenis *crustacea* (udang, kepiting), *mollusca*, dan biota air lainnya di laut, air payau, dan air tawar. Posisi geografis Provinsi Sulbar yang mayoritas berbatasan dengan wilayah perairan laut menyiratkan potensi besar di subsektor perikanan. Garis pantai yang membentang sepanjang 617,5 kilometer menjadi salah satu aset alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Grafik 5.7 Perbandingan Kontribusi dan Laju PDRB Subsektor Perikanan Sulbar dan Nasional

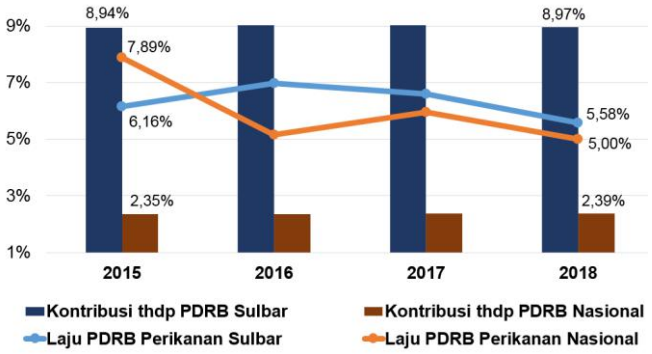

Sumber: BPS (diolah)

Keunggulan subsektor Perikanan di Sulbar nampak pada komparasi dengan perkembangan di tingkat nasional. Dalam tiga tahun terakhir, subsektor Perikanan di Sulbar mengungguli capaian di tingkat nasional, baik dari sisi laju pertumbuhan maupun kontribusi terhadap total PDRB.

Dalam tiga tahun terakhir, subsektor Perikanan di Sulbar mengungguli capaian di tingkat nasional.

Jumlah nelayan menjadi faktor pendukung lainnya disamping wilayah laut yang luas. Tercatat jumlah nelayan di Sulbar yang terverifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai 30.837 orang dengan konsentrasi di Kabupaten Majene. Sementara itu, pembudidaya ikan di Sulbar mencapai 9.990 orang dengan konsentrasi di Mamasa.

Gambar 5.4 Sebaran Profesi Subsektor Perikanan di Sulbar Tahun 2018

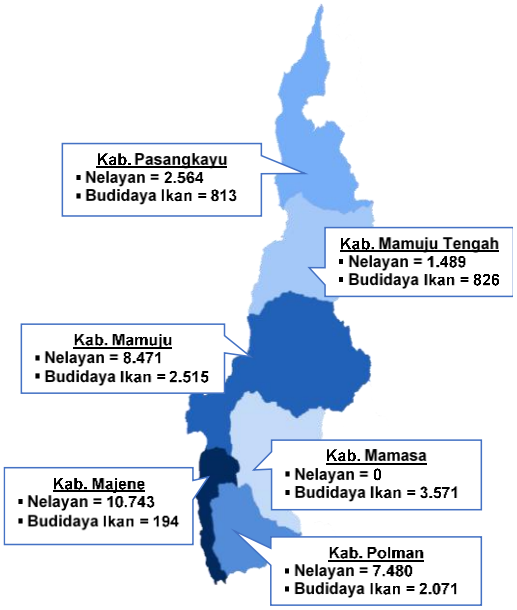

Sumber: KKP (diolah)

Namun, Sumber daya perikanan yang melimpah tersebut belum sepenuhnya tergali. Pemerintah daerah dapat berkontribusi dengan menyediakan fasilitas pembiayaan terjangkau dan kemudahan perizinan.

Hal tersebut penting untuk meningkatkan kontribusi usaha Perikanan terhadap PDRB Sulbar yang mencapai 8,97 persen di tahun 2018. Lebih lanjut, keterbatasan fasilitas *cold storage* perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Keterbatasan fasilitas cold storage perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Kurangnya pasokan listrik untuk operasionalisasi *cold storage* seyogyanya dapat ditangani oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan PLN. Dengan adanya fasilitas penyimpanan tersebut, pasokan ikan di Sulbar dapat dijaga sepanjang tahun sehingga volatilitas harga ikan yang selama ini menjadi penyebab inflasi di Sulbar dapat dikendalikan. Selain itu, prasarana tersebut dapat mendukung ekspor komoditas ikan yang telah diinisiasi oleh pemerintah daerah melalui ekspor perdana 10 ton ikan terbang ke Jepang pada September 2018[2].

5.2.6 Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman

Subsektor ini menjadi satu-satunya subsektor di kelompok Industri Pengolahan yang meraih nilai positif penuh pada hasil analisis *Overlay* tahun 2018. Keunggulan subsektor tersebut terlihat pada kontribusinya terhadap PDRB Sulbar tahun 2018 yang mencapai 9,9 persen atau tumbuh 10 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya. Subsektor ini mencakup kegiatan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan serta industri pembuatan minuman.

Nilai tambah perekonomian di subsektor ini mayoritas bersumber dari industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut selaras dengan tingginya produksi sektor perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Barat. Hasil produksi berupa Tandan Buah Sawit (TBS) diolah oleh perusahan CPO *refinery* yang berlokasi di Kabupaten Pasangkayu.

Grafik 5.8 Kontribusi CPO terhadap Ekspor Sulbar Tahun 2018

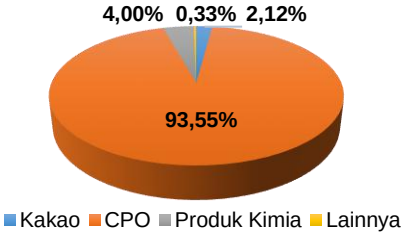

Sumber: Kantor Perwakilan BI Prov. Sulbar (diolah)

Produk CPO Sulbar merupakan produk penopang kegiatan ekspor di Sulbar. Dalam empat tahun terakhir, kontribusi ekspor CPO per tahun mencapai rata-rata 94,5 persen dari keselurahan nilai ekspor yang ada. Dibalik keunggulan industri pengolahan kelapa sawit tersebut, terdapat beberapa tantangan yang harus diantisipasi.

Nilai tambah perekonomian di subsektor Industri Makanan dan Minuman mayoritas bersumber dari industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.

Nilai tambah ekonomi di sektor pengolahan kelapa sawit di Sulbar belum sepenuhnya optimal mengingat produk utamanya masih berbentuk CPO. Volatilitas qharga CPO di pasaran dunia secara langsung akan berpengaruh terhadap nilai ekspor CPO dan PDRB Sulbar secara keseluruhan. Optimalisasi dapat dilakukan dengan mengolah lebih lanjut CPO menjadi produk turunannya, antara lain olein dan stearin.

[2] https://kkp.go.id/kkp/bkipm/artikel/6346-10-ton-ikan-terbang-berhasil-diekspor-ke-jepang, diakses tanggal 19 Februari 2019.

Harga komoditas turunan CPO tersebut di pasar global lebih tinggi dibandingkan harga CPO sehingga ada potensi nilai tambah terhadap perekonomian di Sulbar.

Untuk mewujudkan optimalisasi industri pengolahan kelapa sawit, pemerintah daerah dapat mengambil peran. Keran investasi dapat dibuka melalui pemberian insentif usaha bagi para investor dalam mendirikan pabrik pengolahan produk turunan CPO di Sulbar. Insentif usaha tersebut dapat berupa kemudahan perijinan pendirian usaha. Selain itu, pemerintah daerah dapat meminjamkan lahan miliknya untuk dijadikan lokasi pabrik pengolahan dengan kompensasi berupa skema Bangun Guna Serah.

Melalui skema kerja sama tersebut, kepemilikan pabrik pengolahan tersebut akan beralih ke pemerintah daerah pada akhir masa kerja sama. Selanjutnya pemerintah daerah dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendirikan perusahaan pengolah sawit milik daerah yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan para petani dan pengolah sawit serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulbar.

5.3 TANTANGAN FISKAL REGIONAL

5.3.1 Urgensi Pemerataan Pola Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran pemerintah di Sulbar cenderung menumpuk di akhir tahun.

World Bank menyebut negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki tantangan dalam penyerapan anggaran yang disebut *slow back-loaded absorption*[3]. Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal sampai tengah tahun anggaran kemudian melonjak memasuki akhir tahun. Pola penyerapan tersebut nampak pada realisasi anggaran pemerintah di Sulbar pada tahun 2018. Sampai dengan triwulan III, belanja APBN baru terealisasi sebesar 59 persen, selebihnya realisasi di triwulan IV. Demikian halnya dengan penyerapan belanja APBD di Sulbar yang melonjak menjadi 39,3 persen di triwulan akhir 2018.

Grafik 5.9 Perkembangan Persentase Penyerapan Belanja APBN dan APBD di Sulbar Tahun 2015-2018

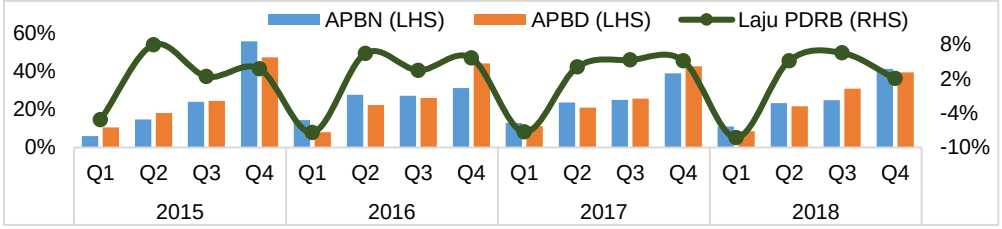

Sumber: OMSPAN, SIKD, BPS Prov. Sulbar (diolah)

Realisasi belanja APBN dan APBD merupakan komponen konsumsi pemerintah dan investasi pada formula perhitungan PDRB. Komponen tersebut menjadi salah satu pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi di Sulbar dengan kontribusi sebesar 19,38

[3] Rinda Wardhanie et al, *Agency Theory to Analyze Slow Back Loaded Expenditure of Deconcentration Implementation*, (Jember: *International Conference and Call for Papers*, 2017), hlm. 506.

persen. Tren penyerapan yang menumpuk di akhir tahun menyebabkan kurang optimalnya manfaat dan efek stimulus ekonomi yang ditimbulkan. Penumpukan realisasi belanja di ujung tahun memberikan kesan seolah penyerapan anggaran adalah target alokasi anggaran. Padahal, keberhasilan kinerja pelaksanaan anggaran dalam kerangka *Performanced Based Budgeting* diukur dengan kinerja capaian *output* dan *outcome*, bukan besaran penyerapan anggaran.

Tren penyerapan yang menumpuk di akhir tahun menyebabkan kurang optimalnya manfaat dan efek stimulus ekonomi yang ditimbulkan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan laju perekonomian, laju PDRB di kuartal I cenderung melambat dibanding kuartal IV tahun sebelumnya. Tren tersebut linear dengan pola serapan realisasi belanja pemerintah di kuartal yang sama. Ketidakmerataan persentase penyerapan belanja pemerintah menunjukkan adanya *idle cash* pada periode awal tahun anggaran. *Idle cash* tersebut semestinya dapat dimanfaatkan sebagai stabilisator laju perekonomian di Sulbar. Pengadaan barang dan jasa oleh satker pemerintah dapat menjadi insentif bagi pelaku usaha dalam berproduksi serta mendorong penyerapan tenaga kerja di Sulbar.

Grafik 5.10 Perkembangan Penyerapan Belanja APBN di Sulbar per Bulan Tahun 2018

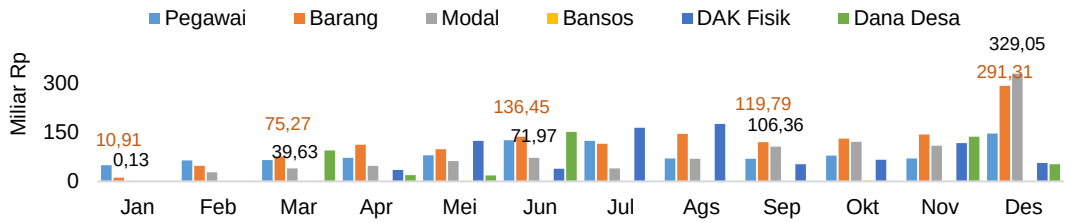

Sumber: OMSPAN, SIKD, BPS Prov. Sulbar (diolah)

Selanjutnya jika dilihat lebih dalam per jenis belanja APBN, nampak bahwa komponen belanja modal dan belanja barang menjadi kontributor terbesar pola *slow back-loaded absorption* di Sulbar. Sampai dengan kuartal I 2018, serapan 6,6 persen dari keseluruhan realisasi belanja modal tahun 2018. Nilai penyerapan kelompok belanja tersebut melonjak tajam menjadi 54,6 persen di kuartal IV 2018. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan pola penyerapan belanja pemerintah, khususnya pada kelompok belanja modal yang umumnya berkaitan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur di Sulbar.

Komponen belanja modal dan belanja barang menjadi kontributor terbesar pola *slow back-loaded absorption* di Sulbar.

Pola *slow back-loaded* berkaitan dengan pola pengadaan barang dan jasa yang lambat dan terkonsentrasi di akhir tahun anggaran. Untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja, satker pemerintah baik pusat maupun organisasi perangkat daerah dapat memanfaatkan fasilitas lelang pra DIPA/RKA[4]. Pemilihan penyedia barang dan

[4] Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 60 ayat (3) sebagaimana telah diubah dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pasal 50 ayat (9).

jasa dapat dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan sehingga kontrak pengadaan dapat ditandatangani di awal tahun. Dengan demikian, realisasi anggaran khususnya belanja modal dapat dilakukan lebih awal dan terdistribusi lebih merata sepanjang tahun.

Grafik 5.11 Proporsi Revisi Perubahan Pagu Belanja APBN di Sulbar Tahun 2018

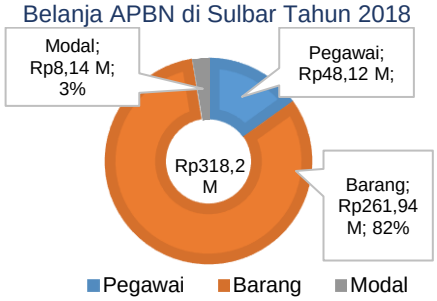

Sumber: Bidang PPA I Kanwil DJPb Sulbar (diolah)

Namun demikian, untuk menerapkan lelang dini tersebut, satker pemerintah lingkup Sulbar perlu melakukan proses perencanaan anggaran dengan baik serta meningkatkan akurasi perencanaan kas. Perencanaan anggaran belanja yang baik dapat dilihat dari revisi DIPA yang dilakukan oleh satker.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja, satker dapat memanfaatkan fasilitas lelang pra DIPA/DPA.

Perencanaan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan riil akan mendorong satker untuk melakukan revisi DIPA. Hal tersebut nampak pada revisi penambahan pagu APBN di Sulbar tahun 2018. Pada bulan Maret dan September tercatat penambahan pagu belanja barang masing-masing sebesar Rp136,6 miliar dan Rp40,87 miliar. Sebaliknya di bulan Juli 2018 terjadi pengurangan pagu belanja barang sebesar Rp29,72 miliar. Hal tersebut berpengaruh kepada proses penyerapan anggaran yang tidak optimal dan pada akhirnya menumpuk di akhir tahun anggaran.

Sementara itu, perencanaan kas yang kurang akurat oleh satker pemerintah dapat menyebabkan pergeseran realisasi anggaran belanja yang tidak berhasil dicairkan tepat pada waktunya. Pemerintah daerah dapat menerapkan prosedur Rencana Penarikan Dana (RPD) baik harian maupun bulanan. RPD bermanfaat untuk memastikan ketersediaan dana di kas daerah. Di sisi lain, satker pemerintah daerah akan terdorong untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara rutin dan akurat sesuai kebutuhan riil. Hal tersebut akan membentuk pola penyerapan anggaran yang teratur dan terdistribusi secara merata di periode anggaran berikutnya.

Penerapan Rencana Penarikan Dana (RPD) di satker pemda dapat membentuk pola penyerapan anggaran yang teratur dan terdistribusi secara merata.

5.3.2 Optimalisasi Potensi Pajak dari Sektor Ekonomi Unggulan

Pemerintah memerlukan penerimaan dari sektor perpajakan untuk mendanai pengeluaran publiknya. Seiring pertambahan penduduk sebesar 3,8 persen dari 1,3 juta penduduk di tahun 2016 menjadi 1,35 juta di tahun 2018, pengeluaran publik oleh pemerintah daerah dan instansi vertikal pusat di Sulbar akan semakin meningkat. Kontras, kinerja penerimaan pajak konsolidasian dibandingkan total PDRB di Sulbar terus mengalami penurunan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa t*ax ratio* konsolidasian menurun dari 3,55 persen di tahun 2016 menjadi 3,17

persen di tahun 2018. Sementara pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 ke tahun 2018 tumbuh 13,3 persen. Hal tersebut menjadi tantangan fiskal di Sulbar mengingat realisasi penerimaan pajak belum selaras dengan perkembangan perekonomian.

Grafik 5.12 Perbandingan Kontribusi PDRB dan Pajak Sektoral di Sulbar Tahun 2018

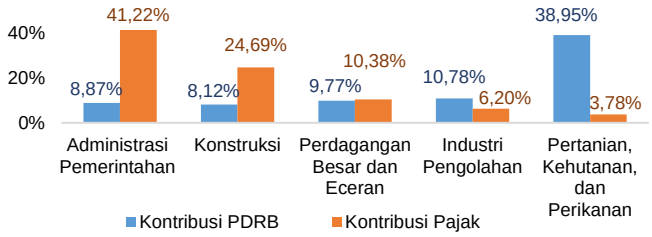

Sumber: BPS Prov. Sulbar, KPP Pratama Mamuju dan Majene (diolah)

Sumbangan realisasi penerimaan pajak dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbanding terbalik dengan kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB Sulbar tahun 2018.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan kontribusi penerimaan pajak per sektor usaha, nampak adanya potensi pajak yang belum tergali di sektor unggulan di Sulbar. Sumbangan realisasi penerimaan pajak sebesar 3,78 persen dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbanding terbalik dengan kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB Sulbar tahun 2018 sebesar 38,95 persen. Sebaliknya, sektor Administrasi Pemerintahan menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar meskipun peranan sektor tersebut terhadap PDRB hanya 8,87 persen.

Rendahnya kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan tersebut selaras dengan studi yang menyatakan bahwa dominasi sektor pertanian subsisten (*swasembada*) terhadap suatu daerah cenderung akan melemahkan penerimaan pajak di daerah tersebut[5]. Hal tersebut terkorelasi dengan status komoditas sektor tersebut yang mayoritas bukan merupakan Barang Kena Pajak (BKP). Komoditas seperti beras, gabah, jagung, kedelai, telur, sayur dan buah-buahan tidak dikenakan PPN termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat[6].

Selain itu, komoditas ikan meskipun termasuk kategori BKP, namun dibebaskan dari pengenaan PPN karena termasuk kategori BKP tertentu yang bersifat strategis[7]. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Sulbar. Banyaknya komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terbebas dari pengenaan pajak menjadi tantangan bagi instansi pajak di Sulbar untuk menggali potensi cakupan pajak (*tax coverage*). Selain itu, sektor tersebut umumnya didominasi oleh pekerja individu dengan skala usaha kecil.

Di sinilah pemerintah daerah dapat mengambil peran dengan mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil mentah sektor Pertanian, Kehutanan, dan

[5] Sherly Ering et al, *Analisis Potensi Pajak Daerah Untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara*, (Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 2017), hlm. 5.

[6] Sebagaimana ketentuan pada Pasal 4A ayat 2 dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM).

[7] BPPK Kemenkeu, *Ikan, Apakah BKP?*, (https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21082-ikan,-apakah-bkp, diakses tanggal 20 Februari 2019)

Perikanan. Pengolahan lanjutan produk sektor tersebut dapat menghasilkan produk yang dapat dikenakan pajak misalnya berupa roti, keju, kerajinan rotan dan furnitur, serta sarden. Hal tersebut dapat meningkatkan potensi pajak khususnya PPN yang pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 48,9 persen terhadap total penerimaan pajak. Peningkatan potensi penerimaan pajak tersebut akan meningkatkan *tax ratio* dan memperluas ruang fiskal di Sulbar. Ruang fiskal yang luas menjadi modal untuk menggiatkan pembangunan khususnya infrastruktur yang penting bagi perekonomian.

Pemda dapat mengambil peran dengan mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil mentah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

5.3.3 Urgensi Pembangunan Infrastruktur di Sulbar

Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai menjadi hal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, gerak roda perekonomian menjadi tidak efisien. Biaya logistik yang menjadi komponen penting interaksi ekonomi antar daerah menjadi sangat tinggi. Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai dapat mempengaruhi iklim investasi. Masalah logistik yang tidak efisien tersebut dapat memicu keengganan pelaku bisnis untuk membuka peluang usaha di suatu daerah.

Infrastruktur yang tidak memadai dapat mempengaruhi iklim investasi di Sulbar.

Gambar 5.5 Persentase Perubahan Realisasi Belanja Infrastruktur dan Pegawai di Sulbar Tahun 2017-2018

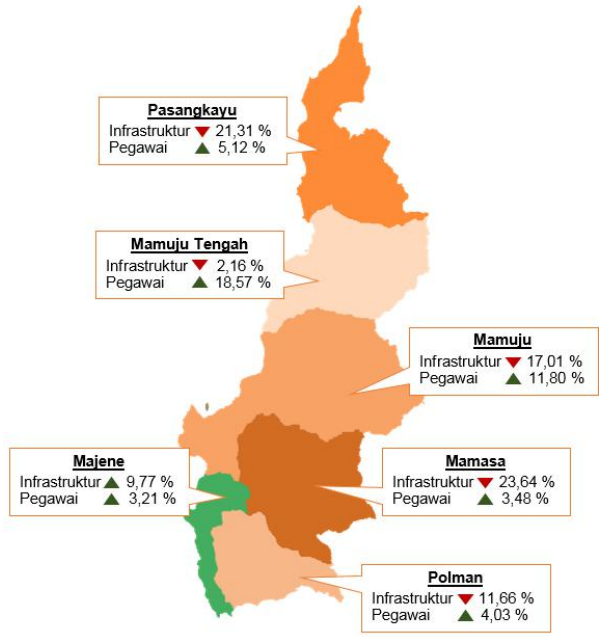

Sumber: MEBE, LKPD lingkup Prov. Sulbar (diolah)

Dalam *Global Competitiveness Report* 2017-2018 yang disusun oleh *World Economic Forum* (WEF), Indonesia menempati urutan ke-52 dari 137 negara di dunia dalam hal pembangunan infrastruktur. Kinerja tersebut membaik setelah di periode 2015-2016 menempati urutan ke-60.

Kontras, kondisi sebaliknya terjadi di wilayah Sulbar. Dibandingkan periode sebelumnya, total belanja infrastruktur konsolidasian di Sulbar pada tahun 2018 menurun sebesar 14,66 persen (*yoy*).

Hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan ruang fiskal di Sulbar. Anggaran belanja pemerintah sebagian besar telah dialokasikan untuk memenuhi belanja wajib antara lain belanja pegawai yang realisasinya tumbuh sebesar 7,64 persen (*yoy*) di tahun 2018. Dari seluruh kabupaten

di Sulbar, hanya kabupaten Majene yang realisasi belanja infrastrukturnya meningkat sebesar 9,77 persen (*yoy*).

Untuk mengatasi tantangan fiskal tersebut sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur di Sulbar, ruang fiskal pemerintah di Sulbar perlu diperluas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi belanja operasional pemerintah khususnya belanja pegawai. Masing-masing organisasi perangkat daerah dapat melakukan *spending review* secara rutin atas realisasi APBD untuk mengetahui pos-pos belanja yang kurang efektif dan efisien untuk selanjutnya melakukan re-alokasi anggaran ke pos belanja infrastruktrur.

Perluasan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi belanja operasional pemerintah khususnya belanja pegawai.

Grafik 5.13 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur di Sulawesi Tahun 2018

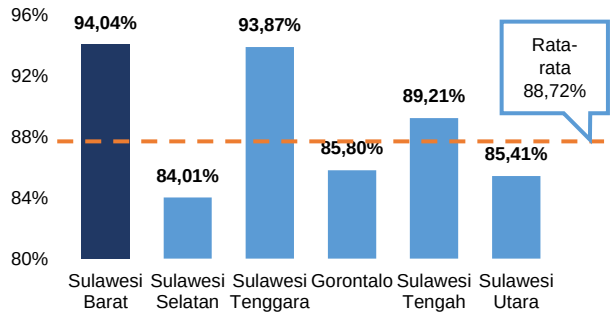

Sumber: Monev PA, OMSPAN (diolah)

Lebih lanjut, pemerintah dapat meningkatkan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan realisasi anggaran belanja modal yang tersedia. Pada tahun 2018, realisasi belanja infrastruktur APBN di Sulbar berada di atas rata-rata penyerapan lingkup Sulawesi. Namun demikian, dibandingkan kinerja penyerapan belanja modal di tahun 2017, capaian tersebut melambat 2,27 persen.

Pengurangan belanja subsidi untuk perluasan ruang fiskal harus dilakukan secara selektif.

Langkah lain yang dapat ditempuh pemerintah adalah menekan belanja subsidi. Namun, hal tersebut perlu dilakukan secara hati-hati. Belanja subsidi yang terkait dengan sektor unggulan Sulbar di bidang pertanian (subsidi benih dan pupuk) harus dipertahankan. Melalui upaya-upaya di atas, ruang fiskal di Sulbar dapat diperluas dan memberikan ruang lebih bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur guna memberikan *multipier effect* yang lebih besar terhadap perekonomian di Sulbar.

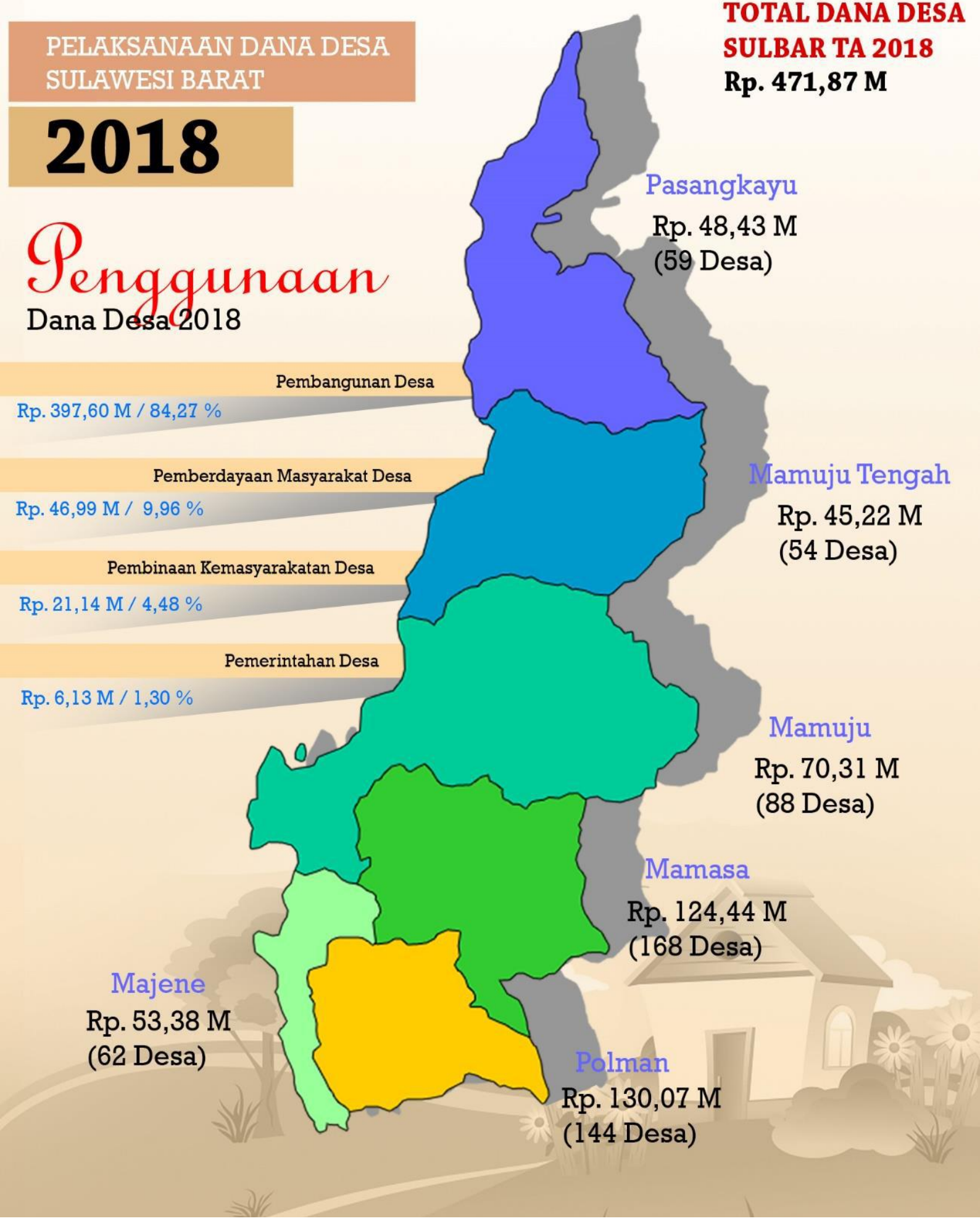
PELAKSANAAN DANA DESA
SULAWESI BARAT
2018
Penggunaan
Dana Desa 2018
Pembangunan Desa
Rp. 397,60 M / 84,27 %
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 46,99 M / 9,96 %
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 21,14 M / 4,48 %
Pemerintahan Desa
Rp. 6,13 M / 1,30 %
TOTAL DANA DESA
SULBAR TA 2018
Rp. 471,87 M
Pasangkayu
Rp. 48,43 M
(59 Desa)
Mamuju Tengah
Rp. 45,22 M
(54 Desa)
Mamuju
Rp. 70,31 M
(88 Desa)
Mamasa
Rp. 124,44 M
(168 Desa)
Majene
Rp. 53,38 M
(62 Desa)
Polman
Rp. 130,07 M
(144 Desa)

BAB VI ANALISIS TEMATIK

Kontribusi dan Tantangan Dana Desa Dalam Upaya Untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan di Sulbar

6.1 Kontribusi Dana Desa terhadap Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Desa di Wilayah Sulbar

Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, desa harus dibangun dan diperkuat. Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa[8].

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kegiatan Dana Desa diarahkan dan dilaksanakan dengan cara swakelola. Pelaksanaan kegiatan harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip tata kelola yang baik. Dana Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan di perdesaan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2018 alokasi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan. Apabila dihitung mulai dari tahun pelaksanaan Dana Desa di Sulbar (tahun 2015), maka sampai dengan akhir tahun 2018 Sulbar telah menerima Dana Desa sebesar Rp1,48 triliun.

[8] Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu RI, 2017), hlm. 2.

Grafik 6.1 Relevansi Perkembangan Realisasi Dana Desa dan *Gini Ratio* Desa di Sulbar

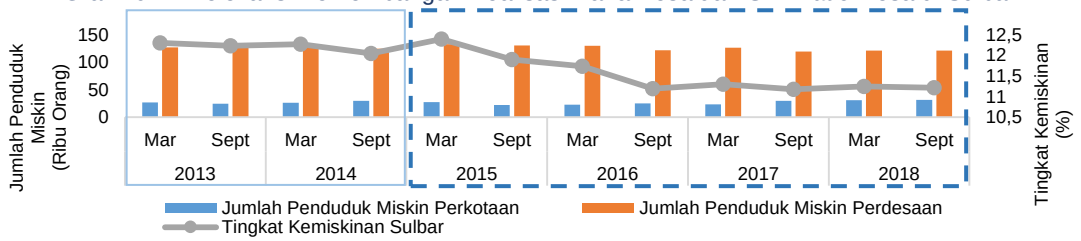

Sumber: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Dalam kurun empat tahun tersebut, kondisi kesejahteraan masyarakat desa turut mengalami perbaikan. Kondisi kemiskinan misalnya. Secara prosentase, tingkat kemiskinan warga Sulbar menunjukkan tren menurun dari 12,3 persen di Maret 2013 menjadi 11,22 di September 2018. Dari grafik di atas, tampak adanya perbedaan tren penurunan antara tahun 2013-2014 dan antara tahun 2015-2018. Dalam rentang tahun 2013-2014, tren penurunan tingkat kemiskinan tampak lebih landai, sebaliknya pada tahun 2015-2018 menunjukkan tren penurunan yang lebih cepat, utamanya di tahun 2015-2016.

Grafik 6.2 Relevansi Perkembangan Realisasi Dana Desa dan Kemiskinan Warga Desa di Sulbar

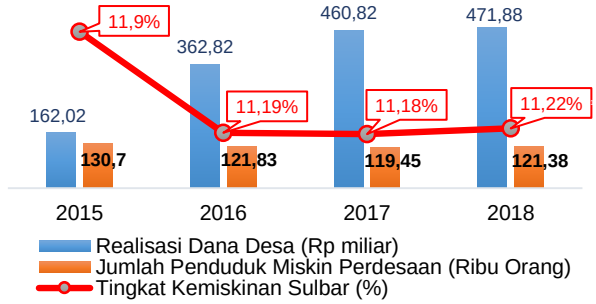

Sumber:OMSPAN; BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Jika dikaitkan dengan kondisi kemiskinan, maka pelaksanaan Program Dana Desa secara umum telah membantu percepatan penanggulangan kemiskinan, khususnya di daerah perdesaan. Tren peningkatan pada realisasi Dana Desa diikuti dengan tren penurunan angka kemiskinan di daerah perdesaan, kecuali pada tahun 2018 yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah orang miskin.

Tren peningkatan pada realisasi Dana Desa diikuti dengan tren penurunan angka kemiskinan di daerah perdesaan.

Grafik 6.3 Relevansi Perkembangan Realisasi Dana Desa dan Gini Ratio Perdesaan di Sulbar

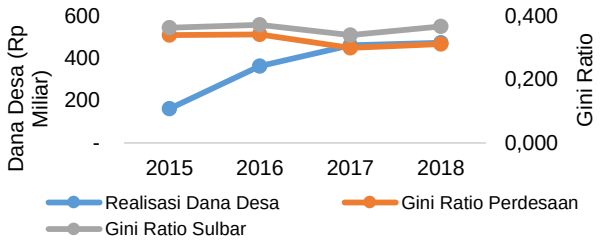

Sumber:OMSPAN: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Hal serupa juga terjadi pada indikator ketimpangan kesejahteraan warga Sulbar. Nampak adanya hubungan negatif yang terjadi secara konsisten selama tahun 2015-2017 antara realisasi Dana Desa dengan Gini Ratio.

Nampak adanya hubungan negatif yang terjadi secara konsisten selama tahun 2015-2017 antara realisasi Dana Desa dengan Gini Ratio.

Selain itu, Hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilakukan oleh BPS Sulbar menunjukkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) mengalami peningkatan

pada hampir semua dimensi Penyusun IPD seperti Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Transportasi, Pelayanan umum, dan Pemerintahan Desa. Perbaikan yang terjadi pada kelima dimensi dimaksud telah mengangkat status desa yang ada di Sulbar. Terdapat *shifting* kategori desa sebagaimana yang nampak dalam grafik di bawah ini:

Selanjutnya dari kelima dimensi tersebut, dimensi Kondisi Infrastruktur mengalami kenaikan tertinggi, yakni sebesar 7,83 basis poin dari 31,07 di tahun 2014 menjadi 38,90 di tahun 2018.

Grafik 6.4 Perkembangan Jumlah Desa Berdasarkan Kategori Indeks Pembangunan Desa di Sulbar

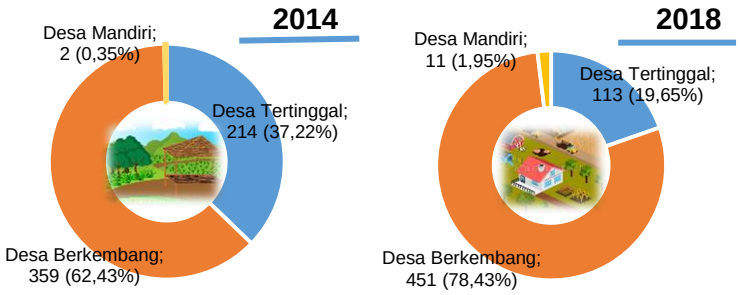

Sumber: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Kondisi Infrastruktur mengalami kenaikan tertinggi, yakni sebesar 7,83 basis poin dari 31,07 di tahun 2014 menjadi 38,90 di tahun 2018.

Kondisi tersebut sejalan dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang dalam empat tahun terakhir diatur 70 persen ditujukan untuk Program Pembangunan Fisik Desa. Berdasarkan data capaian output Dana Desa tahun 2018, Dana Desa telah menghasilkan pembangunan/perbaikan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat.

Gambar 6.1 Capaian Output Penggunaan Dana Desa di Sulbar Tahun 2017-2018

Jalan Desa,
1.059.985 Meter / Rp416,08 Miliar

Jembatan Desa
9.066 Meter / Rp33,96 Miliar

Sarpras Air Bersih
7.259 Unit / Rp14,19 Miliar

Embung Desa
211 Unit / Rp296,45 Juta

Polindes/Posyandu/PKD Lainnya
270 Unit / Rp11,44 Miliar

Pasar Desa
57 Unit / Rp620,92 Juta

Sumur Desa
669 Unit / Rp10,88 Miliar

PAUD
369 Unit / Rp9,35 Miliar

Drainase dan Irigasi
157.765 Meter / Rp67,50 Miliar

Seiring dikucurkannya Dana Desa sejak tahun 2015 lalu, geliat pembangunan di desa nampak semakin bergairah dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan warga desa. Tahapan perencanaan pembangunan dan kegiatan lainnya yang didahului dengan musyawarah desa dapat mewujudkan peran serta dan kepedulian warga pada kondisi desanya. Sisi positif lainnya, penekanan terhadap penggunaan tenaga kerja dan

bahan baku lokal serta pelaksanaan pengerjaan pembangunan secara swakelola dinilai cukup memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga desa.

Sumber-sumber potensi desa di Sulawesi Barat sebagian besar berasal dari aktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan, sehingga pembangunan, peningkatan dan perluasan akses penghubung ke sentra-sentra produksi menjadi prioritas seluruh desa. Mulai dari pembangunan/peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta penyediaan sarpras pendukung lainnya seperti pembangunan irigasi primer dan embung desa. Setelah terpenuhinya akses jalan, terbangunnya pasar desa sangat memudahkan warga desa dalam mendistribusikan dan menjual hasil panennya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan, Dana Desa juga digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan tingkat desa. Dengan terbangunnya PAUD di tingkat desa dapat membantu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan, Dana Desa juga digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan tingkat desa.

Kemudian dengan terbangunnya Posyandu, Polindes, Pos Kesehatan Desa setidaknya salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan (KB) bagi ibu dan anak serta warga desa. Selain digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, Dana Desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada pengajar PAUD / tenaga kesehatan tingkat desa dalam rangka peningkatan kapasitas SDM.

6.2 Tantangan Dana Desa Dalam Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan di Sulbar

6.2.1 Optimalisasi Waktu Penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa

Proses penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa (RKD)[9]. Jika dilihat dari sisi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD, tidak ditemukan kendala berarti di lingkup Provinsi Sulbar.

[9] Sebagaimana ketentuan pada pasal 99 ayat (1) PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pada tahun 2018, alokasi Dana Desa sebesar Rp471,87 miliar berhasil disalurkan secara tepat waktu dari RKUN ke RKUD pemerintah daerah lingkup Sulbar sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Besaran pagu tersebut tersalurkan dalam tiga tahap yakni Tahap I sebesar Rp94,37 miliar (Maret 2018), Tahap II sebesar Rp188,75 miliar (April-Juni 2018), dan Tahap III sebesar Rp188,75 (November 2018).

Grafik 6.5 Persentase Waktu Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD di Sulbar Tahun 2018

Sumber: OMSPAN (diolah)

Sebaliknya, terdapat tantanganan pada proses pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang seharusnya dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa telah diterima di RKUD. Pada tahun 2018, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD di Sulbar secara umum melampaui batasan tersebut.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD di Sulbar secara umum melampaui batasan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD.

Pencairan Dana Desa Tahap I yang semestinya disegerakan untuk mendanai kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) di desa justru terlambat penyalurannya. Dari total 575 desa di Sulawesi Barat, hanya 28 desa atau 4,87 persen yang menerima penyaluran Dana Desa dalam waktu kurang dari 7 hari kerja setelah diterima di RKUD. Hal tersebut berkaitan dengan keterlambatan pemerintah desa dalam menyusun APBDesa yang menjadi syarat penyaluran Dana Desa Tahap I. APBDesa yang umumnya telah selesai disusun harus disesuaikan ulang untuk mengakomodir kegiatan Padat Karya Tunai yang ketentuannya baru ditetapkan pada akhir tahun anggaran 2017.

Demikian halnya pada proses penyaluran Dana Desa Tahap II dan III di Sulbar. Ketepatan waktu penyaluran dari RKUD ke RKD masih tergolong rendah. Nampak bahwa aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan realisasi penyerapan dan capaian output periode sebelumnya yang menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.

Optimalisasi waktu penyaluran Dana Desa ke RKD perlu diupayakan. Dengan penyaluran segera ke RKD, pemerintah desa dapat segera melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai rencana kerja yang telah disusun melalui musyawarah desa. Keterlambatan penerimaan dana desa dapat mengurangi efektivitas Dana Desa dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa lingkup Sulbar.

BPMD dapat membuka klinik (layanan satu pintu) pengelolaan keuangan desa yang dapat memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pemerintah desa.

Pemerintah daerah melalui BPMD perlu meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa. BPMD dapat membuka klinik (layanan satu pintu) pengelolaan keuangan desa yang dapat memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menyusun persyaratan penyaluran Dana Desa. Diharapkan, dokumen persyaratan

penyaluran dapat diselesaikan secara cepat dan valid yang pada akhirnya akan mempercepat penyaluran Dana Desa.

6.2.2 Urgensi Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Dana Desa

Keterlambatan waktu penyaluran Dana Desa ke RKD tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam menatausahakan Dana Desa. Meskipun pemerintah telah menyediakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) guna memberikan kemudahan dalam melaksanakan tata kelola Dana Desa, hal tersebut seringkali justru menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah desa. Tidak semua aparatur desa memiliki kecakapan untuk mengoperasikan aplikasi tersebut.

Keterlambatan waktu penyaluran Dana Desa ke RKD tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam menatausahakan Dana Desa.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Monev Dana Desa di Sulbar tahun 2018, proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara periodik turut berperan dalam keberlanjutan pengelolaan keuangan di desa. Terpilihnya kepala desa baru yang umumnya akan diikuti oleh pergantian aparatur desa berpotensi memutus keberlanjutan tata kelola keuangan desa yang telah berjalan baik sebelumnya. Apabila tidak dilakukan alih data dan alih pengetahuan yang memadai, aparatur desa yang baru harus mengumpulkan dan mempelajari ulang hal-hal terkait pengelolaan desa.

Grafik 6.8 Perbandingan Rasio Pendamping Desa di Sulbar dan Nasional Tahun 2018

Sumber: BPMPD Prov. Sulbar; Kemendes PDTT (diolah)

Hasil monev yang dilakukan menunjukkan peran kunci pendamping desa untuk membantu aparatur desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa. Namun jumlah pendamping desa di Sulbar masih belum sesuai dengan jumlah desa yang ada di Sulbar.

Hasil monev yang dilakukan menunjukkan peran kunci pendamping desa untuk membantu aparatur desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa di Sulbar.

Untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam melakukan pengelolaan dana desa di tengah keterbatasan jumlah tenaga pendamping desa, pemerintah daerah dapat menginisiasi pembentukan forum komunikasi aparatur desa. Forum dimaksud dapat menjadi wadah berbagi informasi mengenai pengelolaan dana desa, baik dari sisi administrasi pelaporan Dana Desa maupun pengelolaan BUMDesa. Para kepala desa yang berhasil memimpin desanya menjadi desa mandiri dapat menularkan teknik manajemen desanya kepada para kepala desa yang masih berstatus tertinggal dan berkembang.

Selain itu, keterbatasan jumlah pendamping desa dapat disiasati dengan melakukan rotasi tenaga pendamping desa. Dengan demikian, seluruh desa di Sulbar dapat memperoleh akses bimbingan pengelolaan desa yang merata. Di sisi lain, hal tersebut

akan meningkatkan kapasitas pendamping desa dalam menangani berbagai desa dengan karakteristik yang berbeda.

6.2.3 Optimalisasi BUMDES di Sulbar

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa tersebut dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa. Keberadaan BUMDesa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan prasyarat BUMDesa harus dikelola secara baik. Selain itu, semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang menjadi landasan pengelolaan BUMDesa merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat desa. Hasil usaha BUMDesa selain ditujukan untuk modal pengembangan usaha, juga dapat digunakan untuk pembangunan desa dan pembagian bantuan kepada masyarakat miskin di desa.

Bentuk usaha BUMDesa di Sulbar mengikuti karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki. Contoh keberhasilan BUMDesa di Provinsi Sulawesi Barat adalah BUMDesa Tammangalle Bisa di desa Tammangale, Kabupaten Polewali Mandar. Sarung tenun buatan tangan perempuan desa ini mendapat sambutan pasar yang luar biasa. Langkah sederhana namun pintar kepala desa yang bisa membuat warganya mendapatkan penghasilan/pendapatan berlipat dari usaha tenun kain sarung.

Grafik 6.11 Persentase Jumlah BUMDES per Kabupaten di Sulbar Tahun 2018

Sumber: Kemendesa (diolah)

Pada tahun 2018, dari 575 desa di Sulbar, 469 atau 81,57 persen di antaranya telah memiliki BUMDesa. Namun, tidak seluruh BUMDesa tersebut berstatus aktif. Sebagai contoh, dari 40 BUMDesa di Kabupaten Mamuju hanya sekitar lima yang aktif[10]. Jenis layanan yang diusahakan juga masih terbatas antara lain budidaya tanaman dan keripik pisang, penyewaan tenda hajatan serta simpan pinjam desa.

Dari 575 desa di Sulbar, 81,57 persen di antaranya telah memiliki BUMDES. Namun, tidak seluruh BUMDES tersebut berstatus aktif.

Selanjutnya, berdasarkan hasil monev Dana Desa di Sulbar tahun 2018, nampak bahwa pemerintah desa masih menaruh fokus pada kegiatan pembangunan

[10] http://makassar.tribunnews.com/2017/03/23/realisasi-pengadaan-bumdes-di-kabupaten-mamuju-belum-maksimal-ini-sebabnya, diakses tanggal 24 Februari 2019.

infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan kesehatan masyarakat desa. Hal tersebut nampak pada realisasi kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Sulbar yang mencapai 84,27 persen dari total penggunaan Dana Desa. Sementara itu realisasi Dana Desa untuk penyertaan modal BUMDesa hanya sebesar Rp8,17 miliar atau 3,05 persen dari total realisasi penggunaan Dana Desa di Sulbar.

Pengelolaan BUMDesa di Sulbar yang belum optimal baik dari segi jumlah maupun permodalan perlu dibenahi agar pemanfaatan Dana Desa menjadi lebih efektif untuk menggerakan roda perekonomian desa. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan peraturan daerah yang mewajibkan agar setiap desa di wilayahnya memiliki BUMDesa disertai ketentuan persentase penyertaan modal. Selain itu, BPMPD dan pendamping desa dapat menyusun petunjuk teknis (juknis) pengelolaan BUMDesa baik dari sisi pengembangan usaha maupun tata kelola keuangan. Juknis tersebut dapat menjadi pegangan bagi BUMDesa yang saat ini telah berdiri namun belum beroperasi secara optimal. Diharapkan, upaya optimalisasi pengelolaan BUMDesa di Sulbar tersebut dapat menjadi sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, desa dapat menjadi lebih mandiri dan maju serta berkontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Provinsi Sulbar.

BAB VII PENUTUP

Penurunan harga CPO tingkat dunia disinyalir berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi di sulbar

Perlu mendorong produksi dan industri pengolahan komoditas selain CPO seperti Kakao dan Perikanan

Realisasi KUR didominasi KUR Mikro sektor perdagangan dan akses fasilitas KUR tidak dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat

Perlu mendorong peningkatan akses fasilitas KUR ke sektor lainnya dan penyebarluasan informasi terkait program Ultra Mikro (UMi)

Dari tujuh RSUD di Sulbar baru dua yang berstatus BLUD (RSUD Majene dan RSUD Polman)

Perlu mendorong RSUD Lainnya untuk dikelola secara BLUD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Realisasi Dana Desa ke BUMdes hanya sebesar Rp. 8,17 M/3,05%

Optimalisasi peran BUMdes untuk mengelola potensi dan sumber daya asli Desa serta meningkatkan kesejahteraan warga desa

Sulbar memiliki banyak Potensi destinasi wisata namun belum dikelola secara baik

Perlunya dukungan Pemerintah setempat untuk meningkatkan akses dan fasilitas daerah wisata dalam rangka mendongkrak penerimaan PAD sulbar

BAB VII PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari enam indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar, satu diantaranya mencapai target sesuai RPJMD Sulbar tahun 2017-2022, sedangkan lima lainnya meleset dari target. Target yang tercapai adalah Inflasi yang berhasil dikendalikan pada level yang rendah (yakni 1,80 persen dari target 3,23 persen), bahkan tercatat sebagai inflasi terendah sejak tahun 2007. Sementara itu, lima indikator lainnya yang tidak mencapai target adalah pertumbuhan ekonomi 6,23 persen (target 7,1-7,4 persen); Tingkat Kemiskinan 11,22 persen (target 10,19 peren); *Gini Ratio* 0,366 (target 0,350); TPT 3,16 persen (target 2,96 persen); serta IPM yang berdasarkan capaian tahun 2017 sebesar 64,3 serta memperhatikan perkembangan belanja pemerintah pada bidang kesehatan yang tidak mengalami ekspansi besar, maka diprediksi tidak mampu mencapai target IPM tahun 2018 sebesar 66,62. Penurunan harga CPO di tingkat dunia disinyalir berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi yang terjadi di Sulbar.
2. Realisasi Penerimaan Negara Pemerintah Pusat dan Daerah Sulbar tahun 2018 mencapai Rp1,52 triliun, turun 5,67 persen dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp1,61 triliun. Pada sisi APBN, kinerja penerimaan baik dari sektor perpajakan maupun non perpajakan mengalami perbaikan dengan peningkatan 6,57 persen. Kenaikan tersebut secara dominan didorong oleh realisasi penerimaan PPN sebesar Rp302,69 miliar, naik 8,26 persen dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui target penerimaan PPN tahun 2018. Sementara pada sisi APBD, realisasi penerimaannya mengalami penurunan 1,5 persen yang disumbang oleh berkurangnya realisasi DAK Fisik, Lain-lain PAD yang Sah, dan DBH.
3. Pertumbuhan yang selaras antara kenaikan PDRB dan penerimaan perpajakan Sulbar mengindikasikan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Sulbar berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak. Walaupun demikian, adanya gap antara pertumbuhan pajak dan non pajak dengan PDRB juga menandakan bahwa perlambatan ekonomi berpengaruh terhadap lambatnya pertumbuhan penerimaan Sulbar.

4. Realisasi Belanja Negara Pemerintah Pusat dan Daerah Sulbar tahun 2018 sebesar Rp10,81 triliun, tumbuh 2,24 persen dibandingkan tahun 2017. Ekspansi sebesar 5,51 persen pada kelompok Belanja Barang telah menggeser Belanja Modal ke posisi ketiga terbesar. Dengan demikian, komposisi belanja konsolidasian Sulbar didominasi oleh belanja konsumtif. Porsi realisasi Belanja Pegawai sebesar 33,03 persen dan Belanja Barang 30,87 persen. Sementara belanja produktif yang tampak pada Belanja Modal hanya sebesar 24,81 persen dari Belanja Negara Konsolidasian.
5. Dukungan pemerintah dalam mendorong peningkatan IPM Sulbar tampak pada realisasi belanja pada Fungsi Pendidikan yang melejit 51 persen dibandingkan tahun 2017. Secara proporsi realisasi belanja pendidikan juga meningkat dari 13 persen menjadi 19 persen terhadap total realisasi belanja pemerintah Sulbar. Namun demikian, lompatan tersebut tidak dibarengi hal yang sama pada Fungsi Kesehatan. Adapun terhadap sektor unggulan, dukungan pemerintah masih relatif rendah sebagaimana tampak pada porsi belanja pada Urusan Pertanian yang hanya sebesar 5,45 persen dari total realisasi belanja konsolidasian Sulbar.
6. Analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap indikator ekonomi masyarakat Sulbar menunjukkan bahwa kebijakan belanja pemerintah yang ekspansif berkorelasi positif terhadap PDRB. Setiap penambahan Rp1 miliar belanja pemerintah mendorong kenaikan PDRB sebesar Rp0,336 miliar.
7. Analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap indikator kesejahteraan masyarakat Sulbar menunjukkan bahwa ekspansi belanja pemerintah tidak disertai dengan linearitas perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat Sulbar. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya kenaikan pada indikator tingkat kemiskinan dan *Gini Ratio,* walaupun pada saat yang sama tingkat pengangguran mengalami penurunan. Kondisi tersebut mengisyaratkan kualitas belanja yang masih kurang optimal dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah Sulbar.
8. Tingkat kesehatan keuangan yang ditunjukkan oleh sembilan indikator menempatkan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah dengan tingkat kesehatan yang paling tinggi, sedangkan tingkat kesehatan terendah pada Kabupaten Mamasa.
9. Berdasarkan perbandingan pagu RM dan PNBP, BLUD RSUD Polman memiliki tingkat kemandirian keuangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan BLUD RSUD Majene. Porsi PNBP pada RSUD Polman mencapai 99,68 persen dari total pagu penerimaannya, sementara pada RSUD Majene jumlah pagu RM hampir berimbang

dengan pagu PNBP-nya. Namun demikian, Pemda Polman perlu tetap memantau dan mengarahkan manajemen RSUD Polman mengingat perkembangan aset yang ada tidak diikuti oleh pertumbuhan pada pagu PNBP.

10. Dukungan pemerintah pusat dalam menggerakkan roda perekonomian Sulbar dengan memperluas akses permodalan bagi UMKM tampak pada program KUR yang terus berjalan dan ditunjang dengan program UMi bagi pengusaha yang tidak terjangkau oleh KUR. Realisasi KUR didominasi oleh skema KUR Mikro dan paling banyak disalurkan pada sektor Perdagangan. Sementara UMi telah tersalur kepada 1.503 debitur dengan nilai pinjaman mencapai Rp4,47 miliar.
11. Berdasarkan analisis LQ, MRP, Shift-Share EM, Overlay, dan Tipologi Klassen, maka terdapat enam sektor dan subsektor unggulan dan potensial di wilayah Sulbar: (1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; (3) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (4) Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; (5) Sub Sektor Perikanan; dan (6) Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman.
12. Tantangan fiskal regional yang dihadapi Sulbar adalah pemerataan pola penyerapan anggaran, optimalisasi potensi pajak dari sektor ekonomi unggulan, dan pembangunan infrastruktur.
13. Secara umum, penyaluran Dana Desa telah berdampak pada perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah perdesaan Sulbar, melalui penyediaan berbagai macam sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan desa, sumur untuk akses air bersih, polindes untuk akses kesehatan, dan berbagai output lainnya. Walaupun demikian, untuk meningkatkan efektivitas program tersebut maka pemerintah Sulbar masih dihadapkan pada tantangan: optimalisasi waktu penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa; peningkatan kapasitas SDM pengelola Dana Desa; dan optimalisasi peran BUMDesa.

7.2 REKOMENDASI

1. Guna meningkatkan potensi hasil produksi sektor pertanian sebagai kontributor terbesar terhadap PDRB Sulbar. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :
   a. Peningkatan alokasi belanja pemerintah pada sektor pertanian.
   b. Program hilirisasi produk melalui industri pengolahan. Untuk itu, pemerintah Sulbar perlu mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah untuk masuk dalam industri pengolahan, melalui bantuan mesin/peralatan pengolah produk pertanian. Selain itu, pemerintah Sulbar perlu memberi insentif kemudahan investasi bagi investor, terutama yang tertarik pada industri pengolahan kelapa sawit.
   c. Perlu mendorong produksi dan industri pengolahan komoditas selain CPO, seperti kakao dan perikanan.
   d. Kerja sama dengan kampus/universitas untuk menempatkan mahasiswa yang sedang menjalani praktek lapangan pada sentra-sentra produksi pertanian, atau memberi bantuan dana penelitian pada mahasiswa/peneliti yang berminat melakukan penelitian pada bidang pertanian di wilayah Sulbar.
   e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dengan melakukan strategi pemasaran melalui media sosial untuk memperbesar peluang menembus pasar.
   f. Upaya lain yang dapat ditempuh pemerintah dalam mendorong produksi di sektor pertanian sebagai sektor unggulan adalah dengan kebijakan pada akses permodalan. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kebijakan penetapan kuota penyaluran KUR pada masing-masing sektor, utamanya pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan.
2. Dalam mendukung peningkatan kualitas manusia Sulbar, kebijakan belanja Fungsi Pendidikan yang ekspansif perlu dibarengi dengan peningkatan belanja pada Fungsi Kesehatan. Selain itu, peran Pemda selaku pembina BLUD perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan RSUD.
3. Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan penerimaan negara di wilayah Sulbar antara lain:
   a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, terutama pada sektor ekonomi unggulan Sulbar.
   b. Penertiban parkir liar untuk meningkatkan retribusi daerah.
   c. Pembukaan operasional Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di wilayah Sulbar.
   d. Dukungan pemerintah dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan potensi wisata Sulbar, dan diikuti dengan pagelaran pemilihan

duta wisata dalam bentuk komunitas milenial yang diharapkan secara aktif melakukan kegiatan promosi melalui media sosial untuk meningkatkan potensi penerimaan dari sektor pariwisata.

4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:
   a. Meningkatkan fungsi perencanaan anggaran.
   b. Pemda diharapkan melakukan percepatan penyelesaian proses tender pengadaan barang dan jasa, terutama terhadap target pekerjaan kontraktual pada akhir tahun anggaran untuk menghindari penumpukan realisasi belanja pada kuartal terakhir.
   c. Upaya efisiensi melalui kegiatan *Spending Review* terhadap belanja pemerintah daerah untuk mengidentifikasi adanya duplikasi belanja pemda.
   d. Pemda perlu memperhatikan alokasi *mandatory spending*, khususnya pada Belanja Infrastruktur minimal 25 persen dari total APBD. Hal ini mengingat alokasi belanja modal pada tahun 2018 mengalami penurunan 13,82 persen dari tahun sebelumnya, dan beberapa pemda tidak memenuhi amanat *mandatory spending* dimaksud.
5. Guna meningkatkan efektivitas Program Dana Desa terutama dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, maka diperlukan upaya antara lain:
   a. BPMD membuka klinik (layanan satu pintu) pengelolaan keuangan desa yang dapat memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menyusun persyaratan penyaluran Dana Desa. Diharapkan, dokumen persyaratan penyaluran dapat diselesaikan secara cepat dan valid yang pada akhirnya akan mempercepat penyaluran Dana Desa.
   b. Peningkatan kapasitas aparatur desa dan pendamping desa dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, kebijakan rotasi pendamping desa dapat dipertimbangkan untuk kepentingan pemerataan.
   c. Kebijakan pemenuhan persyaratan penyaluran per kabupaten perlu ditinjau ulang, mengingat banyak desa yang terhambat penyalurannya akibat menunggu penyelesaian pemenuhan persyaratan dari desa lainnya dalam kabupaten yang sama. Lingkup penyaluran dapat diperkecil menjadi per kecamatan.
   d. Optimalisasi peran BUMDesa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sebagai sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan.

REFERENSI

Bank Indonesia. 2018. *Siaran Pers: Bank Indonesia Mempertahankan Suku Bunga Kebijakan: Menjaga Momentum Pemulihan di tengah Perbaikan Ekonomi Global*. (https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_199517.aspx, diakses tanggal 12 Februari 2019)

Badan Pusat Statistik. 2017. *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. BPS. Jakarta

_____. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Barat Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*. Mamuju: BPS Provinsi Sulawesi Barat.

Kementerian Kesehatan. 2018. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan

Kontan. 12 April, 2018. *Pengusaha masih optimistis ekspor CPO ke India meningkat*. Kontan. (https://industri.kontan.co.id/news/pengusaha-masih-optimistis-ekspor-cpo-ke-india-meningkat, diakses tanggal 4 Februari 2019)

Syafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Jakarta: Prisma

Yusuf, Maulana. 1999. *Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Volume XLVII, No.2

LAMPIRAN

LAMPIRAN I Hasil Analisis Regresi Sederhana mengenai Pengaruh Belanja Pemerintah Konsolidasian Sulbar terhadap PDRB Sulbar

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,657[a]	,432	,391	492,30492	,432	10,635	1	14	,006

a. Predictors: (Constant), Belanja Pemerintah Konsolidasian Sulbar

b. Dependent Variable: PDRB Sulbar

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2577635,893	1	2577635,893	10,635	,006[b]
	Residual	3393097,857	14	242364,133		
	Total	5970733,750	15			

a. Dependent Variable: PDRB Sulbar

b. Predictors: (Constant), Belanja Pemerintah Konsolidasian Sulbar

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	6313,271	279,288		22,605	,000	5714,259	6912,284
	Belanja Pemerintah Konsolidasian Sulbar	,336	,103	,657	3,261	,006	,115	,557

a. Dependent Variable: PDRB Sulbar

Sumber: OMSPAN; LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS sulbar (diolah menggunakan SPSS 25.0)

LAMPIRAN II Hasil Analisis Overlay Sektor Unggulan di Sulbar Tahun 2018

Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha			Analisis Keunggulan Komparatif (LQ)	Model Rasio Pertumbuhan (RPs)	Shift Share EM Keunggulan Kompetitif (rij - rin)	Shift Share EM Keunggulan Spesialisasi (Eij-E'ij)	Analisis Overlay
A		**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**3,07**	**1,54**	**0,11**	**6.255,46**	**+ + + +**
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	3,03	1,63	0,12	4.777,08	+ + + +
	a	Tanaman Pangan	1,36	7,02	0,67	119,19	+ + + +
	b	Tanaman Hortikultura	2,74	1,16	0,04	577,72	+ + + +
	c	Perkebunan Semusim	5,14	1,06	0,01	3.850,53	+ + ++
	d	**Peternakan**	**1,24**	**1,28**	**0,07**	**97,14**	**+ + + +**
	e	Jasa Pertanian dan Perburuan	3,89	1,51	0,09	132,50	+ + + +
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,56	3,42	0,15	-70,75	- + + -
	3	Perikanan	4,00	1,06	0,02	1.549,13	+ + + +
B		**Pertambangan dan Penggalian**	**0,26**	**71,21**	**0,48**	**-1.678,02**	**-+ + -**
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas	-	-	-	-853,85	- - - -
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-674,72	- - - -
	3	Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-268,72	- - - -
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,41	2,37	0,28	119,27	+ + + +
C		**Industri Pengolahan**	**0,49**	**2,98**	**0,47**	**-2.861,76**	**- + + +**
	1	Industri Batubara dan Pengilangan	-	-	-	-603,48	- - - -
	2	Industri Makanan dan Minuman	1,57	1,47	0,24	514,03	+ + + +
	3	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-198,43	- - - -
	4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,08	10,29	0,84	-295,34	- + + -
	5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-59,26	- - - -
	6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,06	2,53	0,11	-148,53	- + + -
	7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman	0,03	4,78	0,30	-181,43	- + + -
	8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	2,02	0,23	-399,97	-++ -
	9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,01	2,05	0,07	-194,56	-+ + -
	10	Industri Barang Galian Bukan Logam	0,49	3,63	0,44	-90,10	- + + -
	11	Industri Logam Dasar	-	-	-	-185,23	- - - -
	12	Industri Barang dari Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	0,15	0,97	-0,01	-397,09	- - - -
	13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	**-65,85**	**- - - -**
	14	Industri Alat Angkutan	0,00	1,04	0,01	-464,03	- + + -
	15	Industri Furnitur	0,04	0,37	-0,10	-58,45	- - - -
	16	**Industri** Pengolahan Lainnya	**0,16**	**2,23**	**0,08**	**-34,06**	**- + + -**
D		**Pengadaan Listrik dan Gas**	**0,06**	**3,51**	**0,52**	**-229,16**	**- + + -**

	1	Ketenagalistrikan	0,06	3,42	0,59	-194,17	- + + -
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,07	100,71	0,26	-34,99	- + - -
E		**Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang**	**2,07**	**1,67**	**0,19**	**19,02**	**+ + + +**
F		**Konstruksi**	**0,81**	**1,35**	**0,12**	**-394,65**	**- + + -**
G		**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	**0,74**	**1,42**	**0,10**	**-752,32**	**- + + -**
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya	0,83	0,58	-0,09	-60,81	- - - -
	2	Perdagangan Besar dan Eceran; Bukan Mobil dan Sepeda Motor	0,72	1,64	0,15	-691,52	- + + -
H		**Transportasi dan Pergudangan**	**0,41**	**0,84**	**-0,07**	**-462,69**	**- - - -**
	1	Angkutan Laut	-	-	-	-6,37	- - - +
	2	Angkutan Darat	0,51	0,64	-0,15	-197,49	- - - +
	3	Angkatan Laut	0,53	1,20	0,05	-33,39	- + + -
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1,04	1,11	0,02	2,34	+ + + +
	5	Angkutan Udara	0,18	3,67	1,52	-117,64	- + + -
	6	**Pergudangan dan Jasa** Penunjang Angkutan	**0,15**	**0,94**	**-0,03**	**-110,14**	**- - - -**
I		**Penyediaan Akomodasi dan** Makan Minum	**0,08**	**1,15**	**0,04**	**-608,53**	**- + + -**
	1	Penyediaan Akomodasi	0,08	1,17	0,05	-118,81	- + + -
	2	Penyediaan Makan Minum	0,08	1,15	0,04	-489,73	- + + -
J		**Informasi dan Komunikasi**	**0,95**	**0,99**	**0,00**	**17,22**	**- - - +**
K		**Jasa Keuangan dan Asuransi**	**0,53**	**1,22**	**0,08**	**-371,10**	**- + + -**
	1	Jasa Perantara Keuangan	0,67	1,47	0,15	-165,66	- + + -
	2	Asuransi dan Dana Pensiun	0,01	0,72	-0,12	-173,83	- - - -
	3	Jasa Keuangan Lainnya	0,81	0,78	-0,11	-11,70	- - - -
	4	Jasa Penunjang Keuangan	0,01	0,20	-0,20	-19,91	- - - -
L		**L. Real Estat**	**0,95**	**1,26**	**0,06**	**-5,76**	**- + + -**
M,N		**Jasa Perusahaan**	**0,05**	**0,52**	**-0,24**	**-321,19**	**- - - -**
O		**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan** Jaminan Sosial Wajib	2,55	2,27	0,26	1.090,30	+ + + +
P		**Jasa Pendidikan**	1,74	1,26	0,07	549,93	+ + + +
Q		**Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**	**1,88**	**1,12**	**0,05**	**224,80**	**+ + + +**
R		**R,S,T,U. Jasa Lainnya**	**1,16**	**0,90**	**-0,05**	**82,17**	**+ - - +**

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAMUJU Lt.3, JALAN SUKARNO HATTA MAMUJU SULAWESI BARAT
TELEPON (0426) 2325023, +62811410026; FAKSIMILI (0426) 2325033
WEBSITE:www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/sulbar EMAIL kanwildjpbnsulbar@gmail.com

NOTA DINAS
Nomor : ND-119/WPB.26/2019

Yth.	:	Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari	:	Plt. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Penyampaian Kajian Fiskal Regional Tahun 2018 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
Tanggal	:	28 Februari 2019

Memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional dan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-98/PB/2019 tanggal 22 Januari 2019 hal Tema Analisis Tematik KFR Semester II (Tahunan) Tahun 2018, dengan ini disampaikan Kajian Fiskal Regional Tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun *softcopy* laporan dalam bentuk file *pdf* dan *ms.word* telah disampaikan ke alamat email ditpa@kemenkeu.go.id cc loditpa@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Endah Martiningrum

Kp.: BD.02/BD.0201/2019